



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERKEBUNAN

Laporan Kinerja **INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022**





KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenanNya penyusunan *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)* dapat diselesaikan, sesuai amanat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Secara substantif *Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP)* ini merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.

Isi dari LKjIP merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas (LKjIP) ini merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2023, hal ini merupakan wujud dari keinginan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Clean Government* dan *Good Governance*.

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Samarinda, 20 Februari 2023



Ir. Asmirinda, MP
Pemimpin Tingkat I (IV/b)
NIP. 19681019 199403 2 002



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2022. Capaian Kinerja (*Performance Results*) tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2022 berpedoman Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada sasaran yang digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Tahun 2022 merupakan tahun keempat Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 yang berarti Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur harus dapat mencapai target yang telah ditetapkan berdasarkan hasil pengukuran, realisasi indikator kinerja khususnya dalam sasaran strategis peningkatan nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan (atas dasar angka konstan), jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO dan NTP pekebun. Capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Nilai PDRB sub sektor perkebunan (atas dasar angka konstan)	Miliar Rupiah	20.493	17.388*	84,85
2	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>)	Perusahaan	58	80	137,93
3	NTP Perkebunan rakyat	Persentase	110	162,66	147,87

*) Sumber: BPS angka sangat-sangat sementara triwulan IV tahun 2022



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	viii
Daftar Lampiran	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	2
D. Sumber Daya Manusia	12
E. Aspek Strategis Organisasi	15
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	17
G. Sarana dan Prasarana Kerja	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
A. Perencanaan Strategis	22
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	35
C. Perjanjian Kinerja (PK)	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	41
A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP	41
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	44
C. Analisis Capaian Kinerja	46
D. Capaian Kinerja SDGs Lingkungan Hidup	46
E. Realisasi Anggaran	155
BAB IV PENUTUP	165



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Komposisi kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2022	12
Tabel 1.2.	Asset Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	18
Tabel 2.1.	Korelasi Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Tahunan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur...	25
Tabel 2.2.	Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023	27
Tabel 2.3.	Program dan Kegiatan untuk Mencapai Tujuan/Sasaran	29
Tabel 2.4.	Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022	30
Tabel 2.5.	Reviu Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022	36
Tabel 2.6.	Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022	38
Tabel 2.7.	Target Belanja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022	39
Tabel 2.8.	Anggaran per Sasaran Strategis	40
Tabel 3.1.	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	41
Tabel 3.2.	Rekomendasi dan Tindak Lanjut	41
Tabel 3.3.	Pengukuran Indikator Kinerja	45
Tabel 3.4.	Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 ..	46
Tabel 3.5.	Perusahaan yang Mendapat Sertifikat ISPO Tahun 2022	50
Tabel 3.6.	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dan n-1	60
Tabel 3.7.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra Dinas Perkebunan Prov. Kaltim 2019-2023..	64
Tabel 3.8.	Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas dengan Realisasi Nasional Tahun 2022	64
Tabel 3.9.	Tingkat Efisiensi Sumber Daya.....	77
Tabel 3.10.	Capaian Indikator Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

	Bidang Pengembangan Komoditi pada program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.....	86
Tabel 3.11.	Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi Karet 150 Ha	88
Tabel 3.12.	Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi Kelapa 20 Ha	89
Tabel 3.13.	Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi Kelapa Sawit 150 Ha	90
Tabel 3.14.	Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi Lada 150 Ha	91
Tabel 3.15.	Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi Karet 150 Ha	92
Tabel 3.16.	Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Peremajaan Kakao 50 Ha	93
Tabel 3.17.	Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Rehabilitasi Lada 50 Ha	94
Tabel 3.18.	Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi Tanaman Perkebunan (Pokir)	95
Tabel 3.19.	Data Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022	100
Tabel 3.20.	Data Pengawasan Peredaran Benih dan Kasus Benih Illegal	103
Tabel 3.21.	Rekapitulasi Luas Areal Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022	107
Tabel 3.22.	Rekapitulasi Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan	107
Tabel 3.23.	Capaian Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Tahun 2022	108
Tabel 3.24.	Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Kakao Seluas 150 Ha	110
Tabel 3.25.	Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Karet Seluas 150 Ha.....	111



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Tabel 3.26.	Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Kelapa Seluas 50 Ha	112
Tabel 3.27.	Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Kelapa Sawit Seluas 70 Ha	112
Tabel 3.28.	Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Lada Seluas 100 Ha	113
Tabel 3.29.	Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Pala Seluas 100 Ha	113
Tabel 3.30.	Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Aren Seluas 100 Ha	114
Tabel 3.31.	Pelaku Usaha yang Melakukan Aksi Mitigasi GRK	115
Tabel 3.32.	Luas NKT di Areal Perkebunan yang Dilindungi Tahun 2022.....	123
Tabel 3.33.	KTPA yang Dibentuk dan Dibina Tahun 2022.....	124
Tabel 3.34.	Penanganan Konflik Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.....	126
Tabel 3.35.	Luas Serangan Berat OPT di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022	127
Tabel 3.36.	Luas Pengendalian Serangan OPT di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022	128
Tabel 3.37.	Perusahaan yang Mendapat Sertifikasi Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) di Provinsi Kalimantan Timur	132
Tabel 3.38.	Pelaku Usaha yang Dibina dan Dimitrakan Tahun 2022.....	133
Tabel 3.39.	Lembaga pekebun yang Dimitrakan Tahun 2022.....	136
Tabel 3.40.	Perusahan yang Dibina Tahun 2022.....	137
Tabel 3.41.	Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang Dikembangkan Kompetensinya Tahun 2022.....	140
Tabel 3.42.	Kelompok Tani yang Dikembangkan Kompetensinya Tahun 2022	141
Tabel 3.43.	Lembaga Ekonomi Pekebun Tahun 2022	143
Tabel 3.44.	Kegiatan Penyuluhan dan pemberdayaan Petani Tahun 2022.....	147
Tabel 3.46.	Tujuan SDGs Dinas Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	153



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Tabel 3.47.	Target, Indikator dan Capaian SDGs Dinas Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	154
Tabel 3.48	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SDGs	154
Tabel 3.49.	Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja	155
Tabel 3.50.	Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan Sumber Dana APBD Tahun 2022	156



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	11
Gambar 3.1.	Nilai Produk Usaha Lapangan Usaha Sub Sektor Perkebunan Tahun 2013-2022	49
Gambar 3.2.	Pergerakan Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra berdasarkan Umur Tanaman dari Tahun 2019 hingga Desember 2022.....	58
Gambar 3.3.	NTP tanaman perkebunan Rakyat Tahun 2022	59
Gambar 3.4.	Pergerakan Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra dan NTP Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2019-2022	60
Gambar 3.5.	Perbandingan NTP Provinsi Provinsi Timur dan NTP Tanaman Perkebunan Provinsi Provinsi Timur Rakyat Tahun 2022	62
Gambar 3.6.	Perkembangan NTP Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2019-2022	63
Gambar 3.7.	Perbandingan NTP Perkebunan Rakyat Nasional dan NTP Perkebunan Rakyat di provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 ..	66
Gambar 3.8.	Data Sertifikasi Benih per Komoditi Tahun 2022	102
Gambar 3.9.	Areal dengan Nilai Konservasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022	123



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Prov. Kaltim
- Lampiran 2 Rencana Kinerja Tahunan 2022
- Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- Lampiran 4 Pengukuran Kinerja Tahun 2022
- Lampiran 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Lampiran 6 Penghargaan Yang Diterima Pada Tahun 2022



BAB I **PENDAHULUAN**

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada suatu Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan oleh Gubernur untuk Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Perkembangan Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai sejarah yang cukup panjang, yaitu dimulai dengan dibentuknya Kantor Karet Cabang Kalimantan Timur pada tahun 1952 dan Yayasan Karet Kalimantan Timur (cabang Kalimantan Selatan) pada tahun 1957. Kedua lembaga ini kemudian digabung menjadi Dinas Karet pada tahun 1963 yang kemudian mengalami perubahan nomenklatur menjadi Dinas Perkebunan Rakyat Kalimantan Timur pada awal Pelita I (April 1969). Melalui Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 1978 yang disempurnakan lagi dengan Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 1984 nomenklatur menjadi Dinas Perkebunan Provinsi Dati I Kalimantan Timur. Melalui Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor 03 dan Nomor 16 tahun 2001 Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur kembali mengalami perubahan. Kemudian struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur disempurnakan melalui Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2003 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 03 tahun 2004. Perubahan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mengalami perubahan lagi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2016, Dinas



Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mengalami perubahan Struktur Organisasi Tata Laksana berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas

Tugas Pokok Dinas Perkebunan seperti yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 74 Tahun 2016 yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian Sub Urusan Perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan di provinsi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pembinaan dan pengelolaan kegiatan pengelolaan kebun;
- c. Pembinaan kegiatan pengelolaan perkebunan berkelanjutan;
- d. Pembinaan dan pengelolaan pengembangan komoditi dan usaha perkebunan;
- e. Pembinaan dan pengelolaan Pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- f. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan langsung.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan



Timur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya sebagaimana berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dengan membawahi Sekretariat, Bidang Pengembangan Komoditi, Bidang Usaha, Bidang Pengolahan dan Pemasaran, Bidang Perkebunan Berkelanjutan, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretariat

Sekretariat merupakan Unit Kerja Dinas Perkebunan yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, pengelolaan aset, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengkoordinasikan rencana program dan anggaran;
- b. Pengelolaan data dan informasi;
- c. Pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, dokumentasi, kepegawaian, serta hubungan masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- e. Pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Sekretariat membawahi 3 (tiga) subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, yaitu:

- a. Sub Bagian Perencanaan Program;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

3. Bidang Pengembangan Komoditi

Bidang Pengembangan Komoditi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas pokok bidang pengembangan komoditi adalah merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan pengembangan komoditi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengembangan Komoditi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan komoditi;
- b. Pemberian pertimbangan teknis pengembangan komoditi;
- c. Penyiapan rumusan kebijakan rencana perkebunan tingkat provinsi dan neraca sumber daya komoditi serta pengembangan kelembagaan perkebunan;
- d. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja pengembangan komoditi;
- e. Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian pengembangan komoditi;
- f. Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian pengembangan komoditi;
- g. Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan komoditi;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.



Bidang pengembangan komoditi membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Komoditi, yaitu:

- a. Seksi Penyiapan dan Perluasan Lahan;
- b. Seksi Budidaya Tanaman; dan
- c. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.

4. Bidang Pengolahan dan Pemasaran

Bidang Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Tugas pokok Bidang Pengolahan dan Pemasaran adalah merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan pengolahan dan pemasaran. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengolahan dan pemasaran;
- b. Penyusunan standar, kriteria, pedoman, prosedur, petunjuk teknis terkait kegiatan pengolahan dan pemasaran;
- c. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penerapan pengolahan dan pemasaran;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- e. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan pengolahan dan pemasaran; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Bidang Pengolahan dan Pemasaran membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran, yaitu:

- a. Seksi Pengolahan Pasca Panen;
- b. Seksi Bimbingan Usaha; dan



c. Seksi Promosi dan Pemasaran.

5. Bidang Usaha

Bidang Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang usaha memiliki tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan usaha perkebunan. Dalam rangka menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menjalankan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan strategi usaha perkebunan besar;
- b. Menyiapkan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan gangguan usaha perkebunan;
- c. Menyiapkan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan usaha perkebunan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- e. Menyiapkan rumusan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi, pembinaan/ pengawasan usaha perkebunan dan kemitraan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Bidang Usaha membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha, yaitu:

- a. Seksi Pembinaan Usaha;
- b. Seksi Penanganan Konflik Usaha; dan
- c. Seksi Pembinaan Kebun Kemitraan.

6. Bidang Perkebunan Berkelanjutan

Bidang Perkebunan Berkelanjutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan tugas pokok yaitu mengkoordinasikan kebijakan, pembinaan dan pengawasan penerapan perkebunan berkelanjutan serta pemantauan dan evaluasi program.



Dalam rangka menjalankan tugas pokok tersebut, Bidang Perkebunan Berkelanjutan melaksanakan fungsi :

- a. Memberikan bimbingan kepada pelaku usaha perkebunan dalam menerapkan standar nasional dan internasional pembangunan perkebunan berkelanjutan;
- b. Mengkoordinasikan upaya-upaya penerapan konservasi lahan dan air;
- c. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
- d. Mengkoordinasikan dan mencegah terjadinya kebakaran lahan kebun sesuai prinsip-prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan;
- e. Memberikan masukan dan rekomendasi proses perolehan ijin lingkungan bagi pelaku usaha perkebunan;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- g. Mengkoordinasikan upaya-upaya mitigasi emisi gas rumah kaca serta pelaksanaan MRV (*Measurement Reporting Verification*);
- h. Memberikan bimbingan kepada usaha perkebunan untuk memanfaatkan limbah dalam mengembangkan energi baru terbarukan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Bidang Perkebunan Berkelanjutan membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan, yaitu:

- a. Seksi Pengendalian Kebakaran Kebun;
- b. Seksi Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca; dan
- c. Seksi Konservasi Lahan dan Air.

7. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 3, UPTD Pengawasan Benih Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan



mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi, pengawasan dan pembinaan peredaran benih, pemantauan, evaluasi program, dan melaksanakan urusan ketatausahaan dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kegiatan pengawasan benih perkebunan;
- b. Penilaian dan rekomendasi kelayakan ijin usaha perbenihan;
- c. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
- d. Pengendalian pelaksanaan tugas sertifikasi dan pengawasan peredaran benih;
- e. Pengsertifikasian bibit kebun plasma/kemitraan;
- f. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- g. Pengkoordinasian kegiatan, pengawasan dan pembinaan peredaran benih kepada tenaga fungsional dan instansi terkait;
- h. Pengkoordinasian tugas penanganan kasus benih ilegal;
- i. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- j. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Pengawasan Benih Perkebunan membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengawasan Benih Perkebunan, yaitu:

- a. Seksi Pengujian Mutu dan Sertifikasi Benih;
- b. Seksi Pengawasan dan Peredaran Benih;
- c. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

8. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 14, UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/



atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengembangan perlindungan tanaman perkebunan serta melaksanakan urusan ketatausahaan, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan perlindungan terhadap tanaman perkebunan;
- b. Penyebaran dan pemasaran Bio Pestisida dan APH;
- c. Penyiapan bahan dalam memfasilitasi Brigade Proteksi Tanaman untuk penanggulangan eksplosi OPT;
- d. Penyiapan bahan dalam produksi dan pengembangan biopestisida dan Agens Pengendali Hayati;
- e. Penyiapan bahan dalam melakukan kerjasama dengan pihak ketiga terhadap pengembangan Bio Pestisida dan APH;
- f. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
- g. Pengembangan teknologi pengendalian OPT;
- h. Penyiapan bahan dalam mengkoordinasikan dan memberikan rekomendasi pengendalian OPT;
- i. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan, yaitu:

- a. Seksi Pengendalian OPT;
- b. Seksi Pengembangan Bio Pestisida dan APH;
- c. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

9. UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 25, UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah



dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan tugas pokoknya yaitu menyiapkan bahan tanam perkebunan dan pemantauan, evaluasi program kerja serta melaksanakan urusan ketatausahaan, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- b. Pelaksanaan kerja sarna dengan sumber benih;
- c. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
- d. Pelaksanaan pengendalian, perumusan kebijakan pelayanan kebutuhan benih masyarakat;
- e. Pelaksanaan penyebaran informasi/ sosialisasi, pelatihan teknologi perbanyak pembibitan tanaman;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung;
- g. Pelaksanaan produksi, pemeliharaan dan pengembangan kebun koleksi, kebun induk, Pohon Induk Terpilih, dan Blok Penghasil Tinggi; dan
- h. Penyiapan petunjuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan kebun tanaman tahunan dan penyegar serta semusim dan rempah.

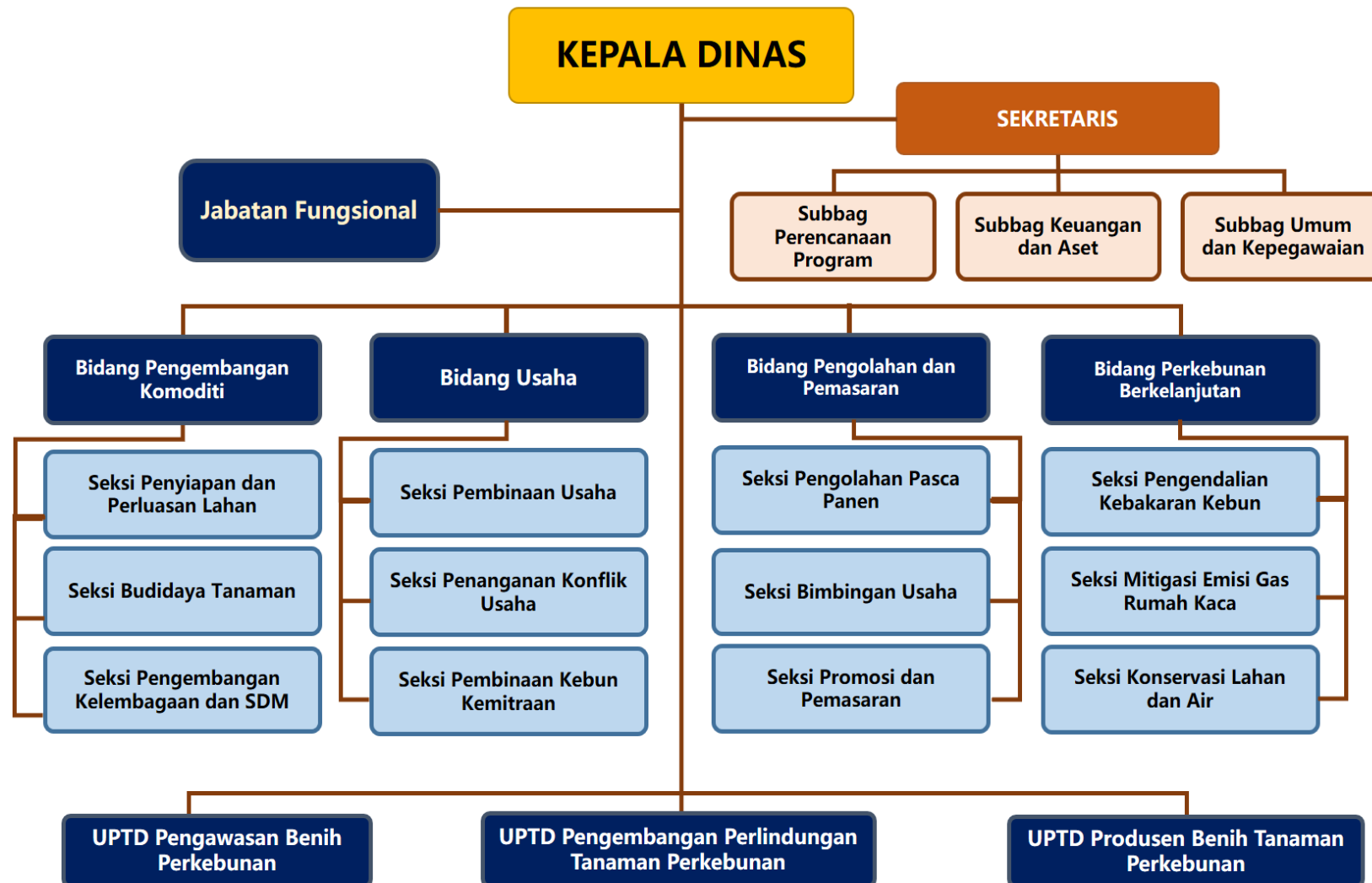
UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP) membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP), yaitu:

- a. Seksi Tanaman Tahunan dan Penyegar;
- b. Seksi Tanaman Semusim dan Rempah; dan
- c. Sub Bagian Tata Usaha.

Bagan struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur



D. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, Pegawai Negeri Sipil berjumlah 119 (Seratus Sembilan Belas) orang, dimana 76 (Tujuh Puluh Enam) merupakan Pegawai Negeri Sipil aktif dan 43 Tenaga Teknis/Non Teknis dengan komposisi kepegawaian sesuai tabel berikut ini :

Tabel 1.1. Komposisi kepegawaian Dinas Perkebunan Prov. Kaltim per 31 Desember 2022

JABATAN	JENIS KELAMIN		GOLONGAN			PENDIDIKAN				
	L	P	IV	III	II	S-2	S-1	D-IV	D-III	SLTA
Kepala Dinas	1		1			1				
Sekretaris	1		1			1				
Perencana Ahli Muda	2		2			2				
Kasubbag. Umum	1			1			1			
Pengadministrasi Umum	2	1		2			2			1
Pranata Kearsipan		1		1			1			
Pengadministrasi Kepegawaian	1			1						1
Pengadministrasi Persuratan	1				1					1
Pengelola Kepegawaian	1	1					2			
Pengelola Sarana Dan Prasarana		2					2			
Penyusun Rencana Kegiatan Dan Anggaran		2		1			2			
Pengelola Program Dan Laporan	1			1			1			
Pengadministrasi Umum		1			1					1
Pengelola Data		1					1			
Pengelola Monitoring Dan Evaluasi	1						1			
Pengelola Data		1		1			1			
Pengelola Barang Milik Negara	1			1			1			
Pengelola Keuangan	1	1		1			1	1		
Pengadministrasi Keuangan	1	2		1	1					3
Penyusun Laporan Keuangan		1						1		
Kabid Perkebunan Berkelanjutan		1	1			1				
Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	3		1	2		1	2			



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

JABATAN	JENIS KELAMIN		GOLONGAN			PENDIDIKAN				
	L	P	IV	III	II	S-2	S-1	D-IV	D-III	SLTA
Pengelola Data	1		1				1			
Pengelola Tata Guna Lahan, Air, Sarana Dan Prasarana Pertanian	1	1		1		1	1			
Pengadministrasi Keuangan	1			1						1
Analisis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	1						1			
Kabid Pengembangan Komoditi		1	1			1				
Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Muda	2	1		3			3			
Pengadministrasi Keuangan		1			1					1
Pengadministrasi Umum	1				1					1
Pengadministrasi Koleksi Tumbuhan	1				1					1
Pengelola Data Bimbingan Ekstensifikasi	1						1			
Analisis Pengelolaan Komoditas Perkebunan	1						1			
Penyusun Teknis Usaha Budidaya	1	1						2		
Pengelola Data Bimbingan Ekstensifikasi	1						1			
Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda		2		2			2			
Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda		1		1		1				
Analisis Proses Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk, Personel, Halal, Pangan Organik	1			1		1				
Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama		1		1			1			
Pengadministrasi Umum	2				2					2
Penyusun Rencana Manajemen Mutu Pasca Panen		1					1			
Pengelola Data Pasca Panen		1					1			
Analisis Pemasaran Hasil Pertanian	1						1			
Kepala Bidang Usaha	1		1			1				
Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda	3			3			3			
Pengadministrasi Umum		2		1	1		1			1
Pengelola Penilai Usaha Perkebunan	3	1					4			
Analisis Kemitraan		1					1			
Kepala Uptd Produsen Benih Tanaman	1		1			1				



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

JABATAN	JENIS KELAMIN		GOLONGAN			PENDIDIKAN				
	L	P	IV	III	II	S-2	S-1	D-IV	D-III	SLTA
Perkebunan										
Kasi Tanaman Tahunan Dan Penyegar	1			1			1			
Kasub Bagian Tata Usaha		1		1			1			
Pengelola Keuangan	1	1		2			2			
Pengadministrasi Koleksi Tumbuhan	1			1						1
Pengadministrasi Umum		1		1						1
Pranata Pengembangan Bibit Tanaman Hutan Atau Perkebunan	4	5					9			
Kepala Uptd Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	1		1			1				
Kasub Bagian Tata Usaha		1	1			1				
Kasi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman	1			1			1			
Kasi Pengembangan Bio Pestisida Dan Aph		1		1			1			
Pengelola Data	1			1			1			
Pengelola Laboratorium Pengolahan Hasil Dan Kultur		1		1			1			
Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Ahli Pertama	1			1			1			
Analisis Laboratorium Tumbuhan Dan Sarana	1			1			1			
Pengadministrasi Umum	2	1			3					3
Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Terampil	1				1				1	
Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan		1					1			
Pengelola Laboratorium		2					2			
Pengelola Organisme Pengganggu Tanaman	1						1			
Kepala Uptd Pengawasan Benih Perkebunan (Pbp)	1		1				1			
Kasi Pengawasan Dan Peredaran Benih		1	1				1			
Kasubbag. Tata Usaha		1		1			1			
Kasi Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Benih		1		1			1			
Fungsional Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya		1	1				1			
Fungsional Pengawas Benih Tanaman Pelaksana	3				3					3



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

JABATAN	JENIS KELAMIN		GOLONGAN			PENDIDIKAN				
	L	P	IV	III	II	S-2	S-1	D-IV	D-III	SLTA
Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan		1		1			1			
Pengadministrasi Keuangan		1		1						1
Pengadministrasi Umum		1		1						1
Penelaah Data Sumber Benih	1	1		1			2			
Pengelola Data Kelembagaan Benih		1					1			
Analisis Laboratorium Tumbuhan Dan Sarana		1					1			
Pengelola Kelembagaan Benih		1					1			
JUMLAH PNS	44	32	15	45	16	14	38	1	1	22
JUMLAH HONOR/PTT	19	24	0	0	0	0	37	4	0	2
JUMLAH PNS DAN HONOR/PTT	63	56	15	45	16	14	75	5	1	24

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sebagai dinas teknis yang sebagian besar tugasnya berkaitan langsung dengan masyarakat terutama petani pekebun, Dinas Perkebunan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan para mitra kerjanya. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan publik merupakan sebuah pelayanan yang mutlak dan harus diutamakan agar Dinas Perkebunan dapat berkembang dan menjadi organisasi pemerintah yang lebih baik.

Kondisi umum Dinas Perkebunan berkenaan dengan pelayanan publik dapat ditinjau sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strength) yang dimiliki:
 - a. Ketersediaan ruang/lahan yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota untuk pengembangan subsektor perkebunan;
 - b. Komitmen dan motivasi kerja pegawai cukup kuat;
 - c. Ketersediaan anggaran dan fasilitas penunjang tupoksi yang cukup memadai;
 - d. Kualitas SDM aparatur Dinas Perkebunan cukup memadai;
 - e. Dukungan dari mitra Pembangunan dan LSM dalam pengembangan perkebunan;



- f. Tersedianya kawasan areal perkebunan yang cukup luas; dan
 - g. Kontribusi subsektor perkebunan terhadap pembangunan daerah cenderung meningkat.
2. Peluang (Opportunities) yang dimiliki:
- a. Kebijakan antara kebijakan pusat dan daerah di bidang perkebunan;
 - b. Strategi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan tranformasi ekonomi berbasis pengelolaan SDA terbarukan;
 - c. Potensi sumber daya lahan cukup luas dan didukung partisipasi pelaku usaha perkebunan yang positif;
 - d. Iklim investasi dan peluang pasar terhadap produk perkebunan kondusif;
 - e. Adanya pengaruh globalisasi yang memudahkan jaringan dan akses pemasaran komoditi perkebunan;
 - f. Ketergantungan masyarakat akan komoditi perkebunan cukup tinggi;
 - g. Pemenuhan pangan dan energi hijau untuk pemenuhan Ibu Kota Negara (IKN) baru; dan
 - h. Dukungan kebijakan dan regulasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja.
3. Kelemahan (Weaknesses) yang dimiliki :
- a. Belum lengkap dan akuratnya *database* tentang kondisi dan potensi pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur;
 - b. Koordinasi antar unit kerja internal belum optimal;
 - c. Alih fungsi lahan perkebunan dan tata ruang pembangunan;
 - d. Belum tersusunnya pola karir dan pengembangan pegawai;
 - e. Lemahnya penegakan hukum;
 - f. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan *stakeholder* belum berjalan baik;
 - g. Perijinan sektor perkebunan banyak yang tidak *clear* dan *clean*;
 - h. Pelaksanaan pembangunan perkebunan belum didukung dengan perencanaan yang akurat;
 - i. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan masih rendah;



- j. Lambatnya regenerasi untuk menggantikan pegawai yang memasuki usia pensiun; dan
 - k. Rendahnya produktivitas kebun dan rendahnya nilai tambah hasil perkebunan.
4. Ancaman (Threats) yang dimiliki :
- a. Praktek perijinan usaha perkebunan di masa lalu yang tidak tertib menimbulkan permasalahan tumpang tindih peruntukan lahan dan menyebabkan konflik;
 - b. Kolaborasi pelaksanaan program/kegiatan untuk mendukung usaha perkebunan antar OPD belum optimal;
 - c. Persepsi LSM tentang isu kerusakan lingkungan akibat pembangunan perkebunan;
 - d. Adanya tuntutan global untuk penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor landbase;
 - e. Isu kehilangan keanekaragaman hayati akibat pembukaan lahan untuk perkebunan;
 - f. Infrastruktur jalan pada areal perkebunan masih terbatas;
 - g. Berkurangnya tenaga kerja subsektor perkebunan;
 - h. Fluktuasi harga komoditas perkebunan yang tidak dapat dikendalikan;
 - i. Lambatnya hilirisasi untuk menampung dan mengolah produk hasil perkebunan; dan
 - j. Terhambatnya usaha perkebunan akibat pandemi Covid-19.

F. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Isu-isu strategis merupakan dinamika kehidupan lingkungan yang memiliki efek positif maupun negatif dalam cakupan pembangunan regional, nasional, bahkan internasional. Selain berdasarkan cakupan kewilayahan, isu-isu strategis juga harus diperhatikan dalam kerangka series waktu yakni pemilahan antara isu-isu strategis yang sedang terjadi maupun isu-isu strategis yang akan terjadi sehingga status prioritas pada program pembangunan dapat lebih tepat sasaran sesuai tujuan pembangunan daerah.



Berdasarkan tugas dan fungsinya maka dapat diidentifikasi isu strategis yang ditemui dalam pelaksanaan pembangunan sub sektor perkebunan yaitu :

1. Diperlukan tindakan penataan dan penertiban perijinan di sektor perkebunan;
2. Peningkatan produktivitas kebun khususnya kebun swadaya;
3. Meningkatkan upaya kemitraan antara perusahaan perkebunan dengan penguatan kelembagaan pekebun yang baik;
4. Tuntutan penerapan prinsip pembangunan perkebunan secara berkelanjutan di Kalimantan Timur;
5. Memperbaiki sistem pengelolaan data perkebunan dan diseminasinya;
6. Membuka jalur pemasaran komoditas perkebunan hingga ke tingkat internasional;
7. Melakukan diversifikasi pengembangan komoditas perkebunan;
8. Pemenuhan pangan dan energi untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Negara;
9. Penggerak dan pemulih ekonomi kerakyatan melalui usaha perkebunan di masa pandemi Covid-19; dan
10. Percepatan pelaksanaan pembangunan kawasan perkebunan berbasis korporasi petani.

G. SARANA DAN PRASARANA KERJA

Sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam mendukung pencapaian target dari Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun sarana dan prasarana kerja berdasarkan neraca asset Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2. Asset Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan
	Tanah		
1	Tanah	463.664	m ²



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan
	Gedung, Bangunan dan ruangan		
1	Gedung	1 9 1.755,25	Unit (Bertingkat) Unit (Tidak Bertingkat) m ²
2	Pos Jaga	2	Unit
3	Area Parkir	3	Area
4	Ruang Rapat	6	Ruang
5	Ruang Arsip	1	Ruang
6	Gudang	1	Ruang
7	Koperasi	1	Buah
8	Taman Dalam	7	Area
	Peralatan dan Mesin		
	Alat Besar		
1	Diesel Pile Driver	3	Unit
2	Mesin proses lainnya	1	Unit
3	Pompa air	8	Unit
	Komputer		
1	P.C Unit	98	Unit
2	Laptop	67	Unit
3	Note Book	95	Unit
4	Tablet PC	5	Unit
5	Personel komputer lainnya	4	Unit
6	Scanner (peralatan mini komputer)	16	Unit
7	Peralatan mini komputer lainnya	2	Unit
8	Monitor	2	Unit
9	Printer	138	Unit
10	Scanner	16	Unit
11	Peralatan personel komputer lainnya	9	Unit
12	Server	1	Unit



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan
13	Router	1	Unit
14	Peralatan jaringan lainnya	2	Unit
	Alat Kantor		
1	Mesin ketik manual standard	6	Unit
2	Mesin ketik listrik	6	Unit
3	Mesin hitung elektrik	3	Unit
4	Mesin fotocopy lainnya	1	Unit
5	Camera CCTV	24	Unit
6	Alat Pengancur Kertas	2	Unit
7	Mesin absensi	4	Unit
8	LCD Projector/Infocus	8	Unit
9	Mesin pemotong rumput	15	Unit
10	Mesin vacum clenaer	1	Unit
11	A.C Window	32	Unit
12	A.C Split	56	Unit
13	Televisi	22	Unit
14	Camera Elektronik	14	Unit
15	Computer Compatible	4	Unit
16	UPS	44	Unit
17	Dispenser	4	Unit
18	Display	4	Unit
19	Equalizer	1	Unit
20	Faximile	2	Unit
21	Handy Cam	11	Unit
23	Handy Talky	4	Unit
24	Layar Film	5	Unit
25	Loudspeaker	71	Unit
26	Mesin Fotocopy	1	Unit



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan
27	Mesin Ketik Elektronik	1	Unit
28	Mesin Ketik Manual	1	Unit
29	Mesin Pengering	1	Unit
30	Mesin Penghalus	1	Unit
31	Mesin Penghisap Debu	1	Unit
32	Mesin Proses Lain-Lain	1	Unit
33	Mic Conference	31	Unit
34	Microphone	14	Unit
35	Mixer PVC	1	Unit
36	Overhead Projector	1	Unit
37	Peralatan Jaringan Lain-lain	2	Unit
40	Peralatan studio Visual Lain	3	Unit
41	Pesawat Telephone	14	Unit
42	Power Amplifier	1	Unit
43	Power Supply	1	Unit
44	Server	1	Unit
45	Sound System	1	Unit
46	Teletype Scanner	1	Unit
48	Video Monitor	1	Unit
49	Video Tape Recorder Portable	2	Unit
50	Wireless	2	Unit

Sumber: Daftar Aset Tetap Aset Lainnya 2022



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, bahwa Renstra PD merupakan bagian dari RPJMD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya Renstra merupakan turunan dari RPJMD. Sasaran RPJMD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra PD selama lima tahun. Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 dimaksudkan sebagai dasar bagi seluruh *stakeholders* subsektor perkebunan dan setiap elemen aparatur di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan program/kegiatan selama jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam penyusunan Renstra, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Isu-isu strategis serta analisis *strengths, weaknesses, opportunities* dan *threats* (SWOT).

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan dengan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan serta dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur seluruh komponen *stakeholder* pembangunan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 24 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, maka Visi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang ingin diwujudkan melalui pembangunan subsektor perkebunan selama tahun 2019-2023 adalah ***"Terwujudnya Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan untuk Mensejahterakan Masyarakat"***



2. Misi

Setelah perumusan visi pembangunan di subsektor perkebunan, tahapan selanjutnya adalah menjabarkan visi tersebut menjadi misi-misi yang akan dicapai oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selama masa periode perencanaan pembangunan daerah. Pernyataan perwujudan visi melalui misi-misi Dinas Perkebunan dimaksudkan agar setiap elemen kelembagaan Dinas Perkebunan maupun pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui, mengenal dan berpartisipasi aktif dalam melaksanakan setiap detail misi yang telah disepakati. Adapun misi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya saing hasil perkebunan untuk memenuhi bahan baku industri dan menunjang ekspor nasional; dan
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembangunan sektor perkebunan yang berkelanjutan.

3. Tujuan

Sebagai salah satu komponen penting dalam perencanaan strategis adalah tujuan. Tujuan dapat dirumuskan sebagai gambaran tentang keadaan yang diinginkan atau dicita-citakan oleh Dinas Perkebunan selama kurun waktu lima tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan Dinas Perkebunan merupakan sebuah upaya dalam mendukung pencapaian Program Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023.

Adapun tujuan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dapat dirincikan sebagai berikut :

"Meningkatkan peran Perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan Perkebunan yang berkelanjutan".



4. Sasaran

Sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan secara nyata dalam periode lima tahun ke depan sesuai dengan penjabaran dari tujuan rencana strategis. Dari tujuan Renstra Dinas Perkebunan, dapat dirumuskan turunan tujuan berupa sasaran-sasaran perencanaan pembangunan subsektor perkebunan yang efektif dan efisien serta memiliki indikator yang spesifik, jelas, dan terukur sebagai bahan evaluasi, monitoring, dan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2023 sebagai pendukung pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya nilai PDRB sub sektor perkebunan, dengan indikator :
 - Nilai PDRB sub sektor perkebunan (miliar rupiah, atas dasar angka konstan)
2. Meningkatnya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan, dengan indikator :
 - Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) (Perusahaan)
3. Meningkatnya kesejahteraan pekebun, dengan indikator :
 - NTP perkebunan rakyat (%)

Hubungan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan dapat dilihat pada tabel berikut :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Tabel 2.1. Korelasi Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Tahunan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian s.d Tahun 2018	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Target Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatkan peran Perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan Perkebunan yang berkelanjutan	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)			4,49	5,1	5,4	5,0	5,2	5,3	5,3
		Meningkatnya nilai PDRB sub sektor perkebunan	Nilai PDRB sub sektor perkebunan (miliar rupiah, atas dasar angka konstan)	15.324	17.544	18.773	19.087	20.493	21.997	21.997
		Meningkatnya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan	Jumlah perusahaan yang mendapat kan sertifikat ISPO (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>) (Perusahaan)	38	43	48	53	58	63	63
		Meningkatnya kesejahteraan pekebun	NTP perkebunan rakyat (%)	88,45	89	92	108	110	112	112



5. Strategi dan Kebijakan

Prinsip pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur adalah **"Pembangunan perkebunan yang berkelanjutan yang didasari pada penerapan konsep *Green Economy*"** sebagai terjemahan misi ke 2 dan misi ke 4 RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023. Dalam pelaksanaannya, strategi dan kebijakan yang ditetapkan diharapkan mampu mencapai tujuan perbaikan kualitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mengurangi permasalahan sosial yang mungkin ditimbulkan sebagai dampak pembangunan perkebunan.

Adapun Strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah:

1. Mengutamakan peningkatan produktivitas dari pada perluasan areal perkebunan;
2. Menyediakan bahan baku untuk pemenuhan industri hilir;
3. Mempertahankan usaha perkebunan sebagai penggerak dan pemulihan ekonomi di masa Covid-19;
4. Memprioritaskan pengembangan komoditas unggulan non sawit (diversifikasi komoditas unggulan);
5. Perluasan kebun di arahkan pada pengembangan kebun rakyat dan dilakukan pada lahan yang memiliki cadangan karbon rendah;
6. Pengembangan dan penguatan kelembagaan perkebunan;
7. Pengelolaan dan penyediaan data perkebunan berbasis spasial yang transparan dan valid;
8. Mempercepat realisasi pembangunan kebun untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan melalui penataan dan penertiban perijinan di sektor perkebunan;
9. Melindungi area dengan nilai konservasi tinggi (ANKT) di area perkebunan;
10. Mengurangi kerugian hasil akibat serangan OPT;
11. Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan antara pekebun dan perusahaan;



12. Peningkatan nilai tambah dan perbaikan harga komoditi Perkebunan rakyat; dan
13. Peningkatan fasilitasi pembangunan kebun rakyat.

Pelaksanaan Strategi dan kebijakan tersebut diatas dapat efektif dilakukan apabila ada sinergi dan kolaborasi dari berbagai stakeholder, oleh karena itu diseminasi dan sosialisasi Strategi dan Kebijakan ini akan dilakukan secara terus menerus agar dapat dipahami yang pada akhirnya adanya partisipasi aktif masyarakat luas dalam mencapainya melalui pelaksanaan program kegiatan yang secara langsung didesain untuk mencapai tujuan.

Tabel 2.2 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi/Kebijakan
Meningkatkan peran Perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan Perkebunan yang berkelanjutan	Misi 1 : Meningkatkan daya saing hasil perkebunan untuk memenuhi bahan baku industri dan menunjang ekspor nasional	
	1. Meningkatnya PDRB sub sektor perkebunan	Mengutamakan peningkatan produktivitas dari pada perluasan areal perkebunan <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan produksi komoditi perkebunan
		Menyediakan bahan baku untuk pemenuhan industri hilir <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan produk primer menjadi beberapa produk turunan lainnya
		Mempertahankan usaha perkebunan sebagai penggerak dan pemulihan ekonomi di masa Covid-19 <ul style="list-style-type: none">• Mendorong usaha perkebunan sebagai penopang ekonomi
	Misi 2 :Memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembangunan sektor perkebunan yang berkelanjutan	
	1. Meningkatnya PDRB sub sektor perkebunan	Memprioritaskan pengembangan komoditas unggulan non sawit (diversifikasi komoditas unggulan) <ul style="list-style-type: none">• Mendorong peningkatan luas komoditas non sawit
		Perluasan kebun di arahkan pada pengembangan kebun rakyat dan dilakukan pada lahan yang memiliki cadangan karbon rendah <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan luasan lahan pada perkebunan rakyat
		Pengembangan dan penguatan kelembagaan perkebunan <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana penunjang
		Pengelolaan dan penyediaan data perkebunan berbasis spasial yang transparan dan valid <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pengelolaan data dan informasi perkebunan
	2.	Mempercepat realisasi pembangunan kebun untuk



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Strategi/Kebijakan
	Meningkatnya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan	meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan melalui penataan dan penertiban perijinan di sektor perkebunan <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan efektivitas pengawasan usaha perkebunan yang berkelanjutan • Melakukan penataan dan penertiban perijinan usaha Perkebunan • Penanganan konflik perkebunan
		Melindungi area dengan nilai konservasi tinggi (ANKT) di area perkebunan <ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas mitigasi emisi GRK • Pengelolaan area dengan nilai konservasi tinggi (ANKT) di area perkebunan • Penanganan pengendalian kebakaran lahan perkebunan • Peningkatan pemanfaatan limbah biomassa perkebunan
		Mengurangi kerugian hasil akibat serangan OPT <ul style="list-style-type: none"> • Penanganan hama dan penyakit • Pengembangan APH dan Biopestisida
	3. Meningkatkan kesejahteraan pekebun	Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan antara pekebun dan perusahaan <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan dan kebun kemitraan
		Peningkatan nilai tambah dan perbaikan harga komoditi Perkebunan rakyat <ul style="list-style-type: none"> • Memperpendek mata rantai pemasaran produk perkebunan rakyat • Memfasilitasi akses permodalan untuk pengembangan usaha perkebunan • Peningkatan mutu dan nilai tambah produk perkebunan • Peningkatan pemasaran produk perkebunan dengan standarisasi tinggi dan berorientasi ekspor • Membangun outlet-outlet pemasaran produk olahan perkebunan
		Peningkatan fasilitasi pembangunan kebun rakyat <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian bantuan padat karya pada pembangunan perkebunan rakyat

6. Program/ Kegiatan untuk Mencapai Tujuan/Sasaran

Program merupakan suatu operasionalisasi dari strategi atau kebijakan pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan dengan cakupan teknis lebih mendalam dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) atau masyarakat.

Setiap program dalam merealisasikan strategi pembangunan memiliki fungsi dan karakter yang berbeda. Meskipun begitu, integral dari program tersebut akan memiliki muara yang sama yakni terwujudnya visi Dinas Perkebunan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

sebagai lembaga yang dipercaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengelolaan subsektor perkebunan.

Penjabaran dari program dan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang dikembangkan untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Program dan Kegiatan untuk Mencapai Tujuan/Sasaran

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
Meningkatkan peran Perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan Perkebunan yang berkelanjutan	Meningkatnya PDRB sub sektor perkebunan	Nilai PDRB sub sektor perkebunan	Miliar rupiah, atas dasar angka konstan	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian *)	1. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
					2. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian *)	1. Penataan Prasarana Pertanian
				Program Penyuluhan Pertanian *)	1. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
					2. Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian
		3. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan			
	Meningkatnya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>)	Perusahaan	Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian *)	1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
				Program perizinan Usaha Pertanian *)	1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya kesejahteraan pekebun	NTP perkebunan rakyat	%	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian *)	1. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
				Program Penyuluhan Pertanian *)	1. Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
					2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

*) Program Prioritas

dengan target program dan kegiatan beserta indikator dan target pada Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.4. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator	Target Renja	Target P_Renja
DINAS PERKEBUNAN				
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan (%)	89 %	89 %
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)	72 %	72 %
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	20%	20%
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	5 Unit	5 Unit
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	8 Jenis	8 Jenis
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	3 Jenis	3 Jenis
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah	3 Jenis	3 Jenis



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator	Target Renja	Target P_Renja
	Pemerintahan Daerah	yang dipelihara (Jenis)		
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Produksi komoditas perkebunan (Ton)	18,126,490.20	18,126,490.20
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis (Ton/ Ha)	19,3 Ton/Ha	19,3 Ton/Ha
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan (Kelompok Tani)	30 KT	30 KT
		Luas kebun yang dibangun (Ha)	1.462.645 Ha	1.462.645 Ha
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang di perluas (Ha)	595 Ha	720 Ha
3.27.05	Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4,067 Ton CO2eq	4,067 Ton CO2eq
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi:	135 Pelaku Usaha	135 Pelaku Usaha
		a. Mitigasi GRK (Pelaku Usaha)	130 Pelaku Usaha	130 Pelaku Usaha
		b. Penanganan Konflik usaha perkebunan (Pelaku Usaha)	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha
3.27.06	Program perizinan Usaha Pertanian	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan	35 Perusahaan
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan (Perusahaan)	97 Perusahaan	97 Perusahaan
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (Lembaga)	1 Lembaga	1 Lembaga



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator	Target Renja	Target P_Renja
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya (Orang)	25 Orang	45 Orang
3.27.07.1.02	Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian	Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya (Kelompok Tani)	31 KT	31 KT
		Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan (Unit)	1 Unit	1 Unit
		Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan (Unit)	5 Unit	5 Unit
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk (Lembaga)	20 Lembaga	20 Lembaga
		Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI (Kelompok Tani)	4 KT	4 KT
UPTD PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN				
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan (%)	89%	89%
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	20%	20%
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	3 Unit	3 Unit



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator	Target Renja	Target P_Renja
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	6 Jenis	6 Jenis
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/ pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	3 Jenis	3 Jenis
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Jenis)	3 Jenis	3 Jenis
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah benih yang beredar (Benih)	6.000.000 Benih	6.000.000 Benih
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi (Benih)	6.000.000 Benih	6.000.000 Benih
UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN				
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan (%)	89%	89%
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	20%	20%
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	3 Unit	3 Unit
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	5 Jenis	5 Jenis



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator	Target Renja	Target P_Renja
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	3 Jenis	3 Jenis
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Jenis)	3 Jenis	3 Jenis
3.27.05	Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT (Rupiah)	Rp. 916,648,000	Rp. 916,648,000
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas serangan berat OPT yang dikendalikan (Ha)	195 Ha	195 Ha
UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN				
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan (%)	89%	89%
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	20%	20%
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (%)	3 Unit	3 Unit
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	3 Jenis	3 Jenis
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Jenis)	3 Jenis	3 Jenis



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator	Target Renja	Target P_Renja
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)	80%	80%
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan (Benih)	50.000 Benih	25.000 Benih

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Definisi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah mengalami revidi di tahun 2022 dan terakhir di tahun 2023. Adapun review IKU di tahun 2022 seperti dalam tabel berikut :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Tabel 2.5. Reviu Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Alasan	Sumber Data	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Penanggung jawab
1.	Meningkatnya PDRB sub sektor perkebunan	Nilai PDRB sub sektor perkebunan	miliar rupiah, atas dasar angka konstan	Sektor perkebunan berperan serta dalam mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan	BPS	Total Output - Konsumsi Antara	Bidang Pengembangan Komoditi dan UPTD PBP
2.	Meningkatnya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>)	Perusahaan	Sektor perkebunan berperan aktif dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Lemabaga sertifikasi ISPO	Penambahan perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO	Bidang Perkebunan Berkelanjutan, Bidang Usaha dan UPTD P2TP
3.	Meningkatnya kesejahteraan pekebun	NTP Perkebunan Rakyat	Persentase	Sektor perkebunan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan pekebun	BPS	$\frac{\text{Indeks harga yang diterima petani}}{\text{Indeks harga yang dibayar petani}} \times 100$	Bidang Pengolahan dan Pemasaran, serta UPTD PBTP



Selain itu, terdapat juga indikator tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran strategis RPJMD, yaitu **Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)**.

C. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam Rencana Strategis Tahun 2019 – 2023 disusunlah Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022. Perjanjian Kinerja adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan dalam hal ini Gubernur sebagai pengambil kebijakan dan pimpinan PD sebagai pelaksana kebijakan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perjanjian Kinerja memuat dua unsur pokok yaitu pernyataan Perjanjian Kinerja yang harus ditandatangani oleh penanggung jawab program dengan atasan langsung dan lampiran yang berisi tentang target capaian yang ditetapkan bersama yang akan dicapai pada akhir periode penganggaran. Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4
Meningkatnya PDRB sub sektor perkebunan	Nilai PDRB usaha sub sektor perkebunan	miliar rupiah, atas dasar angka konstan	20.493
Meningkatnya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan	Jumlah perusahaan yang mendapat kan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil)	Perusahaan	58



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4
Meningkatnya kesejahteraan pekebun	NTP perkebunan rakyat	%	110

1. Rencana Anggaran Tahun 2022

Untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan memperoleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Murni Tahun 2022 sebesar Rp. 53.940.555.342,- dengan rincian program penunjang sebesar Rp. 25.353.633.342,- dan program pembangunan sebesar Rp. 28.586.922.000,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2022 sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, menjadi Rp. 56.284.752.243,- (bertambah Rp. 2.344.196.901,-) dengan rincian program penunjang sebesar Rp. 27.365.880.243,- dan program pembangunan sebesar Rp. 28.918.872.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 49.645.749.860,- (88,20%) dengan rincian untuk belanja program penunjang Rp. 25.632.820.123,- (93,67%) belanja pembangunan sebesar Rp. 24.012.929.737,- (83,04%).

2. Target Belanja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Pada tahun 2022, target belanja APBD perubahan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.7. Target Belanja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1	Belanja Penunjang	27.365.880.243	25.632.820.123	93,67



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
2	Belanja Pembangunan	28.918.872.000	24.012.929.737	83,04
Jumlah		56.284.752.243	49.645.749.860	88,20

1. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8. Anggaran per Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya PDRB sub sektor perkebunan	23.654.619.500	18.823.118.303	79,57
2	Meningkatnya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan	2.670.577.500	2.625.308.385	98,30
3	Meningkatnya kesejahteraan pekebun	2.593.675.000	2.564.503.049	98,88



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pada tahun 2022, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur melakukan Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dengan hasil penilaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No.	Komponan Yang Nilai	Bobot (%)	Nilai 2020	Nilai 2021
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30	27,25	27,55
2	Pengukuran Kinerja	25	15,31	18,75
3	Pelaporan Kinerja	15	12,22	12,22
4	Evaluasi Internal	10	5,73	5,73
5	Pencapaian Kinerja	20	11,92	11,88
	Nilai Hasil Evaluasi	100	72,63	76,12
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

2. Tindak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Timur memberikan rekomendasi yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut/ Rencana Aksi	Sudah/Belum
1.	Evaluasi Perencanaan Kinerja		
	- Dokumen Renstra direviu secara berkala dan memberikan upaya perbaikan yang	▪ Telah dilakukan penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun	Sudah



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut/ Rencana Aksi	Sudah/Belum
	signifikan	2019-2023 <ul style="list-style-type: none">Bulan Oktober 2022 telah dilakukan revidi Dokumen Renstra 2019-2023	
	- Target jangka menengah dalam dokumen Renstra seharusnya dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan dan harus ada tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan	<ul style="list-style-type: none">Telah dilakukan monitoring pencapaian target jangka menengah yang kemudian digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Sudah
2.	Evaluasi Pengukuran Kinerja		
	- Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas seharusnya dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	<ul style="list-style-type: none">Mengembangkan <i>system reward</i> dan <i>punishment</i> yang transparan dan partisipatif selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor: 188.4/220/Kpts-Disbun/2022 tanggal 5 Juni 2022 yang dilaksanakan pada tanggal Desember 2022	Sudah
	- IKU seharusnya direviu secara berkala dan ada upaya perbaikan yang signifikan	<ul style="list-style-type: none">Melakukan kegiatan revidi IKU setiap triwulan dengan melibatkan semua Bidang dan UPTD lingkup Dinas Perkebunan untuk mempertajam upaya perbaikan yang lebih signifikan	Sudah
3	Evaluasi Kinerja Internal		
	- Hasil Evaluasi seharusnya disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan terjadi kesepakatan dengan pihak terkait langsung dengan	<ul style="list-style-type: none">Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pencapaian target Kinerja Bidang/UPTD secara berkalaMembuat berita acara kesepakatan hasil rapat monitoring dan evaluasi dilengkapi dengan rekomendasi pimpinan	Sudah



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut/ Rencana Aksi	Sudah/Belum
	temuan hasil evaluasi. Kesepakatan tersebut secara formal menjelaskan siapa dan kapan batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti	dan tindak lanjut yang ditanda tangani oleh Penanggungjawab kegiatan dimasing-masing unit kerja	
	- Evaluasi program seharusnya dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program, memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan Perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan	▪ Melakukan kegiatan evaluasi kinerja program secara berkala. Rekomendasi pimpinan kemudian digunakan sebagai bahan perencanaan dan penganggaran tahun mendatang	Sudah
	- Pemantauan Rencana Aksi seharusnya dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja dan memberikan alternatif perbaikan	▪ Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi rencana aksi secara berkala dan menindaklanjuti hasil rekomendasi pimpinan sebagai bahan perbaikan	Sudah
	- Menindaklanjuti hasil evaluasi program untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa mendatang dan hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk langkah nyata	▪ Hasil evaluasi pelaksanaan program sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam penyusunan rencana kerja, penganggaran dan penetapan target program di tahun berikutnya untuk dilaksanakan oleh penanggungjawab di masing-masing unit kerja ▪ Hasil evaluasi rencana aksi dijadikan bahan perbaikan penyesuaian pelaksanaan kegiatan ditahun berikutnya	Sudah



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut/ Rencana Aksi	Sudah/Belum
4	PENCAPAIAN SASARAN/ KINERJA ORGANISASI		
	- Mengoptimalkan peningkatan pada 3 sub komponen pencapaian sasaran/ kinerja organisasi yaitu: target dapat dicapai, capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya dan terutama informasi mengenai kinerja dapat diandalkan dimasa yang akan datang	▪ Melakukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan serta bersinergi dan berkolaborasi secara internal dan eksternal dalam pemanfaatan sumberdaya untuk peningkatan pencapaian target sasaran/ kinerja	Sudah

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun pengukuran indikator kinerja, seperti pada tabel di bawah ini :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Tabel 3.3. Pengukuran Indikator Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulanan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya PDRB sub sektor perkebunan	Nilai PDRB sub sektor perkebunan	miliar rupiah, atas dasar angka konstan	20.493	Triwulan I	0	0	0
					Triwulan II	0	0	0
					Triwulan III	0	0	0
					Triwulan IV	20.493	17.388*	84,85
2	Meningkatnya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>)	Perusahaan	58	Triwulan I	0	0	0
					Triwulan II	0	0	0
					Triwulan III	0	0	0
					Triwulan IV	58	80	137,93
3	Meningkatnya kesejahteraan pekebun	NTP Perkebunan Rakyat	Persentase	110	Triwulan I	0	0	0
					Triwulan II	0	0	0
					Triwulan III	0	0	0
					Triwulan IV	110	162,66	147,87

*) Angka sangat-sangat sementara triwulan IV tahun 2022 (Sumber BPS Provinsi Kalimantan Timur)



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

C. Analisis Capaian Kinerja

Setelah dilakukan perhitungan statistik perkebunan, realisasi kinerja pada tahun 2022 maupun realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai PDRB sub sektor perkebunan (atas dasar angka konstan)	Miliar Rupiah	20.493	17.388	84,85	Sumber: BPS (Angka sangat-sangat sementara triwulan IV tahun 2022)
2	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>)	Perusahaan	58	80	137,93	(Sumber: Dirjenbun Kementan RI)
3	NTP perkebunan rakyat	Persen	110	162,66	147,87	Rata-rata NTP perkebunan rakyat dalam 1 tahun (Sumber: BPS 2022)

Pada tahun 2022, rata-rata capaian keseluruhan indikator kinerja sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai target. Adapun capaian dari masing-masing sasaran tersebut, meliputi:

- a. Sasaran pertama: meningkatnya nilai PDRB sub sektor perkebunan. PDRB atas dasar harga konstan merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) *Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022*

tertentu sebagai tahun dasar. Nilai PDRB sementara sub sektor perkebunan berdasarkan angka sangat-sangat sementara triwulan IV pada tahun 2022 mencapai 17.388 Miliar Rupiah (84,85%) dari target 20.493 Miliar Rupiah.

Faktor yang mempengaruhi belum tercapainya nilai PDRB sub sektor perkebunan adalah penurunan produksi komoditi perkebunan yakni dari 17,36 Juta Ton menjadi 17,02 Juta Ton di tahun 2022 (berdasarkan angka sementara tahun 2022) atau turun 340.711 Ton (-1,96%) dari tahun 2021. Terutama pada komoditi sawit yakni dari 17,27 juta ton TBS menjadi 16,94 juta ton TBS atau turun 339.097 ton TBS (-1,96%) dari tahun 2021.

Penurunan produksi komoditi perkebunan tersebut terjadi akibat kenaikan harga pupuk, kelangkaan pupuk di tahun 2022 dan kurangnya kegiatan intensifikasi (pemupukan) semenjak pandemi covid-19 yang berimbas pada penurunan aktivitas pekebun. Selain itu penghapusan pupuk subsidi untuk beberapa komoditi mulai 1 Juli 2022, adanya kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada produksi kebun ditingkat petani (pelarangan ekspor CPO) serta intensifikasi, peremajaan dan rehabilitasi yang telah dilakukan pada tahun 2022 baru dirasakan hasilnya tahun selanjutnya juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penurunan produksi komoditi perkebunan pada tahun 2022.

Namun demikian capaian kinerja kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur (capaian sasaran 10 RPJMD meningkatnya peran sektor pertanian (dalam arti luas)) sampai dengan triwulan IV tahun 2022 mencapai 4,21% dari target 5,2% atau 80,96% (Sumber BPS Kaltim angka sangat-sangat sementara triwulan IV tahun 2022). Sedangkan kontribusi sub sektor perkebunan terhadap pertanian dalam arti luas terus mengalami peningkatan dari 58,61 % di tahun 2021 menjadi 59,80% di tahun 2022 atau meningkat 2,03%. Capaian tersebut berasal dari produksi



komoditas perkebunan terutama kelapa sawit tidak termasuk kontribusi dari pengolahan CPO.

Upaya yang dilakukan Dinas Perkebunan untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang yaitu dengan meningkatkan produksi komoditi perkebunan di tahun berikutnya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

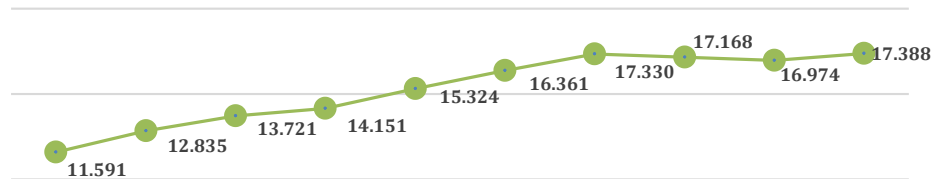
1. Intensifikasi kelapa sawit seluas 150 Ha;
2. Intensifikasi karet seluas 150 Ha;
3. Intensifikasi kelapa seluas 20 Ha;
4. Intensifikasi kakao seluas 150 Ha;
5. Peremajaan kakao seluas 50 Ha;
6. Intensifikasi lada seluas 150 ha;
7. Rehabilitasi lada seluas 50 Ha;
8. Perluasan kelapa sawit seluas 70 Ha;
9. Perluasan lada seluas 100 Ha;
10. Perluasan kelapa seluas 50 Ha;
11. Perluasan kakao seluas 150 Ha;
12. Perluasan karet seluas 150 Ha;
13. Perluasan pala seluas 100 Ha; dan
14. Perluasan aren seluas 100 Ha.

Selain itu juga melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan petani terhadap teknik budidaya dan penanganan hama/penyakit.

Berikut perkembangan nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan tahun 2013-2022.



Nilai Produk Lapangan Usaha Sub Sektor Perkebunan
Tahun 2013-2022



2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021** 2022***

*Data sementara (Sumber:BPS Provinsi Kalimantan Timur)

** Data angka sangat sementara (Sumber:BPS Provinsi Kalimantan Timur)

*** Data angka sangat-sangat sementara triwulan IV tahun 2022 (Sumber:BPS Provinsi Kalimantan Timur)

Gambar 3.1. Nilai PDRB Sub Sektor Perkebunan Tahun 2013-2022

Sasaran kedua: meningkatnya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan mencapai 137,93% yakni sebanyak 80 Perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dengan luas 641.781 Ha atau 27,15% dari total IUP tahun 2022 seluas 2.364.017 Ha. Sistem sertifikasi ISPO merupakan instrumen untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan nasional di Indonesia. ISPO sebagai suatu kebijakan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen pemerintah untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini di dukung oleh adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.140/3/2011 tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) serta telah diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan pasal 86 ayat 4



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

“Perusahaan Perkebunan kelas I, kelas II, atau kelas III yang terintegrasi dengan pengolahan wajib mengajukan permohonan sertifikasi ISPO”. Sertifikasi ISPO bersifat wajib dan menjadi prasyarat mutlak ekspor CPO ke luar negeri. Perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO tersebut antara lain:

Tabel 3.5. Perusahaan yang Mendapat Sertifikat ISPO Tahun 2022

No.	Perusahaan Perkebunan	Lokasi	Unit Sertifikasi	Lembaga Sertifikasi ISPO
A.	Kabupaten Berau			
1	PT. Tanjung Buyu Perkasa Plantation	Desa Cepuak, Desa Biatan Lempake, Desa Tembudan, Kec. Talisayan & Kec. Biatan, Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur	PKS TBP dan Kebun Taliyan 1,2 dan Biatan Estate	PT TUV Rheniland
2	PT. Malindomas Perkebunan	Desa Gunung Sari, Kec. Segah, Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur	Kebun Sungai Melamah dan Kebun Sungai Atap	PT Mutuagung Lestari
3	PT. Jabontara Eka Karsa	Desa Sungai Raya, Kec. Batu Putih, Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur	PKS Jabon, Kebun Sungai Raya dan Kebun Sungai Jantui	PT Mutuagung Lestari
4	PT. Dwiwira Lestari Jaya	Desa Biatan Lempake, Kec. Biatan, Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur	Kebun DLJ	PT Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan
5	PT. Anugerah Agung Prima Abadi	Kampung Merapun, Kec. Kelay, Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur	Kebun PT. Anugerah Agung Prima Abadi	PT Sucofindo
6	PT. Natura Pasific Nusantara	Desa Longayan, Punan Malinau, Tepian Buah Kab Berau, Prov. Kalimantan Timur	Kebun PT. Natura Pasifik Nusantara	PT Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan
7	PT Hutan Hijau Mas	Kecamatan Gunung Tabur, Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur	PKS Berau 1 dan Kebun Sungai Segah dan Kebun Sungai Pura	PT Mutuagung Lestari
8	PT Gunta Samba Jaya	Desa Merapun, Kecamatan Kelay, Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur	PKS Merapun, Merapun dan Mayong Estate.	PT Mutuagung Lestari



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Perusahaan Perkebunan	Lokasi	Unit Sertifikasi	Lembaga Sertifikasi ISPO
9	PT Satu Sembilan Delapan	Desa Tasuk, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau. Prov. Kalimantan Timur	PKS dan Kebun 198	PT Mutuagung Lestari
10	PT Yudha Wahana Abadi	Desa Merapun, Kecamatan Kelay, Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur	PKS Merapun, kebun Merapun dan kebun Mayong.	PT Sucofindo
11	PT. Sentosa Kalimantan Jaya	Desa Merapun, Kecamatan Kelay, Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur	Derawan Oil Mill, Mutiara Estate	PT. BSI Grup Indonesia
12	PT. Berau Sawit Seahtera		PKS Sungai Letak, Sungai Letak 1, dan 2 Estate	PT Mutuagung Lestari
13	PT. Inti Energi Kaltim		Ampen Medang Estate	PT TUV Rheniland
B. Kabupaten Kutai Kartanegara				
14	PT. Jaya Mandiri Sukses	Desa Prian Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur.	PKS Bangkirai, Kebun Bangkirai, Kebun Kulim, Kebun Angsana, Kebun Jatimas, dan Kebun Gaharu	PT Mutuagung Lestari
15	PT. Rea Kaltim Plantation	Desa Long Beleh, Desa Mual, Desa Perdana Pulo Pinang, Kec. Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	Kebun dan PKS Cakra dan PKS Perdana	PT SGS Indonesia
16	PT. Prima Mitrajaya Mandiri	Desa Benua pohon Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	Kebun: Beringin Jaya, Lembuswana, Bumi Permai dan Prima Estate dan Pabrik Bumi Permai Palm Oil Mill	PT Mutuagung Lestari
17	PT. Sawit Kaltim Lestari	Desa Sabintulung dan Desa Muara Kaman Ulu, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	Kebun dan PKS Sawit Kaltim Lesta	PT SAI Global
18	PT Sasana Yudha Bhakti	PT. Sasana Yudha Bhakti (PKS Satria dan Kebun Satria, Tepian) berlokasi di Desa Buluq Sen, Gunung sari, Ritan Baru dan tukang Ritan Kecamatan Tabang	PKS Satria dan Kebun Satria, Tepian	PT SGS Indonesia



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Perusahaan Perkebunan	Lokasi	Unit Sertifikasi	Lembaga Sertifikasi ISPO
		Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur		
19	PT. Tritunggal Sentra Buana	Desa Saliki, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	PKS Salo Bandang dan Kebun Kutai utara, Kutai Selatan	PT Mutuagung Lestari
20	PT. Suryabumi Tunggal Perkasa	Desa Perian dan Muara Aloh, Kec. Muara Muntai, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	Cendana Estate	PT Mutuagung Lestari
21	PT. Manunggal Adi Jaya	Desa Kahala, Tuana Tuha, Teluk Bingkai, Lamin Pulut, Lamin dan Telihan Kec. Kenohan, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	Kebun Muara, Karang Agung, Hulu Merang, Mangsang dan PKS Muara Merang	PT Mutuagung Lestari
22	PT. Maju Kalimantan Hadapan (Ex. PT. Khaleda Agropima Malindo)	Desa Puan Cepak dan Desa Sedulang, Kecamatan Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	Estate Maju Central, Estate Maju Selatan, Estate Maju Utara & PT MKH Palm Oil Mill	PT SGS Indonesia
23	PT. Hamparan Sentosa	Desa Puan Cepak dan Desa Sedulang, Kecamatan Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	Estate Maou, Estate Feliza, Estate Bendang	PT Mutuagung Lestari
24	PT. Sawit Prima Sakti		Kebun Desa Sedulang Kec. Muara Kaman	PT. Global Inspeksi Sertiikasi
C.	Kabupaten Kutai Barat			
25	PT PP London Sumatera Indonesia	Desa Tanjung Isuy, Kec. Jempang & Bongan, Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur.	PKS Pahu Makmur, Kebun Pahu Makmur Estate, Isuy Makmur Estate, Kedang Makmur Estate	PT Mutuagung Lestari
26	PT. Farinda Bersaudara		Kebun Jambuk Estate, IPenawai Estate, Siram Estate PKS Farinda Bersaudara	PT Mutuagung Lestari



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Perusahaan Perkebunan	Lokasi	Unit Sertifikasi	Lembaga Sertifikasi ISPO
27	PT. Kruing Lestari Jaya		Kebun Sungai Basung, Sungai Perak, Sungai Pilos, Sungai Pikan Pabrik Sungai Perak	Bureau Veritas Certification
28	PT. Ketapang Agro Lestari		Kebun Siluq Ngurai Pabrik Siluq Ngurai	PT. BSI Grup Indonesia
29	PT. Citra Agung Kencana		PMKS Citra Agung Kencana Kebun Citra Agung Kencana	PT. BSI Grup Indonesia
30	PT. Rimba Rayatama Jaya		Kebun Sungai Pahu Estate	Bureau Veritas Certification
31	PT. Harapan Rimba Raya		PKS Sungai Kedang Mill, Kebun Kedang Pahu Estate, Sungai Kedang Estate, Sungai Tohan Estate	Bureau Veritas Certification
D.	Kabupaten Paser			
32	PT Borneo Indah Marjaya,	Desa Laburan, Kecamatan Paser Belengkong, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur	PKS BIM dan Kebun Rayon 1, Kebun Rayon 2	PT Mutu Hijau Utama
33	PT. Muaratoyu Subur Lestari	Desa Muaratoyu, Desa Bente Tualan, Desa Munggu, Kec. Longkali, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur	PKS MSL dan Kebun MSL	PT Sucofindo
34	PT Palma Plantasindo	Desa Sungai Batu, Kec. Pasir Belengkong, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur	Kebun Palma Plantasindo	PT AJA Sertifikasi Indonesia
35	PT. Agro inti Kencana	Desa Riwang, Kec. Batu Engau, Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur	Kebun dan Pabrik PT. Agro Inti Kencana	PT SAI Global Indonesia
36	PT Pucuk Jaya	Desa Kerang Kec Batu Engau, Kab. Paser	Kebun Kerang, Maringan, Petangis dan PKS Kerang	PT Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan
37	PT. Gawi Makmur Kalimantan		Kebun GMK Kaltim dan PKS GMK Kaltim	PT TUV Rheniland



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Perusahaan Perkebunan	Lokasi	Unit Sertifikasi	Lembaga Sertifikasi ISPO
38	PT. Pradiksi Gunatama		Kebun Ma. Apar, Ma. Benongan, Ma. Langgai, Ma. Petangis, Kerang dan PKS PG langgai	Bureau Veritas Certification
39	PT. Multi Jayantara Abadi		Kebun dan Pabrik Tanjung Harapan	PT TUV Rheinland Indonesia
40	PT. Anugerah Abadi Multi Usaha		PT. Anugerah Abadi Multi Usaha	PT. Mutu Hijau Indonesia
E.	Kabupaten Penajam Paser Utara			
41	PT Waru Kaltim Plantation	Desa Waru, Kecamatan Waru, Kab. Penajam Paser Utara, Prov. Kalimantan Timur, Indonesia	Kebun Rayon 1,2 dan PKS Waru K	PT BSI Group Indonesia
42	PT Sukses Tani Nusasubur	Desa Labangka, Kec: Babulu Kab. Penajam Paser Utara Prov. Kalimantan Timur	Kebun Rayon 1 dan 2 dan PKS PT	PT BSI Group Indonesia
E.	Kabupaten Kutai Timur			
43	PT Dharma Satya Nusantara, Tbk. PKS 2	Desa Dabeq, Kecamatan Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	PKS 2 – PT DSN, Kebun Puhus 1, Kebun Puhus 2 dan Kebun Puhus 3	PT TUV Rheinland Indonesia
44	PT Dharma Satya Nusantara, Tbk. PKS 3	Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	PKS PT Dharma Satya Nusantara PKS 3; Kebun Long Kejiak 1, Kebun Long Kejiak 2, dan Kebun Long Kejiak 3, Kebun Melenyu 1, Kebun Melenyu 2, Kebun Melenyu 3 dan Kebun Melenyu 4	PT TUV Rheinland Indonesia
45	PT Swakarsa Sinarsentosa	Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	Kebun JB1, JB2, LJ1, LJ2 dan	PT TUV Rheinland Indonesia
46	PT Sumber Kharisma Persada.	Desa Peridan, Kecamatan Sangkulirang, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	PKS PT SKP, Kebun Rayon 1 dan Kebun Rayon 2	PT TUV Rheinland Indonesia



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Perusahaan Perkebunan	Lokasi	Unit Sertifikasi	Lembaga Sertifikasi ISPO
47	PT.Bima Palma Nugraha	Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kab. Kutai Timur, Prov.Kalimantan Timur	PKS Tepian Langsung dan Kebun Tepian Langsung, Kebun Danau Padang, Kebun Sungai Mangkupa 1, Kebun Sungai Mangkupa 2	PT SAI Global Indonesia
48	PT Gunta Samba	Desa Pengadan, Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	PKS Ampanas, Ampanas dan Pengadan Estate.	PT Mutuagung Lestari
49	PT. Etam Bersama Lestari	Desa Pelawan, Kec. Sangkulirang, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	PKS Etam Bersama Lestari dan Kebun Etam Bersama Lestari	PT Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan
50	PT. Karyanusa Ekadaya	Desa Marah Haloq, Kecamatan Wahau, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	PKS PT KED, Kebun Rayon 2, Kebun Rayon 3 dan Kebun Rayon 4	PT TUV Rheniland
51	PT. Tapian Nadenggan	Desa Jak Luay, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	PKS Jak Luay dan kebun Jak Luay, Long Buluh, Pantun Mas	PT BSI Group Indonesia
52	PT Kresna Duta Agroindo	Desa Sukamaju, Kecamatan Kongbeng Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	Muara Wahau Mill dan Gunung Kombeng Mill, dengan kebun pemasok Muara Wahau Estate dan Gunung Kombeng Estate	PT Mutuagung Lestari
53	PT. Sinergi Agro Industri	Desa Susuk Dalam, Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	Kebun pertama Balidan dan Manumbar	PT Mutuagung Lestari
54	PT. Dharma Satya Nusantara Tbk (PKS 6)	Desa Muara Wahau, Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	PKS 6	PT Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan
55	PT. Fairco Agro Mandiri	Desa Bumi Jaya dan Desa Kaliorang, Kec. Kaubun dan Kaliorang Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur	PKS Kaubaun dan Kebun Kaubun, Kaliorang,	PT AJA Sertifikasi Indonesia
56	PT. Cipta Narada Lestari	Desa Mandu Dalam, kec. Sangkulirang, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	(Kebun Mandu Dalam),	PT Bureau Veritas
57	PT. Hampan Perkasa Mandiri	Desa Long Pejeng Kec. Busang Kab. Kutim Prov. Kaltim	Kebun PT. HPM	PT Mutu Indonesia Strategis



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Perusahaan Perkebunan	Lokasi	Unit Sertifikasi	Lembaga Sertifikasi ISPO
				Berkelanjutan
58	PT. Wira Inova Nusantara	Desa Susuk Dalam dan Desa Susuk Luar, Kec. Sandaran dan Kec. Sangkulirang, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	Kebun Susuk, Sungai Petard an PK	PT TUV Rheinland Indonesia
59	PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk (PKS 4)	Desa Muara Wahau, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	PKS-4 PKS DSN 4	PT Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan
60	PT Anugerah Energitama	Desa Tepian Langsung, Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur	Kebun TLSE 1,2,3 dan PKS TLSE	PT Agri Mandiri Lestari
61	PT. Kemilau Indah Nusantara	Desa Muara Bengalon, Desa Sekerat, Desa Sepaso Timur, Kec. Bengalon, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	PKS Sungai Bengalon	PT AJA Sertifikasi Indonesia
62	PT Bima Agri Sawit	Desa Baay, Kec. Karangan, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	Kebun Baay, Kebun Muara Bulan dan PKS Muara Bulan	PT AJA Sertifikasi Indonesia
63	PT. Gunta Samba Jaya	Desa Miau Baru, Kec. Long Beng, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	Kebun Miau Baru PT. Gunta Samba	PT TUV Rheinland Indonesia
64	PT. Subur Abadi Wana Agung	Desa Long Nyelong, Long Lees, dan Long Pejeng, Kecamatan Busang, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	Kebun PT. SAWA	PT Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan
65	PT Hanusentra Agro Lestari	Desa Pelawan, Kec. Sangkulirang, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	Kebun PT Hanusentra Agro Lestari	PT Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan
66	PT. Telen Prima Sawit	Desa Batu Balai, Mauara Bengkal Ulu, Telaga, Sumber Agung, Benua Baru, Senembah, Kec. Muara Bengkal Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	Kebun Muara Bengkal, Benua Baru dan PKS Teladan Prima Sawit	PT TUV Rheinland Indonesia
67	PT. Bumi Mas Agro	Desa Marukangan, Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	Estate A, Estate B, dan Estate C	PT Mutuagung Lestari
68	PT Multi Pacific International	Sangkulirang, Kab Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur		
69	PT Kutai Balian Nauli	Bengalon, Kab Kutai Timur, Prov. Kalimantan	Kebun Kutai, Balian dan PKS	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

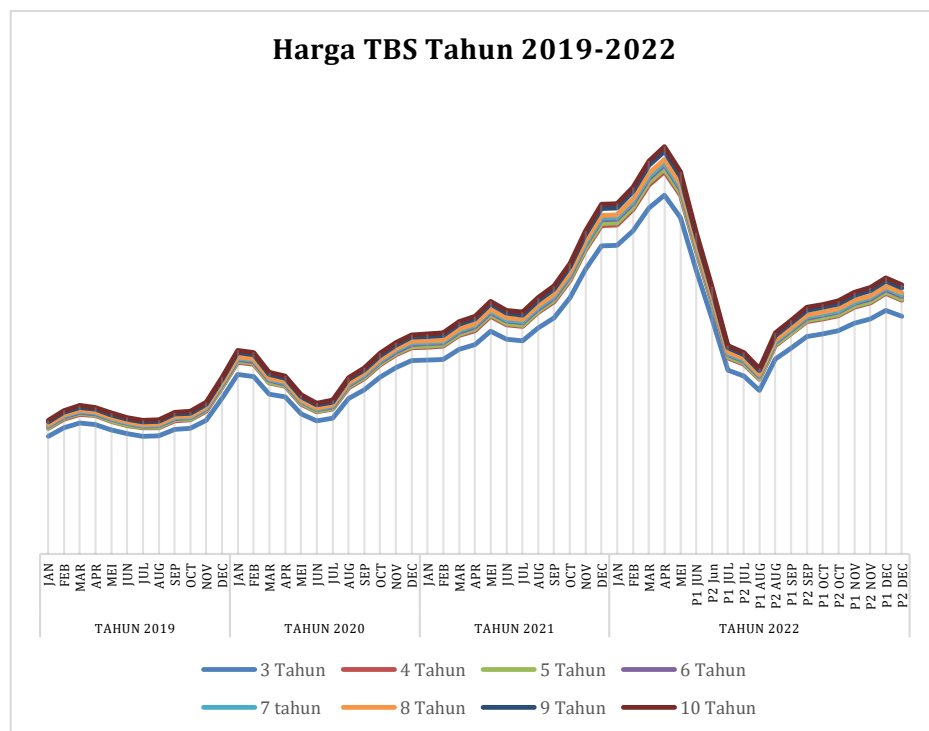
No.	Perusahaan Perkebunan	Lokasi	Unit Sertifikasi	Lembaga Sertifikasi ISPO
		Timur		
70	PT. Palma Plantasindo		Kebun PT. PP	PT AJA Sertifikasi Indonesia
71	PT. Gunta Samba		Kebun Elang	PT TUV Rheinland Indonesia
72	PT. Indonesia Plantation Synergy		Kebun : IPS, PKS IPS Mill	PT Mutuagung Lestari
73	PT. Sawit Prima Nusantara		Kebun Mata Air Estate	PT TUV Rheinland Indonesia
74	PT. Nala Palma Cadudasa		Kebun Bendang Baru Estate, Gemburi Estate, Bengkal Estate. PKS NPC	PT Sucofindo
75	PT. Telen		Kebun Pangadaan Baay Estate, Sei Karangan Estate, Bukit Permata Estate, Layang-layang Estate. PKS. Pangadaan Baay Mill dan Bukit Permata Mill	PT TUV Rheinland Indonesia
76	Koperasi Prima Pantun	Desa Jegluay kec. Muara Wahau, Kab Kalimantan Timur.	Perkebunan Koperasi Prima Pantun	PT Mutuagung Lestari
77	Koperasi Jasa Mutiara Kongbeng		Desa Makmur Jaya, Kec. Kongbeng	PT. BSI Grup Indonesia
78	Koperasi Serba Usaha Makarti		Desa Sidomulyo Kecamatan Kongbeng	PT. BSI Grup Indonesia
79	Koperasi Serba Usaha Pantun Sejahtera		Desa Sri Pantun, Kecamatan Kongbeng	PT. BSI Grup Indonesia
80	Koperasi Marga Indah		Desa Marga Mulya Kecamatan Kongbeng	PT. BSI Grup Indonesia

- b. Sasaran ketiga: meningkatnya kesejahteraan pekebun dengan rata-rata NTP tahun 2022 sebesar 162,66 atau mencapai 147,87%. Sasaran ketiga merupakan sasaran dengan capaian paling tinggi. Keberhasilan capaian ini didorong oleh membaiknya harga Tandan Buah Segar

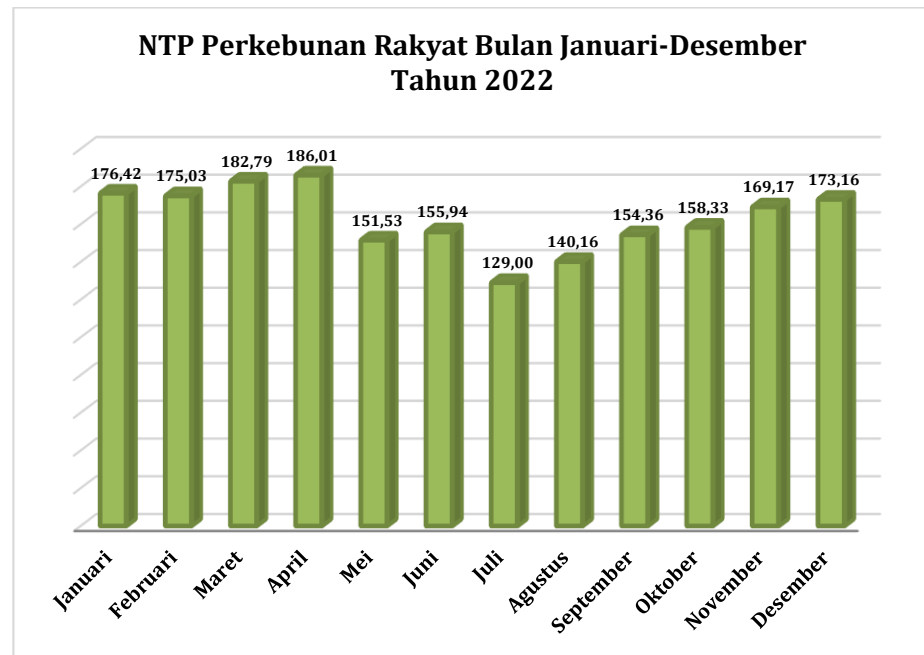


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

(TBS) selama tahun 2021 hingga 2022. NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/ daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produksi pertanian dengan barang jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/ daya beli petani. Berikut perkembangan harga TBS berdasarkan umur tanaman dan nilai NTP Tanaman Perkebunan Rakyat dari Januari sampai dengan Desember 2022:



Gambar 3.2. Perkembangan Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra berdasarkan Umur Tanaman dari tahun 2019 hingga Desember 2022

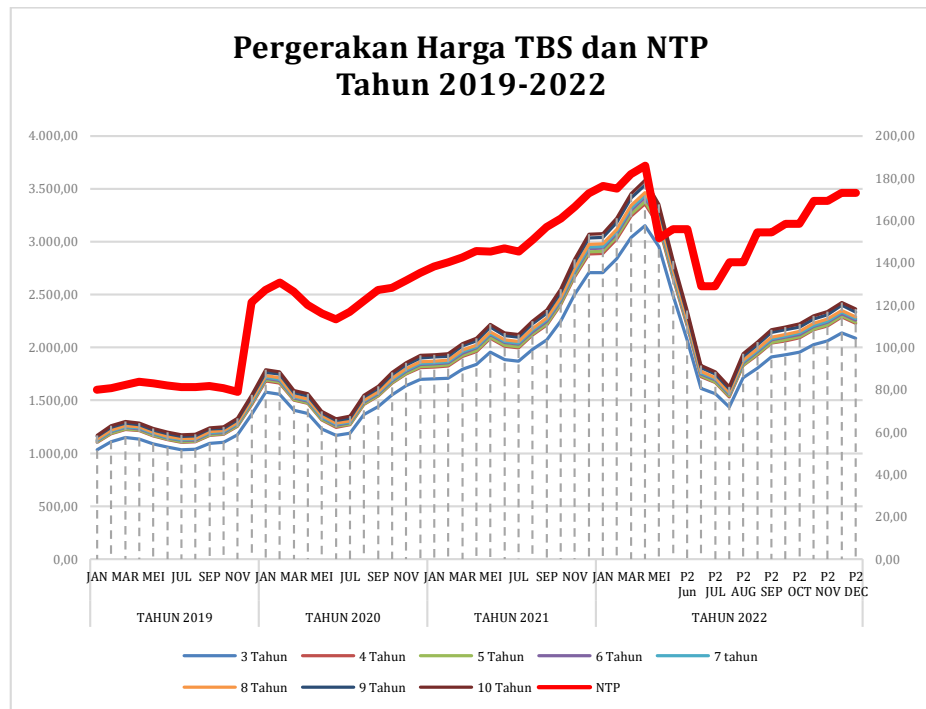


Gambar 3.3. NTP Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2022

Berdasarkan 2 (Dua) grafik di atas terlihat bahwa harga TBS kelapa sawit selama tahun 2021 hingga 2022 terus membaik walaupun sempat mengalami gejolak pada pertengahan tahun 2022 yaitu pada bulan Juli periode II mencapai Rp. 1.769,76 dan bulan Agustus periode II mencapai Rp. 1.628,21. Dimana harga tertinggi selama tahun 2022 pada bulan April yaitu mencapai Rp. 3.577,69. Dan NTP terendah terjadi pada bulan Juli mencapai 129% dan Agustus mencapai 140,16% serta NTP tertinggi terjadi pada bulan April mencapai 186,01%. Dari hal tersebut terlihat bahwa pergerakan NTP perkebunan rakyat berbanding lurus dengan pergerakan harga TBS. Perbandingan pergerakan harga TBS dan NTP selama tahun 2019-2022 terlihat pada grafik berikut:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022



Gambar 3.4. Pergerakan Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra dan NTP Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2019-2022

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dan n-1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2021
			2021	2022	
1	2	3	4	5	6 (5-4/4*100%)
1	Nilai PDRB sub sektor perkebunan (atas dasar angka konstan)	Miliar Rupiah	16.952*	17.388**)	2,44
2	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>)	Perusahaan	62	80	29,03
3	NTP perkebunan rakyat	Persentase	151,04	162,66	7,69

*) Data BPS (Angka Sangat Sementara Tahun 2021)

**) Data BPS (Angka Sangat-Sangat Sementara Triwulan IV Tahun 2022)



Berdasarkan tabel perbandingan antara realisasi tahun 2022 dengan n-1, perbandingan realisasi sasaran indikator nilai PDRB sub sektor perkebunan tahun 2022 (angka sangat-sangat sementara triwulan IV Tahun 2022) dan 2021 mengalami kenaikan sebesar 414 miliar rupiah (2,44%). Faktor pendorong kenaikan nilai PDRB sub sektor perkebunan antara lain:

1. Kenaikan harga TBS kelapa sawit selama tahun 2021 hingga 2022 meskipun mengalami gejolak pada pertengahan tahun 2022 yaitu pada bulan Juli periode II dan bulan Agustus periode II;
2. Pencabutan larangan ekspor CPO sejak 23 Mei 2022 (Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 tahun 2022 tentang larangan Sementara Ekspor CPO dan Turunannya); dan
3. Pada tahun 2022 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan kegiatan peningkatan nilai tambah dan peningkatan pengetahuan serta keterampilan petani terhadap teknik budidaya melalui program penyuluhan pertanian. Selain itu juga penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) melalui program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.

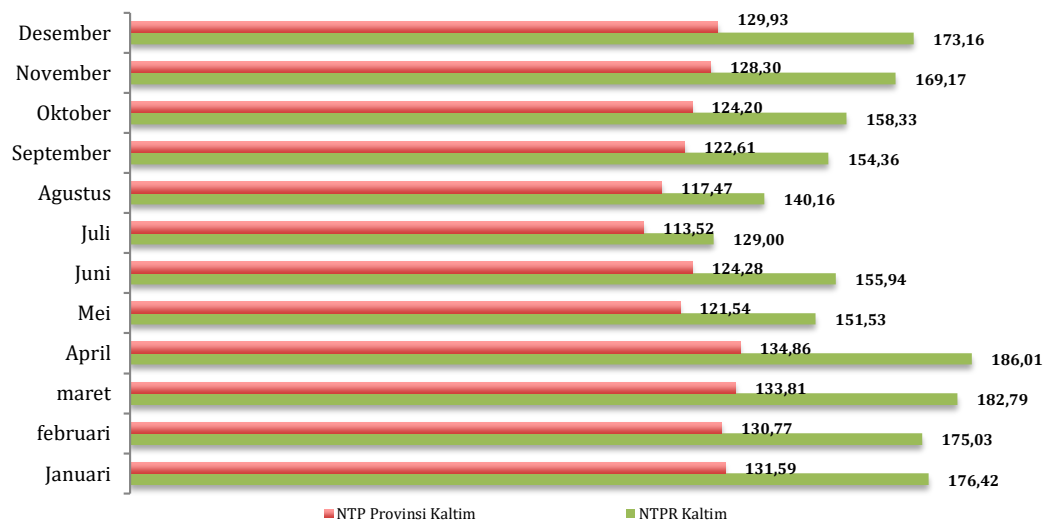
Selain itu perbandingan realisasi jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) tahun 2022 dan 2021 juga mengalami peningkatan yaitu dari 62 perusahaan menjadi 80 perusahaan atau meningkat 29,03%. Artinya pada tahun 2022 sebanyak 26,40% perusahaan di Kalimantan Timur telah mendapatkan sertifikat ISPO dari total 303 perusahaan. Capaian tersebut didukung oleh perusahaan yang telah mengusahakan untuk mendapatkan sertifikat ISPO dan perusahaan yang mengusahakan perpanjangan sertifikat ISPOnya. Ini merupakan upaya menjadikan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan daya saing produk kelapa sawit industri untuk pasar internasional.

Dan perbandingan realisasi indikator NTP perkebunan rakyat tahun 2022 dan 2021 juga mengalami peningkatan dari rata-rata 151,04 pada tahun 2021



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) *Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022*

menjadi 162,66% pada tahun 2022 atau naik sebesar 7,69%. Rata-rata NTP perkebunan rakyat bahkan melebihi rata-rata capaian Pada NTP Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 126,07% atau 29,02% lebih tinggi. Perbandingan nilai NTP Provinsi Kalimantan Timur dan NTP perkebunan rakyat Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 terlihat pada grafik berikut:

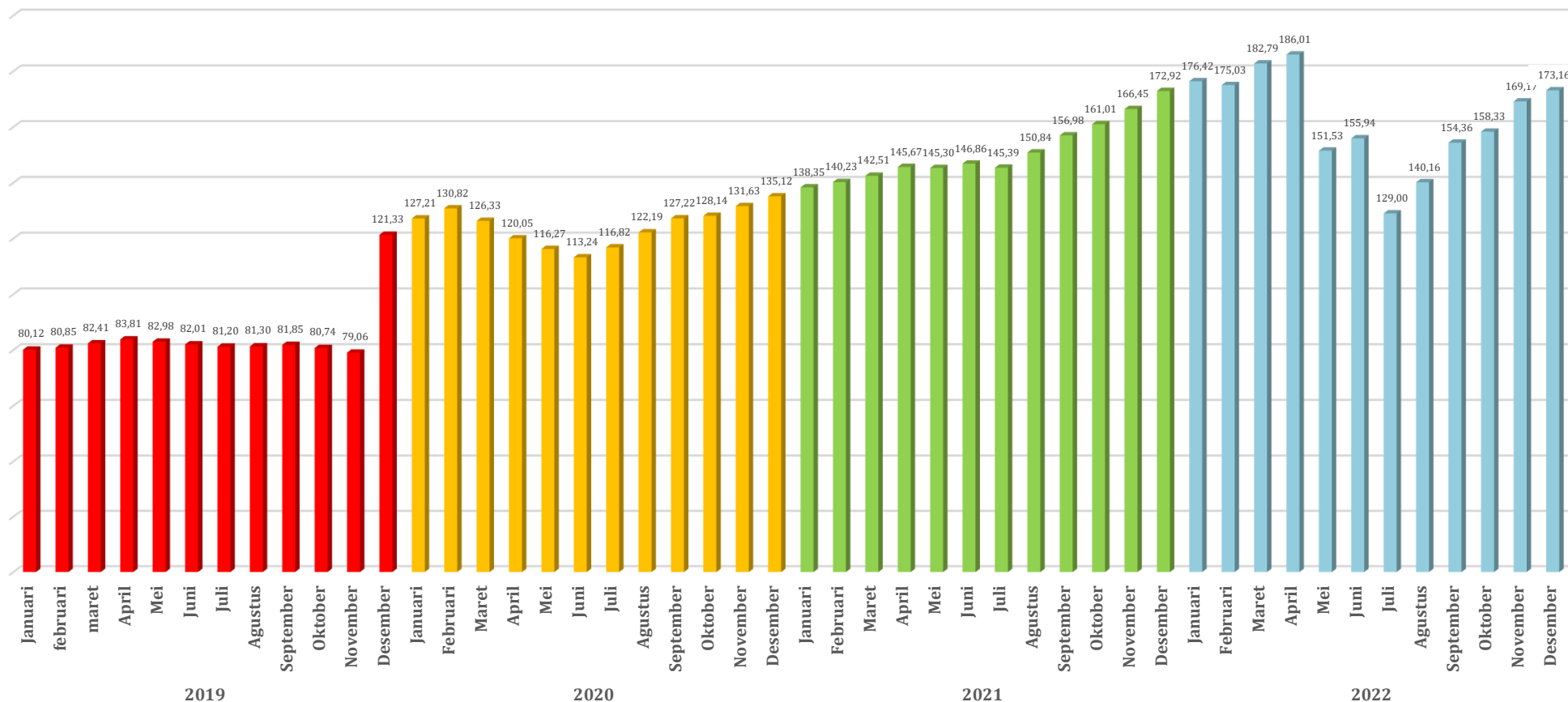


Gambar 3.5. Perbandingan NTP Provinsi Kalimantan Timur dan NTP Tanaman Perkebunan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Sedangkan perkembangan NTP tanaman perkebunan rakyat dari tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:



NTP Perkebunan Rakyat Bulan Januari-Desember
Tahun 2019-2022



Gambar 3.6. Perkembangan NTP Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2019-2022



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Berikut perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir Renstra.

Tabel 3.7. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Traget Akhir Renstra	Realisasi 2022	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6
1	Nilai PDRB sub sektor perkebunan (atas dasar angka konstan)	Miliar Rupiah	21.997	17.388*)	79,05
2	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>)	Perusahaan	63	80	126,98
3	NTP perkebunan rakyat	Persentase	112	162,66	145,23

*) Data BPS (Angka Sangat-Sangat Sementara Triwulan IV Tahun 2021)

Tahun 2022 merupakan tahun keempat Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Dari 3 (tiga) sasaran strategis yang telah ditetapkan, rata-rata capaian sasaran strategis sudah mencapai 117,09%. Diestimasikan capaian ketiga sasaran di atas akan tercapai pada pelaksanaan tahun kelima Renstra. Berikut perbandingan realisasi kinerja Dinas dengan realisasi nasional tahun 2022:

Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas dengan Realisasi Nasional Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Nilai PDRB sub sektor perkebunan (atas dasar angka	Miliar Rupiah	17.388*)	390.400 *)	4,45



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

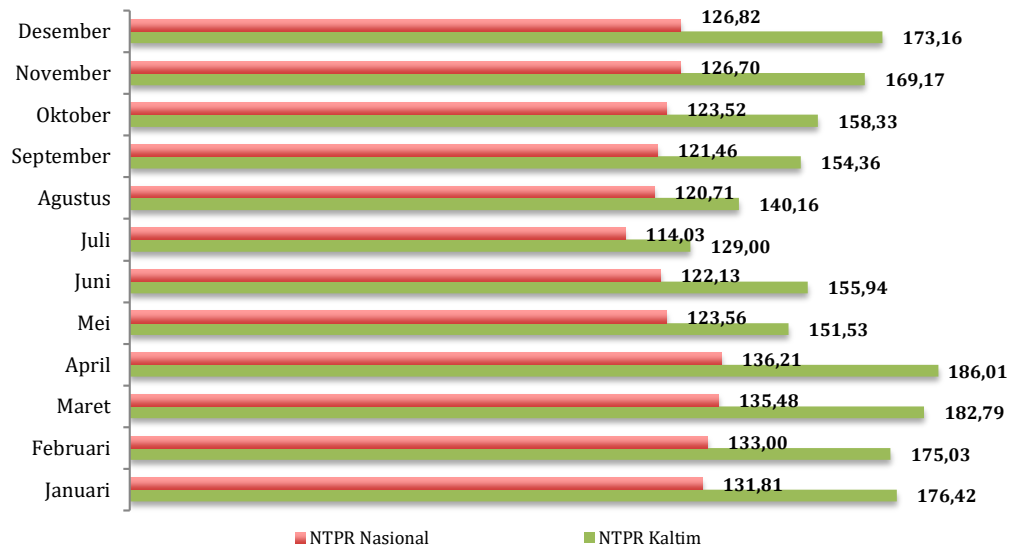
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5	6
	konstan)				
2	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>)	Perusahaan	80	755	10,60
3	NTP perkebunan rakyat	Persentase	162,66	126,29	128,80

*) Data BPS (Angka Sangat-Sangat Sementara Triwulan IV Tahun 2022)

Dari tabel 3.8, diketahui bahwa capaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memberikan kontribusi terhadap capaian nasional. Pada sasaran meningkatnya PDRB sub sektor perkebunan sampai dengan triwulan IV tahun 2022 telah memberikan kontribusi sebesar 4,45% pada Produk Domestik Bruto menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan pada sektor pertanian. Sedangkan pada sasaran terselenggaranya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan, jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat ISPO sejumlah 80 atau 10,60% dari 755 perusahaan kelapa sawit se Indonesia yang sudah didapatkan sertifikat ISPO. Dan untuk sasaran meningkatnya kesejahteraan pekebun rata-rata NTP perkebunan rakyat dari bulan Januari sampai dengan Desember tercapai 162,66% atau sebesar 128,80% jika dibandingkan dengan capaian rata-rata NTP perkebunan rakyat nasional yaitu 128,80%, seperti terlihat pada gambar berikut:



NTP Perkebunan Rakyat Tahun 2022



Gambar 3.7. Perbandingan NTP Perkebunan Rakyat Nasional dan NTP Perkebunan Rakyat di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dari analisis berdasarkan tabel-tabel di atas, capaian rata-rata sasaran strategis melebihi target. Faktor-faktor penyebab keberhasilan kinerja yang telah dilakukan sebagaimana penjabaran berikut :

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya PDRB sub sektor perkebunan” dalam pencapaian target indikatornya didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian, meliputi kegiatan:
 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, dengan sub kegiatan:
 - Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian.
 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman, dengan sub kegiatan:
 - Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih; dan



- Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program ini antara lain:

1. Terlambatnya proses penetapan petani penerima bantuan dari Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota sehingga berpengaruh pada waktu pemupukan tanaman, kondisi ini akan mempengaruhi produktifitas kebun yang menerima bantuan;
2. Perubahan harga pasar untuk pupuk NPK dan Herbisida yang fluktuatif sehingga sangat mempengaruhi harga pasar yang ada, kenaikan harga pasar menyebabkan calon penyedia berfikir keras untuk mengikuti proses pengadaan, yang pada akhirnya juga ikut berperan menunda proses pengadaan yang sudah terjadwal;
3. Usulan kegiatan Hibah tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, karena kelompok tani kelompok tani Sipatokong Sipatuo tidak sanggup melakukan pengelolaan dana tersebut maka sesuai dengan musyawarah kelompok maka kelompok tani menyatakan mundur. Untuk pengusul Gapoktan Karya Bersama dan Kelompok Tani Sumber Makamur tidak dapat dilaksanakan bantuan yang diminta bukan merupakan komoditi perkebunan;
4. Kegiatan Pokir di Kabupaten Kutai Barat dimana kel. tani belum terdaftar di Simluhtan, lahan anggota kelompok yang masuk dalam HGU perusahaan, lahan yang telah ditambang, lahan yang bukan komoditi perkebunan, dan anggota kelompok yang tidak mau menyerahkan fotocopy KTP. Kondisi ini membuat luasan yang dapat dibantu menjadi berkurang;
5. Belum maksimalnya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perbenihan pada masyarakat pekebun; dan
6. Kurangnya koordinasi dari Pengawas Benih Tanaman daerah asal benih tanaman perkebunan luar wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang masuk kepada Pengawas Benih Tanaman dan PPNS



Provinsi Kalimantan Timur sehingga pengawasan terhadap dokumen maupun fisik benih tidak maksimal.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara lain:

1. Untuk mengurangi permasalahan yang ada diupayakan untuk melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota secara persuasif;
 2. Untuk kondisi harga bahan baku Pupuk NPK dan Pestisida yang fluktuatif, tidak ada upaya yang dapat dilakukan, karena hal ini menjadi hambatan secara nasional bahkan dunia;
 3. Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perbenihan yang dilaksanakan dengan cara pendekatan secara langsung ke lapangan; dan
 4. Melakukan koordinasi dengan Pengawas Benih Tanaman di luar wilayah Provinsi Kalimantan Timur, karantina wilayah kerja Balikpapan dan bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian untuk meningkatkan pengawasan peredaran benih.
- b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, meliputi kegiatan:
- Penataan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan:
 - Perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program ini antara lain:

1. Masih terdapat bantuan benih tanaman perkebunan yang belum di tanam dilahan pekebun/petani hal ini dikarenakan faktor iklim (hujan) yang menyulitkan pekebun untuk melakukan distribusi benih ke kebun sebab akses jalan tidak dapat dilalui kendaraan.
2. Adanya budaya atau kebiasaan pekebun di beberapa daerah setelah melakukan pembukaan lahan melakukan penanaman padi dan tanaman pangan lainnya sehingga benih yang sudah dibagikan masih di simpan di masing-masing tempat pekebun.
3. Pembukaan lahan kebun yang relatif lambat sehingga realisasi penanaman belum sepenuhnya selesai, hal ini disebabkan



sebagian besar kelompok tani melakukan secara bergotong royong sehingga harus menunggu giliran dalam pembukaan lahan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi ditahun berjalan dan tahun berikutnya;
2. Memberikan informasi melalui sosialisasi terkait teknis budidaya komoditas yang diberikan; dan
3. Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi teknis dengan petugas lapangan guna percepatan pelaksanaan penanaman dilapangan.

c) Program Penyuluhan Pertanian, meliputi kegiatan:

- Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, dengan sub kegiatan:
 - Pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN.
- Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian, dengan sub kegiatan:
 - Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani.
- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan, dengan sub kegiatan:
 - Pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani; dan
 - Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program ini antara lain:

1. Masih kurangnya pembinaan, pengawalan dan pendampingan serta penguatan kelompok tani;
2. Masih rendahnya pemahaman petani akan konsep *corporate farming*; dan
3. Masih kurangnya sinergi antar stakeholder terkait dalam perwujudan korporasi petani berbadan hukum.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara lain:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

1. Melakukan pengawalan, pembinaan dan pendampingan serta penguatan kelembagaan;
2. Melakukan diseminasi informasi akan konsep corporate farming kepada petani/ poktan/ gapoktan;
3. Melakukan bimtek/ pelatihan serta pendampingan dan pembinaan terkait pasca panen yang baik dan diversifikasi produk turunan perkebunan; dan
4. Memperkuat kordinasi, sinergitas, dan kolaborasi dengan stakeholder terkait guna pencapaian korporasi petani.

Program-program tersebut di atas mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 23.654.619.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.823.118.303,- atau 79,57%. Realisasi tersebut tidak mencapai 100% dikarenakan oleh SILPA positif terutama SILPA dari pengadaan barang yang diserahkan kepada masyarakat. Secara keseluruhan program telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023.

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah nilai PDRB sub sektor perkebunan (atas dasar angka konstan). Sasaran ini terealisasi mencapai 17.388 Miliar Rupiah dari target 20.493 Miliar Rupiah (84,85%) (Berdasarkan angka sangat-sangat sementara triwulan IV tahun 2022) atau meningkat 2,44% dari capaian tahun 2021.

Faktor pendorong peningkatan nilai PDRB sub sektor perkebunan tersebut antara lain:

1. Kenaikan harga TBS kelapa sawit selama tahun 2021 hingga 2022 meskipun mengalami gejolak pada pertengahan tahun 2022 yaitu pada bulan Juli periode II dan bulan Agustus periode II;
2. Pencabutan larangan ekspor CPO sejak 23 Mei 2022 (Pencabutan Permendag Nomor 22 tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor CPO dan Turunannya); dan
3. Pada tahun 2022 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan kegiatan peningkatan nilai tambah dan peningkatan pengetahuan serta keterampilan petani terhadap teknik budidaya



melalui program penyuluhan pertanian. Selain itu juga penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) melalui program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.

4. Melakukan upaya peningkatan produksi komoditi perkebunan di tahun medatang dengan melaksanakan:
 - a. Intensifikasi kelapa sawit seluas 150 Ha;
 - b. Intensifikasi karet seluas 150 Ha;
 - c. Intensifikasi kelapa seluas 20 Ha;
 - d. Intensifikasi kakao seluas 150 Ha;
 - e. Peremajaan kakao seluas 50 Ha;
 - f. Intensifikasi lada seluas 150 ha,
 - g. Rehabilitasi lada seluas 50 Ha,
 - h. Perluasan kelapa sawit seluas 70 Ha,
 - i. Perluasan lada seluas 100 Ha,
 - j. Perluasan kelapa seluas 50 Ha,
 - k. Perluasan kakao seluas 150 Ha,
 - l. Perluasan karet seluas 150 Ha,
 - m. Perluasan pala seluas 100 Ha, dan
 - n. Perluasan aren seluas 100 Ha.

Sedangkan faktor penghambat belum tercapainya nilai PDRB sesuai target yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Penurunan produksi terutama produksi kelapa sawit pada tahun 2022;
 2. Adanya kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada produksi kebun ditingkat petani (pelarangan ekspor CPO);
 3. Masih adanya tanaman yang belum menghasilkan ataupun tua/rusak;
 4. Kelangkaan pupuk; dan
 5. Kenaikan harga pupuk.
-
2. Sasaran Strategis "Meningkatnya Usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan" dalam pencapaian target indikatornya didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut:



a) Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, meliputi kegiatan:

- Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi, dengan sub kegiatan:
 - Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) Pertanian, Hortikultura, dan perkebunan;
 - Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
 - Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program ini antara lain:

1. Masih kurangnya perhatian pelaku usaha/ perusahaan perkebunan dalam menyampaikan informasi pengelolaan area dengan nilai konservasi tinggi karena belum lengkapnya ketersediaan data yang di miliki perusahaan baik berupa data luasan area dengan nilai konservasi tinggi maupun data spasial/ file shp*GIS; dan
2. Penghitungan Taksasi yang berbeda disetiap komoditi sehingga mengakibatkan untuk pencapaian program hanya memenuhi luasan saja namun tidak dengan nominal Rupiahnya.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara lain:

1. Melakukan koordinasi kepada Pelaku usaha/ perusahaan perkebunan agar dapat menyampaikan informasi pengelolaan area dengan nilai konservasi tinggi secara berkala ke instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Perkebunan Kabupaten dan Provinsi sehingga diketahui pengelolaan yang dilakukan oleh pelaku usaha; dan
2. Melakukan koordinasi dalam penyusunan Renstra periode selanjutnya agar target taksasi kerugian menjadi target Luasan Pengendalian sebagai target indikator Program.

b) Program perizinan Usaha Pertanian, meliputi kegiatan:



- Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan izin usaha pertanian.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program ini antara lain:

1. Kurangnya tenaga PUP yang bersertifikat di Kabupaten;
2. Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan PUP di Kabupaten; dan
3. Tidak siapnya perusahaan perkebunan untuk dilakukan PUP.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara lain:

1. Mengoptimalkan seluruh tenaga penilai usaha perkebunan yang bersertifikat di Kabupaten se Kalimantan Timur dalam melaksanakan PUP terhadap perusahaan perkebunan; dan
2. Melaksanakan pelatihan PUP bagi petugas dinas yang membidangi perkebunan.

Program-program tersebut di atas mendapat alokasi sebesar Rp. 2.670.577.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.625.308.385,- atau 98,30%. Realisasi tersebut tidak mencapai 100% dikarenakan oleh SILPA positif. Secara keseluruhan program telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023.

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dengan target 58 perusahaan. Realisasi pada sasaran strategis ini yaitu 80 perusahaan atau senilai 137,93% dari target dan meningkat sebesar 29,03% dari capaian tahun 2021.

Faktor pendorong peningkatan capaian jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) tersebut antara lain:

1. Adanya regulasi Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 tahun 2020 tentang tentang penyelenggaraan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) *Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022*

sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan untuk mendorong pelaku usaha melakukan sertifikasi ISPO.

2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan; [L] [SEP]
3. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 12 Tahun 2021 tentang Kriteria Area dengan Nilai Konservasi [L] [SEP] Tinggi; [L] [SEP]
4. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 43 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Area dengan Nilai [L] [SEP] Konservasi Tinggi; [L] [SEP]
5. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 19 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan [L] [SEP] Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2024 ; [L] [SEP]
6. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan [L] [SEP] Kelapa Sawit;
7. Program Rintisan Sertifikat Tanda Daftar Budidaya (STDB) bagi kebun sawit [L] [SEP] rakyat melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman [L] [SEP] Perizinan Usaha Perkebunan;
8. Pendanaan dari Program Forest Carbon Partnership Facilities-Carbon Fund [L] [SEP] (FCPF-CF) tahun 2023;
9. Pembiayaan sertifikasi ISPO melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan [L] [SEP] Kelapa Sawit (BPD PKS) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 15 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 7 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan;
10. Keputusan Direktorat Jenderal [L] [SEP] Perkebunan Nomor: 273/Kpts/KH.160/9/2020 tentang Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit; dan
11. Program dan pendanaan dari mitra kerja pembangunan. [L] [SEP]



Sedangkan faktor penghambat pencapaian target di atas antara lain:

1. Yang bisa melakukan teguran terkait pelaksanaan ISPO adalah pemberi ijin.
3. Sasaran Strategis “Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun” dalam pencapaian target indikatornya didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Program Penyuluhan Pertanian, meliputi kegiatan:
 - Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian, dengan sub kegiatan:
 - Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian.
 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan, dengan sub kegiatan:
 - Pendampingan manajemen korporasi petani; dan
 - Penilaian kelayakan dan standarisasi manajemen korporasi petani.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program ini antara lain:

1. Masih rendahnya pemahaman petani akan konsep corporate farming;
2. Masih rendahnya penerapan praktik pasca panen yang baik dan pengolahan produk turunan; dan
3. Masih kurangnya sinergi antar stakeholder terkait dalam perwujudan korporasi petani berbadan hukum.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara lain:

1. Melakukan pengawalan, pembinaan dan pendampingan serta penguatan kelembagaan pada kelompok tani sehingga UPPB yang bentuk tetap berjalan dan tetap ada keberadaannya;
2. Melakukan diseminasi informasi akan konsep *corporate farming* kepada petani/ poktan/ gapoktan;
3. Melakukan bimtek/ pelatihan serta pendampingan dan pembinaan terkait pasca panen yang baik dan diversifikasi produk turunan perkebunan; dan



4. Memperkuat kordinasi, sinergitas, dan kolaborasi dengan stakeholder terkait guna pencapaian korporasi petani.

b) Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian, meliputi kegiatan:

- Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman, dengan sub kegiatan:
 - Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program ini antara lain:

1. Terbatasnya Sarana Prasarana Perbenihan dalam pemenuhan benih unggul dan bermutu di Provinsi Kalimantan Timur yang permintaannya semakin meningkat setiap tahun.
2. Terbatasnya SDM dimana tuntutan pemenuhan benih unggul dan bermutu juga masih terkendala pada terbatasnya SDM yang dimiliki dalam upaya pemenuhan benih, sehingga dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat seringkali terjadi kelebihan beban pekerjaan yang menyebabkan kurang fokusnya dalam penyelesaian pekerjaan secara maksimal.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara lain:

1. Melakukan upaya peningkatan sarana prasarana seperti perbaikan jalan lingkungan perbenihan, peningkatan sarana penyiraman dll melalui penganggaran APBD; dan
2. Melakukan Peningkatan Kualitas SDM.

Program-program tersebut di atas mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.593.675.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.564.503.049,- atau 98,88%. Realisasi tersebut tidak mencapai 100% dikarenakan oleh SILPA positif. Secara keseluruhan program telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023.

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu NTP perkebunan rakyat dengan target 110%. Realisasi pada sasaran strategis ini yaitu 162,66%



atau 147,87% dan meningkat 7,69% dari capaian tahun 2021. Capaian sasaran ini diukur dari rata-rata NTP perkebunan rakyat dalam 1 tahun (Gambar 3.3).

Faktor pendorong peningkatan capaian NTP antara lain:

1. Kenaikan harga TBS kelapa sawit;
2. Anemo masyarakat terhadap produk olahan perkebunan semakin tinggi;
3. Jaringan pemasaran sudah semakin berkembang dan semakin dikenal;
4. Meningkatnya kesadaran petani untuk menjual produksinya dalam bentuk produk olahan daripada bahan mentah;
5. Ketersediaan benih unggul dan bermutu; dan
6. Melaksanakan kegiatan intensifikasi perkebunan rakyat.

Sedangkan faktor penghambat fluktuasi capaian NTP antara lain:

1. Alih fungsi lahan;
2. Persaingan dengan produk diluar Kalimantan Timur;
3. Harga komoditas perkebunan tergantung dengan mekanisme pasar; dan
4. Tingginya biaya produksi.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam mencapai target atas Indikator Kinerja Utama diperlukan sumber daya baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun pembiayaan. Tabel berikut memberikan gambaran perbandingan antara rata-rata persentase capaian kinerja dan persentase penyerapan anggaran program prioritas.

Tabel 3.9. Tingkat Efisiensi Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1	Meningkatnya PDRB sub sektor perkebunan	Nilai PDRB sub sektor perkebunan (atas dasar angka konstan)	84,85	79,57	5,28



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 (4-5)
2	Meningkatnya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>)	137,93	98,30	39,63
3	Meningkatnya kesejahteraan pekebun	NTP perkebunan rakyat	147,87	98,88	48,99

berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa persentase capaian kinerja lebih tinggi dari persentase penyerapan anggaran untuk sasaran 1 (Satu), sasaran 2 (Dua) dan sasaran 3 (Tiga) sehingga tingkat efisiensi plus.

Analisis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

Program merupakan suatu operasionalisasi dari strategi atau kebijakan pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan dengan cakupan teknis lebih mendalam dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) atau masyarakat. Dalam pelaksanaannya, setiap program harus dikoordinasikan oleh pemerintah daerah agar selalu berada dalam satu koridor pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara global. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi.

Pada Tahun 2022, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memperoleh alokasi anggaran yang sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp. 53.940.555.342,- dengan rincian program penunjang sebesar Rp. 25.353.633.342,- dan program pembangunan sebesar Rp. 28.586.922.000,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2022 sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Anggaran 2022, menjadi Rp. 56.284.752.243,- (bertambah Rp. 2.344.196.901,-) dengan rincian program penunjang sebesar Rp. 27.365.880.243,- dan program pembangunan sebesar Rp. 28.918.872.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 49.645.749.860,- (88,20%) dengan rincian untuk belanja program penunjang Rp. 25.632.820.123,- (93,67%) belanja pembangunan sebesar Rp. 24.012.929.737,- (83,04%), dengan program sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi. Program ini mendukung dalam mewujudkan urusan penunjang pemerintah daerah provinsi.
2. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian. Program ini mendukung dalam peningkatan produksi komoditas perkebunan, terlaksananya pengawasan peredaran dan sertifikasi benih serta peningkatan pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat.
3. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian. Program ini mendukung dalam peningkatan kesejahteraan kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan.
4. Program penyuluhan pertanian. Program ini mendukung dalam pembentukan kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan.
5. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Program ini mendukung dalam penurunan emisi gas rumah kaca serta tingkat serangan OPT sub sektor perkebunan.
6. Program perizinan usaha pertanian. Program ini mendukung dalam peningkatan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan.

Selain program dan kegiatan yang bersifat pembangunan, program dan kegiatan yang bersifat rutin indikatornya juga telah mendukung di dalam pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana penjabaran berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**
realisasi keuangan Dinas dan 3 UPTD sebesar Rp. 25.632.820.123,- dari



pagu 27.558.847.892,- dengan capaian keuangan 93,67% dan untuk capaian indikator kinerja (K) sebesar 99,79%. Program ini memiliki output Skor kepuasan masyarakat terhadap pelayanan urusan bidang perkebunan dengan capaian 88,81% dari target 89%. Faktor pendorong pencapaian target program ini antara lain sebagai berikut:

1. Adanya keterlibatan semua unit kerja Dinas Perkebunan dalam meningkatkan kualitas pelayanan;
2. Target kinerja yang jelas; dan
3. Melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan inspektorat.

Adapun Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 7 (Tujuh) kegiatan yaitu :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki indikator nilai akuntabilitas kinerja PD dengan capaian 76,12% atau 105,72% dari target 72%.

- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki indikator jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.

- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki indikator presentase ASN yang memiliki standar kompetensi dengan capaian Dinas dan 3 UPTD tercapai 14,28% atau 71,40% dari target 20%.

- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki indikator unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 5 unit atau 100% dari target 5 unit;
 - b. Pada UPTD PBP tercapai 3 unit atau 100% dari target 3 unit;
 - c. Pada UPTD P2TP tercapai 3 unit atau 100% dari target 3 unit;
- dan



- d. Pada UPTD PBTP tercapai 3 unit atau 100% dari target 3 unit.
 - 5) **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
Kegiatan ini memiliki indikator jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah dengan capaian sebagai berikut:
 - a. Pada Dinas tercapai 8 jenis atau 100% dari target 8 jenis;
 - b. Pada UPTD PBP tercapai 5 jenis atau 100% dari target 5 jenis;
 - c. Pada UPTD P2TP tercapai 9 jenis atau 100% dari target 9 jenis; dan
 - d. Pada UPTD PBTP tercapai 3 jenis atau 100% dari target 3 jenis.
 - 6) **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Kegiatan ini memiliki indikator jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah dengan capaian 3 jenis atau 100% dari target 3 jenis pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.
 - 7) **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Kegiatan ini memiliki indikator jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara dengan capaian 3 jenis atau 100% dari target 3 jenis pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.
- 7 Kegiatan diatas di dukung dengan 19 (sembilan belas) sub kegiatan yakni :
- a) **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;**
Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah dokumen perencanaan dan anggaran dengan capaian 10 dokumen atau 100% dari target 10 dokumen. Dokumen tersebut antara lain: DPA, RKA, DPPA, RKAP, RKT, Perubahan Renstra, Renja 2023, Perubahan Renja 2022, Pedoman Umum, dan Evaluasi Renja.
 - b) **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**



Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun dengan capaian 4 laporan atau 100% dari target 4 laporan. Dokumen tersebut antara lain: LKjIP, LPPD, Laporan Tahunan dan Laporan Statistik Perkebunan Tahun 2021.

c) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan dengan capaian 28 dokumen atau 100% dari target 28 dokumen dan jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan.

d) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.

e) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah pendidikan dan pelatihan formal dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 9 orang atau 133,33% dari target 12 orang;
- b. Pada UPTD PBP tercapai 0 orang atau 0% dari target 13 orang karena kegiatan tersebut tidak dianggarkan diutamakan untuk kegiatan yang lebih prioritas;
- c. Pada UPTD P2TP tercapai 10 orang atau 80% dari target 8 orang; dan
- d. Pada UPTD PBTP tercapai 5 orang atau 160% dari target 8 orang.

f) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan capaian 12 bulan atau



100% dari target 12 bulan pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.

g) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.

h) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan dan jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.

i) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah barang cetak dan penggandaan dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 47.240 Eksemplar atau 100% dari target 47.240 Eksemplar;
- b. Pada UPTD PBP tercapai 500 Eksemplar atau 100% dari target 500 Eksemplar;
- c. Pada UPTD P2TP tercapai 13.100 Eksemplar atau 100% dari target 13.100 Eksemplar; dan
- d. Pada UPTD PBTP tercapai 3.000 Eksemplar atau 100% dari target 3.000 Eksemplar.

j) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.

k) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah dengan



capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.

l) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 15 unit atau 100% dari target 15 unit;
- b. Pada UPTD PBP tercapai 15 unit atau 100% dari target 15 unit;
- c. Pada UPTD P2TP tercapai 17 unit atau 100% dari target 17 unit; dan
- d. Pada UPTD PBTP tercapai 9 unit atau 100% dari target 9 unit.

m) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah surat yang diadministrasikan dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 3.000 lembar atau 100% dari target 3.000 lembar;
- b. Pada UPTD PBP tercapai 240 lembar atau 100% dari target 240 lembar;
- c. Pada UPTD P2TP tercapai 395 lembar atau 98,73% dari target 390 lembar; dan
- d. Pada UPTD PBTP tercapai 300 lembar atau 100% dari target 300 lembar.

n) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.

o) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.



p) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.

q) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 18 unit atau 100% dari target 18 unit;
- b. Pada UPTD PBP tercapai 2 unit atau 100% dari target 2 unit;
- c. Pada UPTD P2TP tercapai 1 unit atau 100% dari target 1 unit;
dan
- d. Pada UPTD PBTP tercapai 1 unit atau 100% dari target 1 unit.

r) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 2 unit atau 100% dari target 2 unit;
- b. Pada UPTD PBP tercapai 4 unit atau 100% dari target 4 unit;
- c. Pada UPTD P2TP tercapai 1 unit atau 100% dari target 1 unit;
dan
- d. Pada UPTD PBTP tercapai 1 unit atau 100% dari target 1 unit.

s) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 21 unit atau 100% dari target 21 unit;
- b. Pada UPTD PBP tercapai 13 unit atau 100% dari target 13 unit;
- c. Pada UPTD P2TP tercapai 10 unit atau 100% dari target 10 unit; dan



- d. Pada UPTD PBTP tercapai 28 unit atau 100% dari target 28 unit.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dilaksanakan pada Bidang Pengembangan Komoditi, UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP) dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 13.218.069.532,- dari pagu Rp. 16.955.195.500,- dengan capaian kinerja keuangan 77,96%, dengan rincian pelaksanaan program sebagai berikut :

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dilaksanakan pada Bidang Pengembangan Komoditi terealisasi sebesar Rp. 11.156.061.775,- dari pagu dana Rp. 14.810.658.000,- dengan capaian kinerja keuangan 75,32% dan capaian indikator kinerja (K) sebesar 93,91%. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian di dukung oleh 1 kegiatan yaitu Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian dengan Output Kegiatan Produktivitas komoditas perkebunan strategis dengan target tahun 2022 19,30 Ton/Ha sedangkan realisasi produktivitas 12,49 Ton/Ha atau capaian kinerja 64,72%. Capaian produktivitas tersebut diperoleh dari produksi komoditas unggulan perkebunan yaitu Kakao, Karet, Kelapa dalam, Kelapa Sawit dan Lada dibagi dengan luas tanaman menghasilkan. Capaian Indikator Program, Kegiatan maupun sub kegiatan dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.10 Capaian Indikator Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan Bidang Pengembangan Komoditi pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	(%)	Ket
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi komoditas perkebunan (Ton)	18.126.490,20	17.022.588	93,91	Angka sementara Tahun 2022 (Sumber: Dinas
	• Kelapa Sawit	18.020.894	16.938.307	93,99	
	• Karet	81.651	68.456	83,84	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	(%)	Ket
	• Kakao	4.368	2.566	58,75	Perkebunan)
	• Kelapa Dalam	12.500	7.201	57,61	
	• Lada	7.077	5.080	71,78	
	• Pala	0.20	12	6.000	
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis (Ton/Ha)	18,4	12,49	64,72	
Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian	Dokumen Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian (dokumen)	1	1	100	
	a. Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao) (Ton/Ha)	0,8	0,61	76,25	
	b. Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet) (Ton/Ha)	1,45	1,29	88,97	
	c. Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa) (Ton/Ha)	0,85	0,45	52,94	
	d. Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa Sawit) (Ton/Ha)	21	13,22	62,95	
	e. Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada) (Ton/Ha)	1,19	0,88	73,61	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Upaya Dinas Perkebunan dalam meningkatkan produktivitas komoditi unggulan di atas pada tahun 2022 dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Intensifikasi Kakao 150 Ha

Kegiatan intensifikasi kakao seluas 150 Ha dilaksanakan di Kabupaten Berau 130 Ha dan Kota Samarinda 20 Ha. Kelompok tani penerima kegiatan ini adalah:

Tabel 3.11 Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi Kakao 150 Ha

No.	Kelompok Tani	Ketua	Lokasi			Luas (Ha)
			Desa/ Kamp/Kel	Kec.	Kab/ Kota	
1.	Suaran Mandiri	Petrus Pelor	Suaran	Sambaliung	Berau	40
2.	Setuju Suaran	Yohanis Samma	Suaran	Sambaliung	Berau	25
3.	Mekar Jaya I	Nikolaus Jumin	Suaran	Sambaliung	Berau	32
4.	Tunas Mekar	Yacobas Lembang	Suaran	Sambaliung	Berau	25
5.	Maju Bersama	Tahang	Tumbit Melayu	Teluk Bayur	Berau	8
6.	Tunas Baru	Undin	Bayur	Samarinda Utara	Samarinda	20

Pemberian bantuan di atas berdasarkan penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 188.4/151.3/Kpts-Disbun/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Penetapan Kelompok Tani/Peserta Sasaran Penerima Bantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Intensifikasi Kakao 150 Ha) di Kabupaten Berau 130 Ha dan Kota Samarinda 20 Ha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan melalui tender oleh penyedia jasa CV. Sanggam Perkasa dengan Nomor Surat Perjanjian Kerja: 027/4267/KPA-BPK/2022 tanggal 22 Juli 2022 dengan masa pelaksanaan selama 60 (Enam Puluh Puluh) hari kalender yang terhitung mulai tanggal



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

22 Juli 2022 sampai dengan 19 September 2022, dengan paket pengadaan berupa:

1. Pupuk NPK sebanyak 15.000 Kg;
2. Herbisida sebanyak 750 Liter; dan
3. Fungisida sebanyak 150 Kg.

2) Intensifikasi Kelapa 20 Ha

Kegiatan Intensifikasi Kelapa seluas 20 Ha dilakukan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Daftar kelompok tani penerima kegiatan intensifikasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.12 Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi Kelapa 20 Ha

No.	Kelompok Tani	Ketua	Lokasi			Luas (Ha)
			Desa/Kamp/Kel	Kec.	Kab/Kota	
1.	Tanjung Lestari	Asis	Tanjung Tengah	Penajam	PPU	20

Pemberian bantuan di atas berdasarkan penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 188.4/151.1/Kpts-Disbun/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Penetapan Kelompok Tani/Peserta Sasaran Penerima Bantuan Program Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Intensifikasi Kelapa 20 Ha) di Kabupaten Penajam Paser Utara Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan melalui tender oleh Penyedia Jasa CV. Shorea Mahakam dengan Nomor Surat Perjanjian Kerja: 027/3500/KPA-BPK/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 dengan masa pelaksanaan selama 60 (Enam Puluh) hari kalender yang terhitung mulai tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan 19 Agustus 2022, dengan paket pengadaan berupa:

1. Pupuk NPK sebanyak 2.000 Kg;
2. Herbisida sebanyak 100 Liter; dan
3. Insektisida sebanyak 40 Botol.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

3) Intensifikasi kelapa sawit 150 Ha

Kegiatan intensifikasi kelapa sawit seluas 150 Ha dilaksanakan di Kabupaten Kutai Timur seluas 25 Ha, Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 25 Ha, dan Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 75 Ha. Daftar kelompok tani penerima kegiatan intensifikasi kelapa sawit sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.13 Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi Kelapa Sawit 150 Ha

No.	Kelompok Tani	Ketua	Lokasi			Luas (Ha)
			Desa/ Kamp/Kel	Kecamatan	Kab/Kota	
1.	Santan Subur	Salma	Santan Ilir	Marangkayu	Kukar	25
2.	Kelapa Sawit Jaya	Abdul Halik	Santan Ilir	Marangkayu	Kukar	25
3.	Sirui Menre	Iskandar	Tanjung Limau	Ma. Badak	Kukar	25
4.	Nunjung Jaya	Misran	Giri Mukti	Penajam	PPU	50
5.	Tunas Harapan	Rohmad	Tepian Indah	Bengalon	Kutim	25

Pemberian bantuan di atas berdasarkan penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 188.4/151.6/Kpts-Disbun/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Penetapan Kelompok Tani/Peserta Sasaran Penerima Bantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Intensifikasi Kelapa Sawit 150 Ha) di Kabupaten Kutai Timur 25 Ha, Kutai Kartanegara 75 Ha, dan Penajam Paser Utara 50 Ha, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan melalui tender oleh penyedia jasa CV. Sinar Fajar dengan Nomor Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/4268/KPA-BPK/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 dengan masa pelaksanaan selama 60 (Enam Puluh) hari kalender yang dihitung mulai tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan 19 September 2022, dengan paket pengadaan berupa:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

1. Pupuk NPK sebanyak 15.000 Kg;
2. Herbisida sebanyak 750 Liter; dan
3. Insektisida 150 Botol.

4) Intensifikasi lada 150 Ha

Kegiatan intensifikasi lada seluas 150 Ha dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kertanegara 65 Ha, Kabupaten Penajam Paser Utara 36 Ha dan Kabupaten Berau 49 Ha. Dengan daftar kelompok tani penerima sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.14. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi Lada 150 Ha

No.	Kelompok Tani	Lokasi			Luas (Ha)
		Desa/Kamp/Kel	Kecamatan	Kab/Kota	
1.	Karya Bakti	Makarti	Marangkayu	Kukar	20
2.	Karya Hidup Baru	Bukit Merdeka	Samboja	Kukar	20
3.	Masa Kini	Batuah	Loa Janan	Kukar	20
4.	Gunung Makmur I	Semai 2	Sepaku	PPU	8
5.	Kebun Makmur	Argomulyo	Sepaku	PPU	9
6.	Giat	Sukaraja	Sepaku	PPU	6
7.	Tegal Makmur	Tengin Baru	Sepaku	PPU	7
8.	Rukun Makmur	Suko Mulyo	Sepaku	PPU	6
9.	Berkat Setia Bersati	Pesayan	Sambaliung	Berau	25
10.	Maju Bersama	Teluk Semanting	Pulau Derawan	Berau	24

Pemberian bantuan di atas berdasarkan penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 188.4/151.5/Kpts-Disbun/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Penetapan Kelompok Tani/Peserta Sasaran Penerima Bantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Intensifikasi Lada 150 Ha) di Kabupaten Kutai Kertanegara 65 Ha, Penajam Paser Utara 36 Ha dan Berau 49 Ha, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan melalui tender oleh penyedia jasa CV. Sinar Mulia dengan Nomor Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/4269/KPA-BPK/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 dengan masa pelaksanaan selama 60 (Enam Puluh) hari kalender yang terhitung mulai tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan 19 September 2022, dengan paket pengadaan berupa:

1. Pupuk NPK sebanyak 15.000 Kg;
2. Herbisida sebanyak 750 Liter; dan
3. Insektisida Bassa sebanyak 450 paket.

5) Intensifikasi Karet 150 Ha

Kegiatan intensifikasi karet seluas 150 Ha dilaksanakan di Kabupaten Kutai Barat 50 Ha, Kabupaten Kutai Kartanegara 50 Ha, Kabupaten Penajam Paser Utara 25 Ha dan Kota Samarinda 25 Ha. Dengan daftar kelompok tani penerima sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.15. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi Karet 150 Ha

No.	Kelompok Tani	Ketua	Lokasi			Luas (Ha)
			Desa/ Kamp/Kel	Kecamatan	Kab/ Kota	
1.	Rukun Iku Agawe Sentosa	Gusnoto	Prangat Baru	Marangkayu	Kukar	35
2.	Tani Sehati	Surono	Bunga Putih	Marangkayu	Kukar	15
3.	Harapan Mulia	Abd. Rahman	Sukomulyo	Long Iram	Kubar	25
4.	Mitra Tani I	Paulus	Belempung	Barong Tongkok	Kubar	25
5.	Maju Serbaguna	Winandar	Sukaraja	Sepaku	PPU	25
6.	Berkat Usaha	Ramli	Bentuas	Palaran	Samarinda	15
7.	Tungal Karsa	Mukmin	Bentuas	Palaran	Samarinda	10

Pemberian bantuan di atas berdasarkan penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 188.4/151.4/Kpts-Disbun/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Penetapan Kelompok Tani/Peserta Sasaran Penerima Bantuan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Intensifikasi Karet 150 Ha) di Kabupaten Kutai Barat 50 Ha, Kutai Kartanegara 50 Ha, Penajam Paser Utara 25 Ha dan Kota Samarinda 25 Ha, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan melalui tender oleh penyedia jasa CV. Yudhi Perkasa dengan Nomor Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/3867/KPA-BPK/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 dengan masa pelaksanaan selama 60 (Enam Puluh) hari kalender yang terhitung mulai tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan 03 September 2022, dengan paket pengadaan berupa:

1. Pupuk NPK sebanyak 15.000 Kg; dan
 2. Herbisida sebanyak 750 Liter.
- 6) Peremajaan Kakao 50 Ha
- Kegiatan peremajaan kakao seluas 50 Ha dilaksanakan di Kabupaten Berau 50 Ha. Dengan daftar kelompok tani penerima sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.16. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Peremajaan Kakao 50 Ha

No.	Kelompok Tani	Ketua	Lokasi			Luas (Ha)
			Desa/ Kamp/Kel	Kecamatan	Kab/ Kota	
1.	Tunas Mekar Jaya	Paulus Ledegang	Long Lanuk	Sambaliung	Berau	50

Pemberian bantuan di atas berdasarkan penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 188.4/512/Kpts-Disbun/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Penetapan Kelompok Tani/Peserta Sasaran Penerima Bantuan Kegiatan Pengawasan Sebaran Peredaran Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Peremajaan Kebun Kakao 50 Ha) di Kabupaten Berau 50 Ha, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Timur Tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan melalui tender oleh penyedia jasa CV. Sinar Fajar dengan Nomor Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/3635/KPA-BPK/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 dengan masa pelaksanaan selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender yang dihitung mulai tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan 24 September 2022, dengan paket pengadaan berupa:

1. Bibit Tanaman Kakao sebanyak 50.000 Batang;
2. Pupuk NPK sebanyak 5.000 Kg; dan
3. Herbisida sebanyak 250 Liter.

7) Rehabilitasi Lada 50 Ha

Kegiatan rehabilitasi lada seluas 50 Ha dilaksanakan di Kabupaten Berau 50 Ha. Dengan daftar kelompok tani penerima sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.17. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Rehabilitasi Lada 50 Ha

No.	Kelompok Tani	Ketua	Lokasi			Luas (Ha)
			Desa/ Kamp/Kel	Kecamatan	Kab/ Kota	
1.	Mekar Sari	M. Dullah	Bukit Makmur Jaya	Biatan	Berau	15
2.	Sari Makmur	Arwandi R.L	Bukit Makmur Jaya	Biatan	Berau	17
3.	Surya Tani	M. Salim	Bukit Makmur Jaya	Biatan	Berau	18

Pemberian bantuan di atas berdasarkan penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 188.4/146/Kpts-Disbun/2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Penetapan Kelompok Tani/Peserta Sasaran Penerima Bantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Rehabilitasi Tanaman Lada 50 Ha) di Kabupaten Berau 50 Ha, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan melalui tender oleh penyedia jasa CV. Swakarya Agro Kaltim dengan Nomor Surat



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Perjanjian Kerja Nomor: 027/3636/KPA-BPK/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 dengan masa pelaksanaan selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender yang terhitung mulai tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan 24 September 2022, dengan paket pengadaan berupa:

1. Bibit Lada sebanyak 80.000 Batang
2. Pupuk NPK sebanyak 5.000 Kg
3. Herbisida sebanyak 250 Liter

8) Intensifikasi Tanaman Perkebunan (Pokir)

Kegiatan intensifikasi tanaman perkebunan dilaksanakan di Kabupaten Kutai Barat. Dengan daftar lokasi penerima sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.18. Daftar Lokasi Penerima Bantuan Intensifikasi Tanaman Perkebunan (Pokir)

Kecamatan	Penerima	Luas (Ha)	Volume (Ltr)
Melak	1 Gapoktan	142	2.130
Bentian Besar	2 Kel. Tani	60	900
Tering	7 Kel. Tani	156	2.340
Siluq Ngurai	5 Kel. Tani	206	3.090
Long Iram	15 Kel. Tani	277	4.155
Jempang	42 Kel. Tani	794	11.910
Bongan	53 Kel. Tani	1.322	19.830
Sekolaq Darat	3 Gapoktan	428	6.420
Linggang Bigung	14 Kel. Tani	327	4.905
Nyuatan	20 Kel. Tani	300	4.500
Damai	11 Kel. Tani	195	2.925
Barong Tongkok	13 Kel. Tani	316	4.740
Jumlah		4.523	67.845

Pemberian bantuan di atas berdasarkan penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 188.4/348/Kpts-Disbun/2022 tanggal 01 November 2022 tentang Penetapan Kelompok Tani/Peserta Sasaran Penerima Bantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Sub



Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Intensifikasi Tanaman Perkebunan) di Kabupaten Kutai Barat, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan melalui E-Purchasing/E-Katalog oleh Penyedia Jasa PT. Eco Agro Mandiri dengan Nomor Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/7236/KPA-BPK/XI/2022 tanggal 17 November 2022 dengan masa pelaksanaan selama 40 (Empat Puluh) hari kalender yang terhitung mulai tanggal 17 November 2022 sampai dengan 26 Desember 2022, dengan paket pengadaan berupa Pupuk Hayati Cair sebanyak 67.845 Liter.

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan di atas antara lain:

1. Terlambatnya proses penetapan petani penerima bantuan dari Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota.
2. Terlambatnya proses penetapan petani calon penerima bantuan oleh Dinas di Kabupaten/Kota sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program, yang menyebabkan tertundanya proses pengadaan dan pelaksanaan program, sampai akhirnya berpengaruh pada waktu pemupukan tanaman, kondisi ini akan mempengaruhi produktifitas kebun yang menerima bantuan.
3. Perubahan harga pasar untuk pupuk NPK dan Herbisida yang fluktuatif.
4. Perubahan bahan baku untuk pupuk dan pestisida sangat mempengaruhi harga pasar yang ada, kenaikan harga pasar menyebabkan calon penyedia berfikir keras untuk mengikuti proses pengadaan, yang pada akhirnya juga ikut berperan menunda proses pengadaan yang sudah terjadwal. Sampai akhirnya berpengaruh pada waktu pemupukan tanaman. Kondisi ini akan mempengaruhi produktifitas kebun yang menerima bantuan.
5. Untuk kegiatan melalui dana hibah dari kelompok tani sipatokong sipatuo dapat dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi



Kalimantan Timur, namun kelompok tani tersebut tidak sanggup melakukan pengelolaan dana tersebut maka sesuai dengan musyawarah kelompok maka kelompok tani menyatakan mundur. Untuk pengusul Gapoktan Karya Bersama dan Kelompok Tani Sumber Makamur tidak dapat dilaksanakan bantuan yang diminta bukan merupakan komoditi perkebunan.

6. Kegiatan pokir di Kabupaten Kubar memiliki beberapa permasalahan, seperti kelompok tani yang belum terdaftar di Simluhtan, lahan anggota kelompok yang masuk dalam HGU perusahaan, lahan yang telah ditambang, lahan yang bukan komoditi perkebunan, dan anggota kelompok yang tidak mau menyerahkan fotocopy KTP. Kondisi ini membuat luasan yang dapat dibantu menjadi berkurang.

Tindak lanjut yang dilakukan terhadap permasalahan pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian antara lain:

1. Untuk meminimalisir permasalahan yang ada diupayakan untuk melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota secara persuasif;
2. Aktif berkoordinasi dengan Bappeda, BPKAD, Biro PBJ dan Inspektorat wilayah Kaltim dalam pelaksanaan intensifikasi tanaman perkebunan (POKIR) dan belanja hibah; dan
3. Untuk kondisi harga bahan baku Pupuk NPK dan Pestisida yang fluktuatif, tidak ada upaya yang dapat dilakukan, karena hal ini menjadi hambatan secara nasional bahkan dunia.

Pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian tahun anggaran 2022 secara keseluruhan terlaksana dengan baik, paket bantuan seluruhnya telah 100% dilaksanakan dan diterima oleh petani dan mendapat tanggapan yang positif oleh petani. Dampak positif bagi masyarakat tersebut antara lain:

1. Terbantunya masyarakat dalam hal meningkatkan produktivitas



- tanaman mereka, terutama dalam merehabilitasi kebun;
2. Berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat yang secara otomatis terjadi dikarenakan masyarakat memiliki kemampuan dalam meningkatkan produktivitas kebun mereka;
 3. Pemberdayaan penangkar bibit tanaman perkebunan yang secara langsung maupun tidak, akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani penangkar;
 4. Teroptimalisasinya lahan kebun masyarakat yang selama ini kurang optimal produktivitasnya;
 5. Terbantunya petani pekebun menekuni usaha taninya dengan pelatihan dan pendampingan teknis oleh petugas dan pembina secara intensif;
 6. Kembali menumbuhkan minat petani dalam memelihara dan meningkatkan produktivitas kebun mereka agar dapat meningkat dari segi ekonomi.
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian pada UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP) terealisasi sebesar Rp. 1.602.348.629,- dari pagu sebesar Rp 1.611.155.000,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,45% dan untuk capaian indikator kinerja 117,60%. Indikator kinerja program ini Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat 80% dengan realisasi 94,08%. Pada program ini terdapat 1 kegiatan yang mendukung yaitu Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman. Dengan output sub kegiatan yakni jumlah benih tanaman perkebunan yang disediakan sejumlah 25.000 benih dengan realisasi 100% dari target 25.000 benih, yang terdiri dari:
- a. Jumlah benih tanaman semusim dan rempah yang diperbanyak dengan target 10.000 benih dan realisasi 10.000 benih, terdiri dari benih lada 10.000 benih berlokasi di Km. 41 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.



- b. Jumlah Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar yang diperbanyak dengan target 15.000 benih dan realisasi 25.000 benih, terdiri dari aren 5.000 benih berlokasi di UPTD PBTP Kota Samarinda, dan kelapa sawit 10.000 benih berlokasi di Km. 38 Kecamatan Loa Janan dan Km 29 Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.

Faktor pendorong capaian kinerja tersebut di atas antara lain:

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk kebutuhan benih unggul dan bermutu; dan
2. Kolaborasi dengan pihak terkait.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain:

1. Terbatasnya Sarana Prasarana Perbenihan

Upaya pemenuhan benih unggul dan bermutu di Provinsi Kalimantan Timur yang permintaannya semakin meningkat setiap tahun, masih belum dapat dipenuhi secara maksimal karena masih terbatasnya sarana prasarana perbenihan. Sehingga dalam efisiensi waktu dan biaya masih terkendala dengan fasilitas yang belum memadai.

2. Terbatasnya SDM

Tuntutan pemenuhan benih unggul dan bermutu juga masih terkendala pada terbatasnya SDM yang dimiliki dalam upaya pemenuhan benih, sehingga dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat seringkali terjadi kelebihan beban pekerjaan yang menyebabkan kurang fokusnya dalam penyelesaian pekerjaan secara maksimal.

Tindak lanjut yang diupayakan dalam meminimalisir permasalahan antara lain:

1. Perbaikan Sarana Prasarana Perbenihan

Dalam upaya mengatasi masalah terbatasnya sarana prasarana perbenihan maka dilakukan upaya peningkatan sarana prasarana seperti perbaikan jalan lingkungan perbenihan, peningkatan sarana penyiraman dll melalui penganggaran APBD.



2. Peningkatan Kualitas SDM

Menindaklanjuti kurangnya SDM dilakukan peningkatan kualitas SDM sebagai solusi cepat masalah tersebut, selain itu juga dilakukan perencanaan manajemen pegawai dan pembagian tupoksi agar dengan jumlah SDM yang ada seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu.

- c. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian pada UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP) terealisasi sebesar Rp. 459.659.128,- atau 86,18% dari pagu Rp. 533.382.500,-. Indikator kinerja pada pada program ini adalah jumlah benih yang beredar. Dengan capaian sebanyak 6.592.223 benih atau 109,87% dari target 6.000.000 benih. Faktor pendorong tingginya capaian kinerja program ini yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan benih bersertifikat dan berlabel. Berikut rekapitulasi pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan di Kalimantan Timur tahun 2022:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Tabel 3.19. Data Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

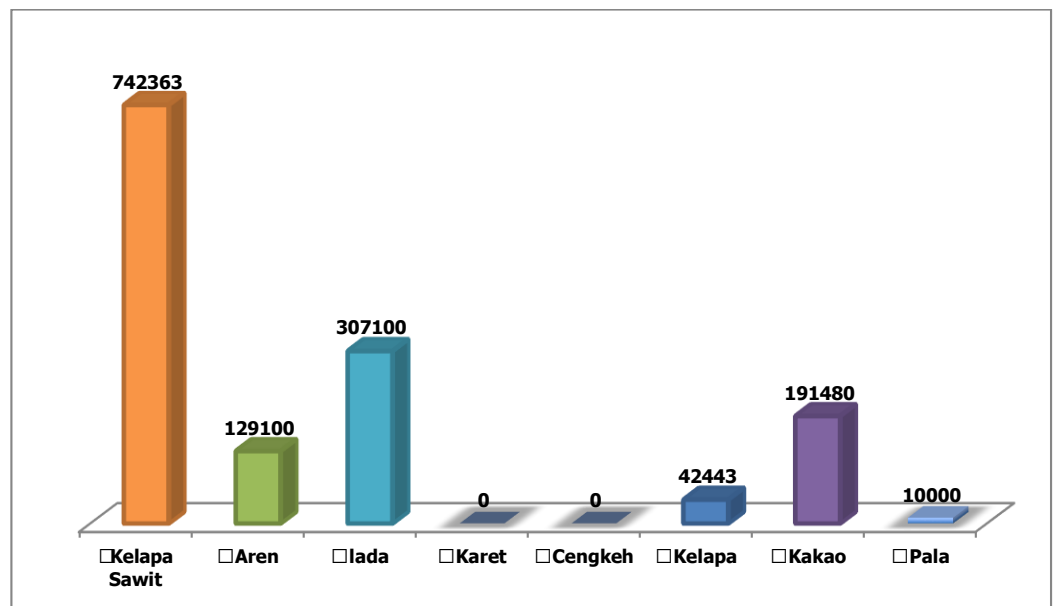
No.	Bulan	Kelapa sawit	Lada	Aren	Karet	Kelapa	Kakao	Pala	Kopi	Jumlah
1	Januari	475.353	75.000	-	-	22	-	-	33.000	583.375
2	Februari	631.511	-	600	75.000	10.150	43.000	-	-	760.261
3	Maret	596.890	120.000	99.400	-	46	42.000	10.000	-	868.336
4	April	733.250	-	-	-	5.003	-	-	-	738.253
5	Mei	322.923	-	-	-	5	-	-	-	322.928
6	Juni	410.840	-	-	-	3.024	92.000	-	-	505.864
7	Juli	430.335	200.000	-	-	31.000	43.000	-	-	704.335
8	Agustus	582.157	60.000	-	600	2.509	150.000	-	5.000	800.266
9	September	545.658	163.198	-	-	4	30.170	-	-	739.030
10	Oktober	60,658	3.100	-	-	10.511	-	-	-	74.269
11	November	113.966	-	-	-	48.100	-	-	-	162.066
12	Desember	322.122	-	-	-	11.118	-	-	-	333.240
	Jumlah	5.225.663	621.298	100.000	75.600	121.492	400.170	10.000	38.000	6.592.223



Program ini terdiri dari 1 kegiatan, yaitu kegiatan pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan. Indikator pada kegiatan ini adalah jumlah benih tanaman perkebunan yang diawasi dengan capaian 6.592.223 benih atau 109,87% dari target 6.000.000 benih. Sedangkan sub kegiatan pada kegiatan ini adalah pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit tanaman, dengan indikator:

a. Jumlah benih yang disertifikasi

Capaian indikator ini adalah 1.415.996 benih atau 47,20% dari target 3.000.000 benih, dengan rincian sebagaimana grafik berikut:



Gambar 3.8. Data Sertifikasi Benih per Komoditi Tahun 2022

Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan sertifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Terbatasnya benih dari sumber benih;
2. Kebun sumber benih yang rusak dan terserang penyakit;
3. Adanya pengadaan benih dari luar Provinsi Kalimantan Timur;
4. Terjadinya alih fungsi lahan dari sumber benih menjadi kebun produksi, tambang maupun komoditi pertanian; dan
5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM).

Adapun tindak lanjut yang dapat dilaksanakan pada sub kegiatan tersebut adalah:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

1. Berkoordinasi dengan UPTD Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (UPTD-P2TP);
2. Kondisi kebun sekaran yang berada pada tahap pemeliharaan;
3. Melakukan sosialisasi perbenihan;
4. Mengusulkan formasi Pengawas Benih Tanaman (PBT); dan
5. Melakukan penetapan beberapa kebun sumber benih seperti komoditi lada dan aren.

b. Jumlah Peredaran Benih Illegal yang Diawasi

Capaian indikator ini adalah 99.093 benih atau 210,84% dari target 47.000 benih. Capaian tersebut diperoleh dengan melaksanakan kegiatan pengawasan peredaran benih di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan dibantu oleh tenaga pengawas benih yang ada di Kabupaten/Kota serta berkoordinasi dengan Koordinator Pengawas (Korwas) Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dalam rangka penanganan peredaran benih illegal kelapa sawit. Adapun data yang dihasilkan dari kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20. Data Pengawasan Peredaran Benih dan Kasus Benih Illegal

No.	Jumlah Benih	Bentuk Benih	Umur Benih	Dokumen Benih	Lokasi ditemukan	Keterangan
1	1,020	Dalam polibag	7 bulan	Tidak ditemukan	Desa Giri Agung, Kec Sebulu, Kab.Kukar	1. Surat pernyataan tidak memperjual belikan
2	2,000	Dalam polibag	7 bulan	Tidak ditemukan	Desa Giri Agung, Kec Sebulu, Kab.Kukar	2.Surat penghentian sementara
3	6,748	Dalam polibag	6-7 bulan	- B.A penyerahan kecambah sawit - Nota pembelian benih PPKS dan Lonsum - Sertifikat PPKS dan Lonsum - DO PPKS,	Desa Giri Agung, Kec Sebulu, Kab.Kukar	1. Dokumen yang bersangkutan sudah dikonfirmasi ke sumber benih dan dinyatakan dokumen palsu 2. 300 benih dalam polibag
	300	Dalam polibag	9 bulan			
	250	Kecambah				



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Jumlah Benih	Bentuk Benih	Umur Benih	Dokumen Benih	Lokasi ditemukan	Keterangan
				Lonsum - Daftar silang PPKS - Surat Ket. Ka UPT P3R Tenggarong Seberang		dan 250 kecambah disita korwas polda sebagai BB 3. Minggu ke 3 Maret akan dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan
4	11,000	Siap tanam dalam polibag	11 bulan	Tanpa dokumen	Desa Bangun Rejo, Sebulu, Kukar	
5	250	Dalam polibag	8 bulan	Tidak ditemukan	Desa Jambuk Makmur Kec.Bongan, Kubar	Beli melalui online SHOPEE dengan harga Rp.300.000,- (250 butir kecambah)
6	150	Dalam polibag	6 bulan	Tidak ditemukan	Desa Jambuk Makmur Kec.Bongan, Kubar	Beli dengan sdr. Buhairi
7	150	Dalam polibag	6 bulan	Tidak ditemukan	Desa Jambuk Makmur Kec.Bongan, Kubar	Beli dengan sdr. Buhairi
8	250	Dalam polibag	6 bulan	Tidak ditemukan	Desa Jambuk Makmur Kec.Bongan, Kubar	Beli dengan sdr. Buhairi
9	3,500	Siap tanam	9-12 bulan	Tidak ditemukan	Kec. Muara Badak	Tanpa label Benih dari PPKS dan PT. Lonsum
10	5,000	Siap Tanam	9-12 bulan	Tidak ditemukan	Kab. Paser	Berlabel Benih dari PPKS dan PT. Lonsum
11	150	siap tanam	> 12 bulan	Tidak ditemukan	Kota Balikpapan	Benih sdh dikirim via penyeberangan feri ke Sultra tanpa dokumen lalu dikembalikan lagi ke karantina Balikpapan
12	19,375		4,5 tahun	Tidak ada	Kota Balikpapan	
13	400		11 bulan	Tidak ada	Bontang Selatan	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Jumlah Benih	Bentuk Benih	Umur Benih	Dokumen Benih	Lokasi ditemukan	Keterangan
14	150		11 bulan	Sertifikat benih hilang	Bontang Utara	
15	400		6 bulan	Tidak ada	Bontang	
16	30,000	Siap Tanam	> 12 bulan	Tidak ditemukan	SP2 Kota Bangun	Benih asal PPKS sesuai dok benih sebanyak 1.250 butir kecambah, namun benih sudah habis dijual sisa benih asalan pembelian dari Medan Penghentian Peredaran
17	8,000	Pre Nursery	>3 bulan	Tidak ditemukan	Desa Tepian Batang Tanah Grogot	Benih dikecambahkann sendiri di lokasi temuan
18	1,500	Siap tanam	> 12 bulan	Tidak ditemukan	Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Penajam, PPU	
19	3,500	Kecambah		Tidak ditemukan	Jl. Tani Aman Km. 45 RT. 08 Kel. Bukit Merdeka, Samboja Kukar	Kemasan pada kecambah tertulis PT. Lonsum
	5,000	Siap tanam	9 bulan			
Total	99,093					

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan peredaran dan sertifikasi mutu benih bibit perkebunan pada tahun 2022 ditemui beberapa permasalahan antara lain :

1. Kurangnya petugas fungsional Pengawas Benih Tanaman (PBT) dan PPNS pada UPTD Pengawasan Benih Perkebunan sedangkan wilayah kerja meliputi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
2. Kurang aktifnya petugas pengawas benih di Kabupaten/Kota dalam mengawasi sumber benih maupun produsen benih yang



ada di wilayahnya masing-masing sehingga pengawasan peredaran benih di Kabupaten/Kota tidak berjalan dengan maksimal dan ketersediaan benih perkebunan tidak dapat terpantau dengan baik.

3. Belum maksimalnya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perbenihan pada masyarakat pekebun.
4. Tidak adanya spanduk maupun baliho mengenai peraturan perbenihan pada tiap Kabupaten/Kota wilayah Kalimantan Timur.
5. Sistem OSS berpengaruh pada pengurusan dokumen seperti SP2BKS dan IUPBTP, serta pengawasan peredaran benih sehingga menimbulkan banyaknya benih ilegal yang beredar.
6. Kurangnya koordinasi dari Pengawas Benih Tanaman daerah asal benih tanaman perkebunan luar wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang masuk kepada Pengawas Benih Tanaman dan PPNS Provinsi Kalimantan Timur sehingga pengawasan terhadap dokumen maupun fisik benih tidak maksimal.

Adapun tindak lanjut yang dilakukan untuk meminimalisir permasalahan antara lain:

1. Dilakukan penambahan tenaga fungsional Pengawas Benih Tanaman pada UPTD Pengawasan Benih Perkebunan sebanyak 9 (Sembilan) orang;
2. Petugas Pengawas Benih Tanaman Kabupaten/Kota agar lebih aktif dalam mengawasi sumber benih maupun produsen benih di wilayah kerja masing-masing;
3. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perbenihan harus dilaksanakan dengan cara pendekatan secara langsung ke lapangan;
4. Produsen benih agar melaporkan pemasangan label benih kepada Petugas Pengawas Benih Tanaman Provinsi/Kabupaten/Kota sebelum benih diedarkan; dan
5. Berkoordinasi dengan Pengawas Benih Tanaman luar wilayah Provinsi Kalimantan Timur, karantina wilayah kerja Balikpapan dan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang untuk meningkatkan pengawasan peredaran benih.

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dilaksanakan pada Bidang Pengembangan Komoditi dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.037.862.000,- dari pagu Rp. 7.129.202.000,- (84,69%) dengan output pelaksanaan program sebagai berikut :

- a. Luas kebun yang dibangun seluas 1.575.966 Ha dari target 1.462.645 Ha atau 107,75%. Rincian luas komoditi perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.21. Rekapitulasi Luas Areal Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Komoditi	Luas (Ha)
1.	Kelapa Sawit	1.411.861
2.	Karet	123.776
3.	Kakao	7.777
4.	Kelapa Sawit	20.068
5.	Lada	8.321
6.	Komoditi Lain	4.163
Total		1.575.966

*) Angka sementara tahun 2022

- b. Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan sebanyak 36 kelompok tani dari target 30 kelompok atau 120%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.22. Rekapitulasi Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan

No.	Kelompok Tani	Alamat Desa/Kel	Kabupaten
A	Kelapa Sawit		
1.	Sawit Makmur	Desa Santan Ilir Kec. Marang Kayu	Kutai Kartanegara
2.	Anugrah Bersama	Desa Suka Damai Kec. Muara Badak	Kutai Kartanegara
3.	Nikai Mandiri	Kelurahan Sepan, Kec Penajam	Penajam Paser Utara
B	Lada		
4.	Usaha Bersama	Kamp. Linggang	Kutai Barat



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Kelompok Tani	Alamat Desa/Kel	Kabupaten
		Menceleo Kec. Linggang Bigung	
5.	Mulia Abadi	Kamp. Tutung Kec. Linggang Bigung	Kutai Barat
6.	Subur Makmur	Kamp. Sekolaq Darat Kec. Sekolaq Darat	Kutai Barat
7.	Tora Lestari	Kamp. Muara Mujan Kec. Tering	Kutai Barat
8.	Wijaya Kusuma	Kamp. Benung Kec. Damai	Kutai Barat
9.	Harapan Baru	Kamp. Pepas Ehang Kec. Barong	Kutai Barat
10.	Sinar Harapan V	Kamp. Sri Mulyo Kec. Sekolaq Darat	Kutai Barat
11.	KWT Bawe Ipu	Kamp. Damai Seberang Kec. Damai Seberang	Kutai Barat
C	Kelapa		
12.	Padat Karya	Desa Kutai Lama Kec. Anggana	Kutai Kartanegara
13.	Radak Sangokng	Kamp. Muara Tai Kec. Jempang	Kutai Barat
D	Kakao		
14.	KWT. Sumber Sari Rezeki	Desa Sumber Sari Kecamatan Kota Bangun	Kutai Kartanegara
15.	Usaha Bersama	Desa Bumi Rapak Kec. Kaubun	Kutai Timur
16.	Harapan Jaya	Desa Bumi Jaya Kec. Kaubun	Kutai Timur
17.	Urip Tani	Kampung Linggang Jelemuq Kec. Tering	Kutai Barat
18.	Teluk Subur	Kampung Tering Lama Kec. Tering	Kutai Barat
19.	Maju Bersama	Desa Melati Jaya Kec. Gunung Tabur	Berau
20.	Rantau Jaya	Desa Melati Jaya Kec. Gunung Tabur	Berau
21.	Tunas Baru	Bayur Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara	Samarinda
22.	Karya Usaha	Berambai Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara	Samarinda
E	Karet		
23.	Alam Subur	Desa Sambera Baru Kec. Marangkayu	Kutai Kartanegara
24.	Marimun Lestari	Kamp. Linggang Marimun Kec. Mook Manar Bulan	Kutai Barat



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Kelompok Tani	Alamat Desa/Kel	Kabupaten
25.	Berkat Usaha I	Kampung Sekolaq Mulaq Kec. Sekolaq Darat	Kutai Barat
26.	Karya Warga	Kamp. Linggang Muyub Ilir Kec. Tering	Kutai Barat
27.	Abadi	Kamp. Muara Benagaq Kec. Melak	Kutai Barat
28.	Ubaq Mula	Kel. Pampang Kec. Samarinda Utara	Samarinda
F	Pala		
29.	Sarunai	Kamp. Batu-Batu Kec. Gunung Tabur	Berau
30.	Mayang Padi	Kamp. Batu-Batu Kec. Gunung Tabur	Berau
31.	Sinar Mulya	Ds. Teluk Sumbang Kec. Biduk-Biduk	Berau
G	Aren		
32.	Sumber Rejeki	Kamp. Gemuruh Kec. Mook Manar Bulant	Kutai Barat
33.	Suka Maju II	Kamp. Gemuruh Kec. Mook Manar Bulant	Kutai Barat
34.	Sejati	Kamp. Gadur Kec. Mook Manar Bulant	Kutai Barat
35.	Alam Lestari	Kamp. Sakalotoq Kec. Mook Manar Bulant	Kutai Barat
36.	Aren Lestari	Kamp. Gadur Kec. Mook Manar Bulant	Kutai Barat

Faktor pendorong tingginya pencapaian target program ini antara lain:

1. Ketersediaan benih;
2. Ketersediaan lahan yang bebas kawasan;
3. Tersedianya kelompok tani yang terdata di SIMLUHTAN; dan
4. Minat petani untuk membudidayakan komoditas perkebunan.

Program ini di dukung oleh kegiatan Penataan Prasarana Pertanian dengan indikator jumlah luas kebun yang diperluas. Capaian pada indikator ini 720 Ha atau 100% dari target 720 Ha. Sub Kegiatan pada kegiatan ini adalah Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian dimana indikatornya yaitu jumlah luas kebun yang diperluas dengan capaian sebagai berikut :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Tabel 3.23. Capaian Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Tahun 2022

Indikator	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	(%)
Jumlah luas kebun yang diperluas (Ha)	720	720	100
Jumlah luas kebun yang diperluas (Kakao)	150	150	100
Jumlah luas kebun yang diperluas (Karet)	150	150	100
Jumlah luas kebun yang diperluas (Kelapa)	50	50	100
Jumlah luas kebun yang diperluas (Kelapa Sawit)	70	70	100
Jumlah luas kebun yang diperluas (Lada)	100	100	100
Jumlah luas kebun yang diperluas (Pala)	100	100	100
Jumlah luas kebun yang diperluas (Aren)	100	100	100

Upaya Dinas Perkebunan dalam meningkatkan perluasan kebun 7 komoditi di atas pada tahun 2022 dengan melaksanakan aktivitas sebagai berikut:

1) Perluasan areal kakao seluas 150 Ha

Kegiatan perluasan areal kakao tercapai 150 Ha dari target 150 Ha. Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 20 Ha, Kabupaten Kutai Timur seluas 50 Ha, Kabupaten Kutai Barat seluas 25 Ha, Kabupaten Berau seluas 40 Ha, dan Kota Samarinda seluas 15 Ha dengan kelompok tani penerima kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.24. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Kakao Seluas 150 Ha

No.	Kelompok Tani	Alamat Desa/Kel	Kabupaten	Luas (Ha)
	Kakao			<u>150</u>
1.	KWT. Sumber Sari Rezeki	Desa Sumber Sari Kec. Kota Bangun	Kutai Kartanegara	20
2.	Usaha Bersama	Desa Bumi Rapak Kec. Kaubun	Kutai Timur	25
3.	Harapan Jaya	Desa Bumi Jaya	Kutai Timur	25



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Kelompok Tani	Alamat Desa/Kel	Kabupaten	Luas (Ha)
		Kec. Kaubun		
4.	Urip Tani	Kampung Linggang Jelemuq Kec. Tering	Kutai Barat	10
5.	Teluk Subur	Kampung Tering Lama Kec. Tering	Kutai Barat	15
6.	Maju Bersama	Desa Melati Jaya Kec. Gunung Tabur	Berau	24
7.	Rantau Jaya	Desa Melati Jaya Kec. Gunung Tabur	Berau	16
8.	Tunas Baru	Bayur Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara	Samarinda	11
9.	Karya Usaha	Berambai Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara	Samarinda	4

2) Perluasan Areal Karet Seluas 150 Ha

Kegiatan perluasan areal karet tercapai 150 Ha atau 100% dari target 150 Ha. Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 30 Ha, Kabupaten Kutai Barat 105 Ha, dan Kota Samarinda 15 Ha. Kelompok tani penerima kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.25. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Karet Seluas 150 Ha

No.	Kelompok Tani	Alamat Desa/Kel	Kabupaten	Luas (Ha)
	Karet			<u>150</u>
1.	Alam Subur	Desa Sambera Baru Kec. Marangkayu	Kutai Kartanegara	30
2.	Marimun Lestari	Kamp. Linggang Marimun Kec. Mook Manar Bulan	Kutai Barat	25
3.	Berkat Usaha I	Kampung Sekolaq Mulaq Kec. Sekolaq Darat	Kutai Barat	30
4.	Karya Warga	Kamp. Linggang Muyub Ilir Kec. Tering	Kutai Barat	20
5.	Abadi	Kamp. Muara Benagaq Kec. Melak	Kutai Barat	30



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Kelompok Tani	Alamat Desa/Kel	Kabupaten	Luas (Ha)
6.	Ubaq Mula	Kel. Pampang Kec. Samarinda Utara	Samarinda	15

3) Perluasan Areal Kelapa Seluas 50 Ha

Kegiatan perluasan areal kelapa tercapai 50 Ha atau 100% dari target 50 Ha. Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 30 Ha dan Kabupaten Kutai Barat seluas 20 Ha dengan kelompok tani penerima sebagai berikut:

Tabel 3.26. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Kelapa Seluas 50 Ha

No.	Kelompok Tani	Alamat Desa/Kel	Kabupaten	Luas (Ha)
	Kelapa			50
1.	Padat Karya	Desa Kutai Lama Kec. Anggana	Kutai Kartanegara	30
2.	Radak Sangokng	Kamp. Muara Tai Kec. Jempang	Kutai Barat	20

4) Perluasan Areal Kelapa Sawit Seluas 70 Ha

Kegiatan perluasan areal kelapa sawit tercapai 70 Ha atau 100% dari target 70 Ha. Kegiatan dilaksanakan di Kutai Kartanegara seluas 40 Ha dan Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 30 Ha. Kelompok tani penerima kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.27. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Kelapa Sawit Seluas 70 Ha

No.	Kelompok Tani	Alamat Desa/Kel	Kabupaten	Luas (Ha)
	Kelapa Sawit			70
1.	Sawit Makmur	Desa Santan Ilir Kec. Marang Kayu	Kutai Kartanegara	20
2.	Anugrah Bersama	Desa Suka Damai Kec. Muara Badak	Kutai Kartanegara	20
3.	Nikai Mandiri	Kelurahan Sepan, Kec Penajam	Penajam Paser Utara	30

5) Perluasan Areal Lada Seluas 100 Ha

Kegiatan perluasan areal lada tercapai seluas 100 Ha dari target 100 Ha. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Kutai Barat seluas 100 Ha, dengan kelompok tani penerima kegiatan ini adalah



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

sebagai berikut :

Tabel 3.28. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Lada Seluas 100 Ha

No.	Kelompok Tani	Alamat Desa/Kel	Kabupaten	Luas (Ha)
	Lada			<u>100</u>
1.	Usaha Bersama	Kamp. Linggang Menceleo Kec. Linggang Bigung	Kutai Barat	10
2.	Mulia Abadi	Kamp. Tutung Kec. Linggang Bigung	Kutai Barat	25
3.	Subur Makmur	Kamp. Sekolaq Darat Kec. Sekolaq Darat	Kutai Barat	15
4.	Tora Lestari	Kamp. Muara Mujan Kec. Tering	Kutai Barat	15
5.	Wijaya Kusuma	Kamp. Benung Kec. Damai	Kutai Barat	10
6.	Harapan Baru	Kamp. Pepas Ehang Kec. Barong	Kutai Barat	16
7.	Sinar Harapan V	Kamp. Sri Mulyo Kec. Sekolaq Darat	Kutai Barat	5
8.	KWT Bawe Ipu	Kamp. Damai Seberang Kec. Damai Seberang	Kutai Barat	4

6) Perluasan Areal Pala Seluas 100 Ha

Kegiatan perluasan areal pala tercapai 100 Ha atau 100% dari target 100 Ha, Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Berau seluas 100 Ha. Kelompok tani penerima kegiatan ini adalah :

Tabel 3.29. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Pala Seluas 100 Ha

No.	Kelompok Tani	Alamat Desa/Kel	Kabupaten	Luas (Ha)
	Pala			<u>100</u>
1.	Sarunai	Kamp. Batu-Batu Kec. Gunung Tabur	Berau	15
2.	Mayang Padi	Kamp. Batu-Batu Kec. Gunung Tabur	Berau	18
3.	Sinar Mulya	Ds. Teluk Sumbang Kec. Biduk-Biduk	Berau	67

7) Perluasan Areal Aren Seluas 100 Ha

Kegiatan perluasan areal aren tercapai 100 Ha atau 100% dari target 100 Ha. Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Kutai Barat



seluas 100 Ha. Kelompok tani penerima kegiatan ini adalah :

Tabel 3.30. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan
Areal Aren Seluas 100 Ha

No.	Kelompok Tani	Alamat Desa/Kel	Kabupaten	Luas (Ha)
	Aren			<u>100</u>
1.	Sumber Rejeki	Kamp. Gemuruh Kec. Mook Manar Bulant	Kutai Barat	20
2.	Suka Maju II	Kamp. Gemuruh Kec. Mook Manar Bulant	Kutai Barat	20
3.	Sejati	Kamp. Gadur Kec. Mook Manar Bulant	Kutai Barat	20
4.	Alam Lestari	Kamp. Sakalotoq Kec. Mook Manar Bulant	Kutai Barat	20
5.	Aren Lestari	Kamp. Gadur Kec. Mook Manar Bulant	Kutai Barat	20

Faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan perluasan komoditas perkebunan adalah masih kurangnya minat petani terhadap komoditas perkebunan selain sawit khususnya untuk komoditi Pala dan Aren, sehingga dalam pelaksanaannya sering mengalami keterlambatan dalam proses penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL).

Tindak lanjut dalam mengatasi hambatan tersebut di atas, selaku pelaksana kegiatan sudah melakukan sosialisasi kepada Kelompok Tani terhadap komoditas yang dianggap baru oleh masyarakat dalam hal ini diberikan informasi terkait budidaya tanaman, pasca panen sampai pada pengolahan dan manfaat komoditi tersebut.

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dilaksanakan pada Bidang Perkebunan Berkelanjutan, Bidang Usaha dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 22.041.859.335,- dari pagu Rp. 2.085.877.500,- dengan capaian kinerja keuangan 97,89%, dengan rincian pelaksanaan program sebagai berikut :



a. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang dilaksanakan oleh Bidang Perkebunan Berkelanjutan dan Bidang Usaha realisasi keuangan sebesar Rp. 1.181.406.320,- atau 98,81% dari pagu dana Rp. 1.195.590.000,-. Output program ini adalah Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan dengan capaian sebesar 7,92 Juta Ton CO₂eq atau 194,74% dari target 4,067 Juta Ton CO₂eq. Faktor yang mendorong tingginya capaian program tersebut antara lain:

1. Regulasi terkait pengelolaan ANKT Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kriteria Area dengan Nilai Konservasi Tinggi dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi di Area Perkebunan;
2. Regulasi terkait kelapa sawit berkelanjutan Peraturan Presiden Nomor: 44 Tahun 202 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia, bahwa pelaku usaha/perusahaan wajib ISPO;
3. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha/perusahaan dalam melindungi dan mengelola ANKT ; dan
4. Adanya program FCPF-CF di Kalimantan Timur.

Program ini di dukung oleh Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi dengan output kegiatan:

- a. Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi Mitigasi GRK dengan capaian kinerja 172,59 % atau dengan capaian 233 pelaku usaha dari 135 pelaku usaha yang ditargetkan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.31. Pelaku Usaha yang Melakukan Aksi Mitigasi GRK

No.	Pelaku Usaha	Kab/Kota
1.	PT. Agrindo Sukses Sejahtera	Berau
2.	PT. Anugrah Agung Prima Abadi	Berau
3.	PT. Berau Karitindo Lestari	Berau
4.	PT. Berau Sawit Sejahtera	Berau



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Pelaku Usaha	Kab/Kota
5.	PT. Buana Mudantara	Berau
6.	PT. Dwiwira Lestari Jaya	Berau
7.	PT. General Aura Semari	Berau
8.	PT. Global Primata Mandiri	Berau
9.	PT. Gunta Samba Jaya	Berau
10.	PT. Hutan Hijau Mas	Berau
11.	PT. Inti Energi Kaltim	Berau
12.	PT. Jabontara Eka Karsa	Berau
13.	PT. Kukar Commodities Worldwide	Berau
14.	PT. Malindo Mas Perkebunan	Berau
15.	PT. Mulia Inti Perkasa	Berau
16.	PT. Natura Pasific Nusantara	Berau
17.	PT. Sanggam Harapan Sejahtera	Berau
18.	PT. Sentosa Kalimantan Jaya	Berau
19.	PT. Tanjung Buyu Perkasa Plantation	Berau
20.	PT. Tunas Alam Nusantara	Berau
21.	PT. Yudha Wahana Abadi	Berau
22.	PT. Gunta Samba (Elang Estate)	Kutai Timur
23.	PT. MPI (Nuaring/Muara Bulan Estate)	Kutai Timur
24.	PT. Wahana Tri Tunggal Cemerlang	Kutai Timur
25.	PT. Wira Inova Nusantara (SSE,SPE,SSF)	Kutai Timur
26.	PT. Gunta Samba Jaya (Miau Baru Estate I, II)	Kutai Timur
27.	PT. Citra Palma Sejati (Eks. Comexindo Int)	Kutai Timur
28.	PT. Sawitindo Plantation	Kutai Timur
29.	PT. Long Bagun prima Sawit I, II	Kutai Timur
30.	PT. Lintas Khatulistiwa Utama	Kutai Timur
31.	PT. Tapan Nadenggan (Unit PMSE)	Kutai Timur
32.	PT. Kresna Duta Agroindo (Unit GKMA/MWHE)	Kutai Timur
33.	PT. Swakarsa Sinar Sentosa (SWA)	Kutai Timur
34.	PT. Dharma Setya Nusantara Tbk (PKS2) (PKS3) (PKS4) (DSN)	Kutai Timur
35.	PT. Dharma Agrotama Nusantara (DAN)	Kutai Timur
36.	PT. Dharma Intisawit Nugraha (DIN)	Kutai Timur
37.	PT. Dewata Sawit Nusantara (DWT)	Kutai Timur
38.	PT. Karya Prima Agro Sejahtera I (KPS I) & II (KPS II)	Kutai Timur
39.	PT. Bima Palma Nugraha (BPN)	Kutai Timur
40.	PT. Bima Agri Sawit (BAS)	Kutai Timur
41.	PT. Karyanusa Eka Daya I	Kutai Timur
42.	PT. Subur Abadi Plantation	Kutai Timur
43.	PT. Sumber Kharisma Persada	Kutai Timur
44.	PT. Cipta Narada Lestari	Kutai Timur
45.	PT. Anugerah Energitama (TLSE I)	Kutai Timur



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Pelaku Usaha	Kab/Kota
46.	PT. Nusaraya Agrosawit	Kutai Timur
47.	PT. Nusantara Agro Sentosa II,III	Kutai Timur
48.	PT. Cipta Hijau Bumi Etam	Kutai Timur
49.	PT. Dinamika Prima Artha I (Sei. Banderang Estate, Ds. Tepian Langsat, Kec. Bengalon (Eks. Minanga Ogan tahun 2018)	Kutai Timur
50.	PT. Hanusentra Agro Lestari (Kelolokan Estate)	Kutai Timur
51.	PT.Sinar bumi jaya	Kutai Timur
52.	PT. Telen (Pengadan Baay / Sei Karangan), (Desa Pengadan Baay Estate 1),(Sei Karangan Estate),(Bukit Permata Estate), (Layang-layang Estate), (Karangan Estate)	Kutai Timur
53.	PT. Sawit Prima Nusantara (Mata Air Estate),(Bumi Etam Estate)	Kutai Timur
54.	PT. Telen Prima Sawit (Ma. Bengkal Estate)(Benua Baru Estate)	Kutai Timur
55.	PT. Gemilang Sejahtera Abadi II, Abadi I (LM estate) Abadi III (LM Estate)	Kutai Timur
56.	PT. Sawit Sukses Sejahtera I dan II	Kutai Timur
57.	PT. Palma Cipta Selaras	Kutai Timur
58.	PT. Sinergi Agro Industri Est. PT. Multi Mandiri Perdana (MMP)	Kutai Timur
59.	PT. Indonesia Plantation Synergy	Kutai Timur
60.	PT. Karya Bakti Sejahtera Agrotama I,II	Kutai Timur
61.	PT. Etam Bersama Lestari	Kutai Timur
62.	PT. Hamparan Perkasa Mandiri	Kutai Timur
63.	PT. Subur Abadi Wana Agung	Kutai Timur
64.	PT. Kutai Agro Mandiri (eks. Group Minanga Ogan)	Kutai Timur
65.	PT. Cipta Davia Mandiri	Kutai Timur
66.	PT. Kutai Mitra Sejahtera I , II	Kutai Timur
67.	PT. Kartanegara Kumalasakti	Kutai Timur
68.	PT. Nala Palma Cadudasa I,II,III	Kutai Timur
69.	PT. Sumber Alam Selaras	Kutai Timur
70.	PT. Berkat Surya Bumi	Kutai Timur
71.	PT. Sumber Bumi Serasi	Kutai Timur
72.	PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera(EMAS)	Kutai Timur
73.	PT. Agro Inti Mandiri(AIM) Ds. Marah Haloq Kec. Telen	Kutai Timur
74.	PT. Maryam Decorindo Persada	Kutai Timur
75.	PT. Tanjung Manis Arta Lestari	Kutai Timur
76.	PT Anugerah Alam Persada (Sawit)	Kutai Timur
77.	PT. Sangatta Sejahtera	Kutai Timur



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Pelaku Usaha	Kab/Kota
78.	PT. Tri Ivestama	Kutai Timur
79.	PT. Kemilau Indah Nusantara	Kutai Timur
80.	PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations	Kutai Timur
81.	PT. Kutai Balian Nauli	Kutai Timur
82.	PT. Tridaya Hutan Lestari II	Kutai Timur
83.	PT. Fairco Agro Mandiri	Kutai Timur
84.	PT. Sima Agung Prima Sawit	Kutai Timur
85.	PT. Andalas Wahana Sukses I,II	Kutai Timur
86.	PT. Kalimantan Agro Nusantara II	Kutai Timur
87.	PT. Umaq Tukung Mandiri Utama	Kutai Timur
88.	PT. Preya Sawit Makmur	Kutai Timur
89.	PT. Barito Makmur Lestari	Kutai Timur
90.	PT. Bina Karya Nusa Sejahtera	Kutai Timur
91.	PT. Bumi Mas Agro	Kutai Timur
92.	PT. Tapian Nadenggan (Unit JLYE/LBLE)	Kutai Timur
93.	PT. Tapian Nadenggan (Unit PMSE/LBLE)	Kutai Timur
94.	PT. Tapian Nadenggan (Unit LBLE)	Kutai Timur
95.	PT. Tapian Nadenggan (Unit BSRE)	Kutai Timur
96.	PT. Telen (Pengadan Baay / Sei Karangan), (Desa Pengadan Baay Estate 1),(Sei Karangan Estate),(Bukit Permata Estate), (Layang-layang Estate), (Karangan Estate)	Kutai Timur
97.	PT. Jaya Mandiri Sukses	Kutai Kartanegara
98.	PT. Suryabumi Tunggal Perkasa	Kutai Kartanegara
99.	PT. Sasana Yudha Bhakti	Kutai Kartanegara
100.	PT. Sasana Yudha Bhakti	Kutai Kartanegara
101.	PT. Rea Kaltim Plantations	Kutai Kartanegara
102.	PT. Tritunggal SentarBuana	Kutai Kartanegara
103.	PT. Teguh Jayaprima Abadi	Kutai Kartanegara
104.	PT. Prima Mitrajaya Mandiri	Kutai Kartanegara
105.	PT. Agri Eastborneo Kencana	Kutai Kartanegara
106.	PT. Agrojaya Tirta Kencana	Kutai Kartanegara
107.	PT. Alam Jaya Persada	Kutai Kartanegara
108.	PT. Perkebunan Kaltim Utama I	Kutai Kartanegara
109.	PT. Tunas Prima Sejahtera	Kutai Kartanegara
110.	PT. Sukses Bina Alam	Kutai Kartanegara
111.	PT. Niagamas Gemilang	Kutai Kartanegara
112.	PT. Sawit Kaltim Lestari	Kutai Kartanegara
113.	PT. Maju Kalimantan Hadapan	Kutai Kartanegara
114.	PT. Cahaya Anugerah Plantation	Kutai Kartanegara
115.	PT. Agro Bumi Kaltim	Kutai Kartanegara
116.	PT. Enggang Alam Sawita	Kutai Kartanegara
117.	PT. Hamparan Sentosa	Kutai Kartanegara
118.	PT. Manunggal Adi Jaya	Kutai Kartanegara
119.	PT sawit Prima Sakti	Kutai Kartanegara



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Pelaku Usaha	Kab/Kota
120.	PT. Budiduta Agro Makmur	Kutai Kartanegara
121.	PT. Muara Kaman Sawit Sejahtera	Kutai Kartanegara
122.	PT. Kutai Agro Jaya	Kutai Kartanegara
123.	PT. Kota Bangun Sawit Sejahtera	Kutai Kartanegara
124.	PT. Bahtera Bahagia	Kutai Kartanegara
125.	PT. Sawit Golden Prima	Kutai Kartanegara
126.	PT. Aneka Reksa International Corp	Kutai Barat
127.	PT. PP.London Sumatera, Tbk	Kutai Barat
128.	PT. Borneo Citra Persada Abadi	Kutai Barat
129.	PT. Borneo Citra Persada Jaya	Kutai Barat
130.	PT. Borneo Citra Persada Mandiri	Kutai Barat
131.	PT. Citra Palma Pertiwi	Kutai Barat
132.	PT. Kalimantan Agro Makmur	Kutai Barat
133.	PT. Fangiono Agro Plantation	Kutai Barat
134.	PT. Farinda Bersaudara	Kutai Barat
135.	PT. Kedap Sayaaq Dua	Kutai Barat
136.	PT. Teguh Swakarsa Sejahtera	Kutai Barat
137.	PT. Ketapang Hijau Lestari 1	Kutai Barat
138.	PT. Ketapang Hijau Lestari 2	Kutai Barat
139.	PT. Muara Toyu Subur Lestari	Paser
140.	PT. Pucuk Jaya	Paser
141.	PT. Multi Makmur Mitra Alam	Paser
142.	PT. Agro Inti Kencanamas	Paser
143.	PT. Senabung Aneka Pratiwi	Paser
144.	PT. Pradiksi Gunatama	Paser
145.	PT. Multi Jayantara Abadi	Paser
146.	PT. Nusa Lestari	Paser
147.	PT. Borneo Indosubur	Paser
148.	PT. Saraswanti Sawit Makmur	Paser
149.	PT. Gawi Makmur Kalimantan	Paser
150.	PT. Borneo Indah Marjaya	Paser
151.	PT. Palma Plantasindo	Paser
152.	PT. Buana Wirasubur Sakti	Paser
153.	PT. Langgeng Muara Makmur	Paser
154.	PT. Sebatin	Paser
155.	PT. Anugerah Abadi Multi Usaha	Paser
156.	PT. Sinar Alam Niaga Raya	Paser
157.	PT. Bumi Mulia Makmur Lestari	Paser
158.	PT. Bumi Pasir Agrindo	Paser
159.	PT. Malindo Agro Plantations	Paser
160.	PT. Indo Karya Gema Sakti	Paser
161.	PT. Permata Exsperindo	Paser
162.	PT. Agro Inti Mandiri	Paser
163.	PT. Trimadu Murni Asri	Paser
164.	PT. Amalia Hani Sejahtera	Paser
165.	PT. Indo Kencana Agri	Paser
166.	PT. Sahabat Sawit Sejahtera	Paser
167.	PT. Pelita Niaga Makmur	Paser



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Pelaku Usaha	Kab/Kota
168.	PT. Sukses Tani Nusasubur	Penajam Paser Utara
169.	PT. Waru Kaltim Plantation	Penajam Paser Utara
170.	PT. Kebun Mandiri Sejahtera	Penajam Paser Utara
171.	PT. Borneo Bhakti Sejahtera	Mahakam Ulu
172.	PT. Marsam Citra Adiperkasa I	Mahakam Ulu
173.	PT. Setia Agro Utama	Mahakam Ulu
174.	PT. Citra Palma Pertiwi	Mahakam Ulu
175.	PT. Setia Agro Abadi	Mahakam Ulu
176.	PT. Putra Utama Lestari	Mahakam Ulu
177.	KTPA Merapun	Berau
178.	KTPA Lesan	Berau
179.	KTPA Kampung Merabu	Berau
180.	KTPA Kampung Merabu	Berau
181.	KTPA Jempang	Kutai Barat
182.	KTPA Bongan	Kutai Timur
183.	KTPA Kampung Muara Nayan	Kutai Timur
184.	KTPA Tanjung Labu	Kutai Timur
185.	KTPA Desa Tepian Baru	Kutai Timur
186.	KTPA Desa Pelawan	Kutai Timur
187.	KTPA Tepian Terap	Kutai Timur
188.	KTPA Desa Muara Wahau	Kutai Timur
189.	KTPA Desa Benhes	Kutai Timur
190.	KTPA Desa Diaklay	Kutai Timur
191.	KTPA Desa Nehes Liah Bing	Kutai Timur
192.	KTPA Desa Dabeg	Kutai Timur
193.	KTPA Desa Miau Baru	Kutai Timur
194.	KTPA Sepaku	Penajam Paser Utara
195.	KTPA Tani Sejahtera	Penajam Paser Utara
196.	KTPA Labangka	Penajam Paser Utara
197.	Desa Gunung Intan Babulu	Penajam Paser Utara
198.	KTPA Muara Toyu	Paser
199.	KTPA Laburan	Paser
200.	KTPA Lori	Paser
201.	KTPA Sunge Batu	Paser
202.	KTPA Sungai Langir	Paser
203.	KTPA Perepat	Paser
204.	Desa Paser Balengkong	Paser
205.	KTPA Desa Padang Jaya	Paser
206.	KTPA Sanga sanga	Kutai Kartanegara
207.	KTPA Anggana	Kutai Kartanegara
208.	KTPA Desa Handil	Kutai Kartanegara
209.	KTPA.Desa Perangat Baru	Kutai Kartanegara
210.	KTPA Prangat Baru	Kutai Kartanegara
211.	KTPA Benua Puhun	Kutai Kartanegara
212.	KTPA Bukit Jering	Kutai Kartanegara
213.	KTPA Bunga Jadi	Kutai Kartanegara
214.	KTPA Lebaho Ulaq	Kutai Kartanegara
215.	KTPA Lebak Mantan	Kutai Kartanegara



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Pelaku Usaha	Kab/Kota
216.	KTPA Loleng	Kutai Kartanegara
217.	KTPA Muara Kaman Ilir	Kutai Kartanegara
218.	KTPA Rantau Humpang	Kutai Kartanegara
219.	KTPA Taruna Muda	Samarinda
220.	KTPA Nyi'an Kasa	Samarinda
221.	KTPA Tunas Harapan	Balikpapan
222.	KTPA Bina Tani Sejahtera Mandiri	Balikpapan
223.	PT Sinergi Agro Industri dengan KSU Karya Bhakti Desa Marukangan	Kutai Timur
224.	PT Sinergi Agro Industri dengan KSU Karya Bhakti Desa Marukangan	Kutai Timur
225.	PT TPS dengan Mas. Desa Menamang Kiri	Kutai Kartanegara
226.	PT Suan, PT TSB dengan Koperasi Mekar Sejahtera	Kutai Kartanegara
227.	PT Rea Kaltim Dengan Asosiasi Koperasi Belayan Bersatu	Kutai Kartanegara
228.	PT. Jaya Mandiri Sukses dengan PT. Surya Cipta Mahakam	Kutai Kartanegara
229.	PT. Alam Jaya Persada, PT. Singlurus Pratama dengan Kelompok Tani Bangkit Bersama	Kutai Kartanegara
230.	PT. Agro Bumi Kaltim dengan Koperasi Dayang Kencana Lestari	Kutai Kartanegara
231.	PT Putra Bongan Jaya dengan Koperasi Sawit Jaya Muara Kedang	Kutai Barat
232.	PT Sagita Agro Kencana dengan Koperasi Mitra Mandiri Mangkulio	Penajam Paser Utara
233.	PT. Waru Kaltim Plantation dengan Kelompok Tani Paser Bersama	Penajam Paser Utara

- b. Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi penanganan konflik usaha perkebunan yang dilakukan oleh Provinsi dan Kabupaten dengan realisasi 11 pelaku usaha atau 220% dari 5 pelaku usaha yang menjadi target. Pelaku usaha tersebut antara lain:
1. PT Gunta Samba dengan Kop. Dharma Mulia Abadi di Kabupaten Kutai Timur;
 2. PT Sinergi Agro Industri dengan KSU Karya Bhakti Desa Marukangan di Kabupaten Kutai Timur;



3. PT TPS dengan Mas. Desa Menamang Kiri di Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. PT Suan, PT TSB dengan Koperasi Mekar Sejahtera di Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. PT Rea Kaltim Dengan Asosiasi Koperasi Belayan Bersatu di Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. PT. Jaya Mandiri Sukses dengan PT. Surya Cipta Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. PT. Alam Jaya Persada, PT. Singlurus Pratama dengan Kelompok Tani Bangkit Bersama di Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. PT. Agro Bumi Kaltim dengan Koperasi Dayang Kencana Lestari di Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. PT Putra Bongan Jaya dengan Koperasi Sawit Jaya Muara Kedang di Kutai Barat;
10. PT Sagita Agro Kencana dengan Koperasi Mitra Mandiri Mangkulio di Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
11. PT. Waru Kaltim Plantation dengan Kelompok Tani Paser Bersama di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kegiatan di atas terdiri dari 2 sub kegiatan, yakni:

1. Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pagu Rp. 740.930.000,- terealisasi sebesar Rp. 728.978.770,- (98,39%).
Target kinerja pada sub kegiatan ini yaitu:
 - a) Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergy 1 PMS dengan capaian 1 PMS (100%) yaitu PT. Teguh Jaya Prima Abadi di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan output gas CH₄. Dalam mendukung penanganan dampak perubahan iklim Dinas Perkebunan terus berupaya mendorong Perusahaan Besar Swasta untuk membangun perkebunan dengan melakukan penurunan emisi melalui sosialisasi dan koordinasi ke Perusahaan Besar Swasta yang ada.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

1. Jumlah Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina terealisasi sebanyak 46 KTPA atau 306,67% dari target 15 KTPA. Keberhasilan pembentukan Kelompok Tani Peduli API (KTPA) dipengaruhi oleh adanya sosialisasi ke Kabupaten/Kota tentang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (PLTM) serta mendorong Kabupaten/Kota untuk melakukan kemitraan dengan perusahaan. Namun ke depan masih terdapat tantangan dalam pembinaan KTPA karena masih terbatasnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia KTPA yang tersedia. KTPA yang dibentuk dan dibina pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.33. KTPA yang Dibentuk dan Dibina Tahun 2022

No	Kab/Kota	Pembinaan KTPA	Pembentukan KTPA	Total
1	Kab. Berau	1 KTPA Merapun	1 KTPA Kampung Merabu	4
		2 KTPA Lesan		
		3 KTPA Kampung Merabu		
2	Kab. Kubar	4 KTPA Jempang		3
		5 KTPA Bongan		
		6 KTPA Kampung Muara Nayan		
3	Kab. Kutim	7 KTPA Tanjung Labu	2 KTPA Desa Muara Wahau	10
		8 KTPA Desa Tepian Baru	3 KTPA Desa Benhes	
		9 KTPA Desa Pelawan	4 KTPA Desa Diaklay	
		10 KTPA Tepian Terap	5 KTPA Desa Nehes Liah Bing	
			6 KTPA Desa Dabeq	
			7 KTPA Desa Miau Baru	
4	Kab. PPU	11 KTPA Sepaku		4
		12 KTPA Tani Sejahtera		
		13 KTPA Labangka		



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No	Kab/Kota	Pembinaan KTPA	Pembentukan KTPA	Total
		14 Desa Gunung Intan Babulu		
5	Kab. Paser	15 KTPA Muara Toyu	8 KTPA Desa Padang Jaya	8
		16 KTPA Laburan		
		17 KTPA Lori		
		18 KTPA Sunge Batu		
		19 KTPA Sungai Langir		
		20 KTPA Perepat		
		21 Desa Paser Balengkong		
6	Kab. Kukar	22 KTPA Sanga sanga	9 KTPA Prangat Baru	13
		23 KTPA Anggana	10 KTPA Benua Puhun	
		24 KTPA Desa Handil	11 KTPA Bukit Jering	
		25 KTPA.Desa Perangat Baru	12 KTPA Bunga Jadi	
			13 KTPA Lebaho Ulaq	
			14 KTPA Lebak Mantan	
			15 KTPA Loleng	
			16 KTPA Muara Kaman Ilir	
			17 KTPA Rantau Hampang	
7	Kota Samarinda	26 KTPA Taruna Muda		2
		27 KTPA Nyi'an Kasa		
8	Kota Balikpapan	28 KTPA Tunas Harapan	18 KTPA Bina Tani Sejahtera Mandiri	2
Total		28	18	46

2. Jumlah Konflik perkebunan yang ditangani terealisasi 7 konflik atau 140% dari target 5 konflik. Keberhasilan penanganan konflik didorong oleh antara lain:

1. Koordinasi yang intensif kepada para pihak (Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten, para pihak yang berkonflik, OPD lingkup Provinsi dan Kabupaten serta Mitra Pembangunan Perkebunan);



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

2. Melaksanakan mediasi terhadap laporan-laporan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat maupun pelaku usaha;
3. Melaksanakan Identifikasi kasus-kasus konflik dengan langsung ke lapangan;
4. Tingginya keinginan dari para pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan permasalahan guna mencapai kesepakatan;
5. Kesiapan Provinsi dan Kabupaten untuk memfasilitasi konflik;
6. Komitmen Provinsi dan Kabupaten dalam menyelesaikan konflik (pada Rapat Koordinasi Gangguan Usaha Perkebunan); dan
7. Dorongan dari mitra untuk membantu sebagai mediator (IMN).

Pelaksanaan penanganan konflik tahun 2022 sebagai berikut

Tabel 3.34. Penanganan Konflik Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Kabupaten	Para Pihak yang Berkonflik	Permasalahan
1	Kutai Timur	1. PT Gunta Samba dengan Kop. Dharma Mulia Abadi	Lahan kemitraan yang tidak dipelihara oleh perusahaan
		2. PT Sinergi Agro Industri dengan KSU Karya Bhakti Desa Marukangan	Fasilitasi Permasalahan Kemitraan (Penghapusan bunga talangan dan pengurangan hutang dana talangan)
2	Kutai Kartanegara	1. PT TPS dengan Mas. Desa Menamang Kiri	Tuntutan Plasma, Tali Asih dan CSR
		2. PT Suan, PT TSB dengan Koperasi	Tuntutan terhadap harga TBS sesuai



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Kabupaten	Para Pihak yang Berkonflik	Permasalahan
		Mekar Sejahtera	dengan harga ketetapan tim
		3. PT Rea Kaltim Dengan Asosiasi Koperasi Belayan Bersatu	Pembukaan kembali kuota bulanan TBS, penutupan PKS, dan kesepakatan harga TBS
3	Kutai Barat	PT Putra Bongan Jaya dengan Koperasi Sawit Jaya Muara Kedang	Hak Plasma
4	Penajam Paser Utara	PT Sagita Agro Kencana dengan Koperasi Mitra Mandiri Mangkulio	Kurangnya pemeliharaan kebun plasma oleh perusahaan

- b. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) terealisasi sebesar Rp. 860.453.015,- atau 96,65% dari pagu sebesar Rp. 890.287.500,-. Indikator kinerja program ini yaitu jumlah taksasi kerugian akibat serangan OPT dengan capaian Rp. 889.438.167,- atau 97,03% dari target Rp. 916.648.000,-. Dalam pencapaian program ini didukung oleh kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi dengan indikator luas serangan berat OPT yang dikendalikan, dimana tercapai 195 Ha atau 100% dari target 195 Ha. Data luas serangan berat OPT pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.35. Luas Serangan Berat OPT di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Kabupaten / Kota	Serangan Berat
1	Balikpapan	49 Ha
2	Samarinda	1 Ha
3	Bontang	1 Ha
4	Kutai Kartanegara	48 Ha
5	Kutai Barat	15 Ha



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Kabupaten / Kota	Serangan Berat
6	Kutai Timur	0 Ha
7	Mahulu	8 Ha
8	Paser	16 Ha
9	Penajam Paser Utara	18 Ha
10	Berau	39 Ha
	Total	195 Ha

Sedangkan sub kegiatan yang mendukung yaitu Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan indikator antara lain:

- a) Jenis APH yang dikembangkan dengan target 2 jenis dan realisasi 2 jenis (100%). Jenis APH yang dikembangkan tersebut yaitu pestisida nabati miceslla dan pestisida nabati asap cair.
- b) Jumlah APH yang Diperbanyak (Liter) dengan target 600 liter dan realisasi 600 liter (100%).
- c) Jumlah kelembagaan OPT yang dibina (Lembaga) dengan target 2 lembaga dan realiasi 2 lembaga (100%). Lembaga tersebut yaitu Regu Pengendali OPT (RPO) dan Brigade Proteksi Tanaman (BPT) di Kabupaten Paser.
- d) Jumlah luas serangan OPT yang dikendalikan (Ha) dengan target 195 Ha dan realisasi 270,5 Ha (138,72%). Pelaksanaan pengendalian serangan OPT pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.36. Luas Pengendalian Serangan OPT di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Jenis Komoditas	Jenis OPT	Luas Serangan (Ha)
1	Karet	Jamur Akar Putih/JAP (Rigidoporus lignosus)	3,258.00
2	Karet	Gugur Daun Karet (Pestalotiopsis sp.)	3,258.00
3	Lada	Busuk pangkal batang (Phytophthora capsici)	12.50



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Jenis Komoditas	Jenis OPT	Luas Serangan (Ha)
4	Lada	Penyakit kuning/Nematoda (Radopholus similis, Meloidogyne incognita, Fusarium oxysporum, dan Pratylenchus sp.)	12.50
5	Lada	Ganggang Pirang	12.50
6	Kelapa Sawit	Busuk pangkal batang (Ganoderma boninense)	957.00
7	Kelapa Sawit	Apogonia sp.	957.00
8	Kelapa Sawit	Kumbang nyiur (Oryctes rhinoceros)	957.00
9	Kelapa Sawit	Tikus (Rattus rattus)	957.00
10	Kelapa Sawit	Landak (Hystrix braciura)	957.00
11	Lada	Busuk pangkal batang (Phytophthora capsici)	475.00
12	Lada	Jamur upas (Upasia salmonicolor)	475.00
13	Lada	Penghisap bunga lada (Diconocoris hewetti)	475.00
14	Lada	Penghisap buah lada (Dasynus piperis)	475.00
15	Kelapa	Kumbang janur (Brontispa sp.)	1,559.00
16	Kelapa	Kumbang nyiur (Oryctes rhinoceros)	1,559.00
17	Kelapa Sawit	Busuk tandan marasmius (Marasmius palmivorus)	544.00
18	Kakao	Penggerek Buah Kakao/PBK (Conopomorpha cramerella)	739.00
19	Karet	Jamur Akar Putih/JAP (Rigidoporus lignosus)	80.00
20	Kelapa Sawit	Tikus (Rattus rattus)	1,332.00
21	Karet	Kering Alur Sadap	44,525.00
22	Karet	Jamur Akar Putih/JAP (Rigidoporus lignosus)	44,525.00
23	Kelapa	Kumbang nyiur (Oryctes rhinoceros)	5.00
24	Kelapa Sawit	Ulat api (Setora sp./Parasa sp./Darna catenatus/Thosea sp./Hidari irava)	49,451.00
25	Kelapa Sawit	Busuk pangkal batang (Ganoderma boninense)	49,451.00
26	Kelapa Sawit	Kumbang nyiur (Oryctes rhinoceros)	49,451.00
27	Lada	Busuk pangkal batang (Phytophthora capsici)	1,344.00
28	Kakao	Busuk Buah Kakao (Phytophthora palmivora)	16.00
29	Karet	Jamur Akar Putih/JAP (Rigidoporus lignosus)	10,404.00
30	Karet	Gugur Daun Karet (Colletotrichum gloesporioides sp.)	587.00
31	Kakao	Tupai/bajing (Callosciurus sp.)	7.80
32	Kelapa	Tupai/bajing (Callosciurus sp.)	10.00
33	Kakao	Busuk Buah Kakao (Phytophthora palmivora)	25.00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Jenis Komoditas	Jenis OPT	Luas Serangan (Ha)
34	Karet	Jamur Akar Putih/JAP (<i>Rigidoporus lignosus</i>)	25.00
35	Karet	Gugur Daun Karet (<i>Colletotrichum gloesporioides</i> sp.)	25.00
36	Karet	Jamur upas (<i>Upasia salmonicolor</i>)	25.00
37	Kelapa	Kera	847.00
38	Kelapa Sawit	Kumbang nyiur (<i>Oryctes rhinoceros</i>)	780.00
		Total	270,5

Faktor pendorong capaian program ini antara lain:

1. Sinergitas antar program dalam mencapai sasaran rencana strategi;
2. Optimalisasi kelembagaan dan instalasi perlindungan tanaman perkebunan; dan
3. Pengendalian OPT terpadu merupakan faktor penting dalam pembangunan perkebunan berkelanjutan.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian program ini adalah:

1. Kurangnya optimalnya pengembangan biopestisida dan APH;
2. Kurangnya optimalnya tata kelola pelayanan teknis;
3. Kurangnya SDM perlindungan Tanaman; dan
4. Belum dikenalnya pengendalian OPT terpadu ramah lingkungan.

Tindaklanjut yang dilakukan antara lain:

1. Membangun kerjasama dan jaringan dalam pengembangan biopestisida dan APH;
2. Optimalisasi tata kelola pelayanan teknis;
3. Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM perlindungan tanaman; dan
4. Diseminasi teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan.

5. **Program Perizinan Usaha Pertanian** terealisasi sebesar Rp. 583.449.050,- atau 99,79% dari pagu sebesar Rp. 584.700.000,-. Program ini memiliki indikator jumlah perusahaan yang mendapat



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) dari target 35 Perusahaan tercapai sebanyak 36 perusahaan atau 102,86%. Perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.37. Perusahaan yang Mendapat Sertifikasi Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) di Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten	Perusahaan
1	Prov. Kaltim	1. PT Gawi Makmur Kalimantan
2	Berau	1. PT Bina Karya Nuansa Sejahtera
3	Kutai Timur	1. PT Sawit Prima Nusantara
		2. PT Gemilang Sejahtera Abadi
		3. PT Nusa Indah Kalimantan
		4. PT Sumber Bumi Selaras
		5. PT Karya Prima Agro Sejahtera I
		6. PT Karya Prima Agro Sejahtera II
		7. PT Dharma Satya Nusantara (PKS 7)
		8. PT Swakarsa Sinarsentosa
		9. PT Dharma Agrotama Nusantara
		10. PT Dharma Satya Nusantara (PKS 6)
4	Kutai Barat	1. PT Farinda Bersaudara
		2. PT Harapan Rimba Raya
		3. PT Borneo Surya Mining
		4. PT Ketapang Hijau Lestari
		5. PT Maha Karya Bersama
5	Kutai Kartanegara	1. PT Rea Kaltim Plantations
		2. PT Enggang Alam Sawita
7	PPU	1. PT Waru Kaltim Plantation
		2. Sukses Tani Nusa Subur
		3. PT Kebun Mandiri Sejahtera
		4. PT Mega Hijau Bersama
8	Paser	1. PT Pradiksi Gunatama
		2. PT Senabangun Aneka Pertiwi
		3. PT Buana Wirasubur Sakti
		4. PT Borneo Indah Marjaya
		5. PT Palma Plantasido
		6. PT Muaratoyu Subur Lestari
		7. PT Harapan Sawit Sejahtera
		8. PT Saraswanti Sawit Makmur
		9. PT Agro Inti Kencana Mas
		10. PT Pucuk Jaya



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No	Kabupaten	Perusahaan
		11. PT Perkebunan Nusantara XIII (Semuntai)
		12. PT Malindo Agro Plantations
		13. PT MULTI JAYANTARA ABADI
Total		36

Realisasi program di atas melebihi target dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Koordinasi yang intensif kepada Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten dan pelaku usaha Perkebunan;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan usaha perkebunan se Kalimantan Timur; dan
3. Sosialisasi kepada pelaku usaha tentang peraturan dan perundang-undangan di bidang perkebunan.

Faktor pendorong capaian kinerja program di atas antara lain:

1. Dinas perkebunan Provinsi melakukan upaya membantu Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten Mahakam Ulu untuk melaksanakan PUP;
2. Melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha; dan
3. Peraturan perundang-undangan terkait PUP (Permentan Nomor 7 Tahun 2009 dan Permentan Nomor 98 Tahun 2013).

Walaupun demikian masih terdapat faktor penghambat capaian kinerja tersebut yaitu kurangnya tenaga PUP yang bersertifikat di Kabupaten dan dari 7 Kabupaten, 1 Kabupaten yaitu Kabupaten Mahakam Ulu yang belum melakukan PUP karena tidak tersedianya anggaran dan SDM.

Tindak lanjut terhadap faktor penghambat di atas dilakukan hal-hal berikut:

1. Mengoptimalkan seluruh tenaga penilai usaha perkebunan yang bersertifikat di Kabupaten se Kalimantan Timur dalam melaksanakan PUP terhadap perusahaan perkebunan; dan
2. Pelatihan PUP bagi petugas dinas yang membidangi perkebunan.

Program Perizinan Usaha Pertanian didukung oleh kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan. Capaian indikator tersebut yaitu 97 perusahaan atau 100% dari target 97 perusahaan, yang terdiri dari 62 pelaku usaha yang dibina dan dimitrakan tahun 2022 dan 35 pelaku usaha yang dimitrakan dari 2019-2021. Pelaku usaha yang dibina dan dimitrakan tersebut antara lain:

Tabel 3.38. Pelaku Usaha yang Dibina dan Dimitrakan Tahun 2022

No.	Kabupaten	Pelaku Usaha
1.	Kutai Timur	<ol style="list-style-type: none">1. PT Telen Prima Sawit2. PT. Sima Agung Prima Sawit3. PT Tridaya Hutan Lestari4. PT Anugerah Lahan Kaltim5. Koperasi Jengea Bong Pet Kuq6. Koperasi Sawit Wehea Tlan Sejahtera7. PT Multi Pasifik Internasional8. PT Perkebunan Warga Rimba9. PT Dewata Sawit Nusantara10. PT Gunta Samba11. PT Karya prima Agro Sejahtera12. PT Shabantara Rawi Sentosa13. Koperasi Jengea Bong Pet Kuq Mitra Usaha PT Dewata Sawit Nusantara14. KSU Harapan Baru Mitra Usaha PT Dharma Inti Sawit Nugraha15. Koperasi Jengea Bong Pet Kuq Mitra Usaha PT Swakarsa Sinar Sentosa16. Koperasi Sawit Wehea Tlan Sejahtera Mitra Usaha PT Dewata Sawit Nusantara17. Koperasi Nusantara Udip Tiga Mitra Usaha PT Nusantara Agro Sentosa18. Koperasi Serba Usaha Putra Mitra Usaha PT Indonesia Plantation Synergi19. Koperasi Perkebunan Kongbeng Bersatu Mitra Usaha PT Kresna Duta Agroindo20. KSU Karya Mulia Etam Mitra Usaha PT Telen21. Koperasi Bumi Baay Persada Mitra Usaha PT Telen22. KSU Nyawatan Sawit Lestari (Sei Karangan Estate) Mitra Usaha PT Telen23. Kop Pasir Hijau Sejahtera Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Kabupaten	Pelaku Usaha
		24. Koperasi Berkat Telen Sejahtera Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit 25. Koperasi Rukmana Sari Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit 26. KSU Bina Abadi Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit 27. Koperasi Sumber Harum Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit 28. KSU Etam Jaya Mandiri I Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit 29. Koperasi Titian Bungur Sejahtera Mitra usaha PT Telen Prima Sawit 30. KSU Rakyat Sejahtera Mitra usaha PT Telen Prima Sawit 31. KSU Pasir Putih Mandiri Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit 32. KSU Karya Maju Bersama (KMB) Mitra Usaha PT Fairco Agro Mandiri 33. Koperasi Pemuda Sasangka (Fairco II) Mitra Usaha PT Fairco Agro Mandiri 34. Koperasi Lestari Jaya Mandiri Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit 35. Koperasi Pasir Hijau Sejahtera Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit 36. KSU Benua Baru Mitra Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit 37. PT Bumi Mas Agro dengan Koperasi Dugai Jaya Mandiri 38. PT Kemilau Indah Nusantara dengan Koperasi Lembak Jaya Cemerlang 39. PT Nusaraya Agro Sawit dengan Koperasi Jasa Perkebunan Sawit Nusantara
2.	Kutai Kartanegara	40. PT Rea Kaltim 41. PT Sawit Unggul Agro Niaga 42. PT Tritunggal Sentral Buana 43. PT Niaga Mas 44. PT Maju Kalimantan Hadapan 45. PT Budi Duta 46. Koperasi Bina Tani Sawit Sedulang Dua 47. PT Agrieast Borneo Kencana 48. PT Jaya Mandiri Sukses 49. PT Prima Mitra Jaya Mandiri 50. PT Teguh Jaya Prima Abadi 51. PT Maju Kalimantan Hadapan dengan Koperasi Perkebunan Sawit Sendowan Desa Puan Cepak dengan pola



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Kabupaten	Pelaku Usaha
		kemitraan inti plasma
3.	Kutai Barat	52. PT Kaltim Hijau Makmur 53. PT Kutai Agro Lestari 54. PT Lembah Sawit Subur 55. Koperasi Sawit Prima 56. Koperasi Teaw Sawit Jaya 57. Koperasi Sibak Mandiri 58. Koperasi Trilapan 59. Koperasi Sempek Sempawat Sawit Makmur 60. Koperasi Telaga Jaya 61. Koperasi Sawit Sembulan Sejahtera 62. PT Farinda Bersaudara 63. Koperasi Sawit Mahang Permai Mitra Usaha PT London Sumatra Indonesia 64. Koperasi Tuah Haji Mitra Usaha PT London Sumatra Indonesia 65. Koperasi Sawit Mitra Bongan Raya Mitra Usaha PT. Farinda Bersaudara 66. Koperasi Sempek Penawang Lendian Sejahtera Mitra Usaha PT Ketapang Agro Lestari 67. Koperasi Sawit Karya Bersama Lestari Jaya Mitra Usaha PT Kruing Lestari Jaya 68. Koperasi Sawit Sibak Mandiri Mitra Usaha PT Kutai Agro Lestari (CT Agro)
4.	Penajam Paser Utara	69. PT Waru Kaltim Plantation 70. PT Sagita Agro Kencana 71. Koperasi One Berkat Solidaritas Mitra Usaha PT. Sumber Bunga Sawit Lestari 72. Koperasi Sumber Sawit Nusantara Mitra Usaha PT. Kebun Mandiri Sejahtera 73. Koperasi Waru Sawit Nusantara Mitra Usaha PT. Waru Kaltim Plantations 74. PT Gawi Makmur Kalimantan dengan Koperasi Mitra Bersama Babulu
5.	Berau	75. PT Cahaya Agro Sawit 76. PT Tanjung Buyu Perkasa 77. Koperasi Muara Lesan Lestari 78. PT Satu Sembilan Delapan 79. PT Jabontara Eka Karsa 80. PT Hutan Hijau mas
6.	Paser	81. PT Indo Kencana Agri 82. PT Anugerah Abadi Multi Usaha 83. PT Buana Wirasubur Sakti 84. PT Cahaya Bintang Sawit Sejati (Kuario)



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Kabupaten	Pelaku Usaha
		85. PT Borneo Indah Marjaya 86. PT Multi Makmur Mitra Alam 87. PT Pucuk Jaya 88. PT Pradiksiguna Tama 89. PT Senabangun Aneka Pertiwi 90. Koperasi Lengkuhan Jaya Mitra Usaha PT Pucuk Jaya 91. Koperasi Marinjan Himba Makmur Bolum Mitra Usaha PT Pucuk Jaya 92. PT Gawi Makmur Kalimantan Dgn Koperasi Sinar Harapan Jaya 93. PT Cahaya Bintang Sawit Sejati Dengan Koperasi Lintas Benua Abadi 94. PT Anugerah Abadi Multi Usaha Dengan Koperasi Awabolum Desa Luan Kec Muara Samu 95. PT Anugerah Abadi Multi Usaha Dengan Koperasi Harapan Maju Desa Suweto Kec Muara Samu 96. KUD Tani Subur Dengan PT Buana Wirasubur Sakti
7.	Lintas Kabupaten	97. PT Gawi Makmur Kalimantan

Sub Kegiatan yang mendukung dalam kegiatan ini adalah Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian dengan indikator :

1. Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan dengan target sebanyak 45 lembaga pekebun terealisasi sebanyak 45 lembaga pekebun (100%). Terdapat penambahan 10 lembaga pekebun yang dimitrakan dari tahun 2022. Lembaga pekebun yang dimitrakan tersebut antara lain:

Tabel 3.39. Lembaga pekebun yang Dimitrakan Tahun 2022

No.	Kabupaten	Pihak Yang Dimitrakan
1.	Paser	1. PT Gawi Makmur Kalimantan Dgn Koperasi Sinar Harapan Jaya 2. PT Cahaya Bintang Sawit Sejati Dengan Koperasi Lintas Benua Abadi 3. PT Anugerah Abadi Multi Usaha Dengan Koperasi Awabolum Desa Luan Kec Muara Samu 4. PT Anugerah Abadi Multi Usaha Dengan Koperasi Harapan Maju



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Kabupaten	Pihak Yang Dimitrakan
		Desa Suweto Kec Muara Samu 5. KUD Tani Subur Dengan PT Buana Wirasubur Sakti
2.	Penajam Paser Utara	6. Koperasi One Berkat Solidaritas PT Gawi Makmur Kalimantan Dengan Koperasi Mitra Bersama Babulu
3.	Kutai Kartanegara	7. PT Maju Kalimantan Hadapan dengan Koperasi Perkebunan Sawit Sendowan Desa Puan Cepak dengan pola kemitraan inti plasma
4.	Kutai Timur	8. PT Bumi Mas Agro Dengan Koperasi Dugai Jaya Mandiri 9. PT Kemilau Indah Nusantara Dengan Koperasi Lembak Jaya Cemerlang 10. PT Nusaraya Agro Sawit dengan Koperasi Jasa Perkebunan Sawit Nusantara

2. Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina dengan target 52 perusahaan dan realisasi 52 perusahaan (100%). Perusahaan yang dibina tersebut antara lain:

Tabel 3.40. Perusahaan yang Dibina Tahun 2022

No.	Kabupaten	Perusahaan
1.	Kutai Timur	1. PT Telen Prima Sawit 2. PT. Sima Agung Prima Sawit 3. PT Tridaya Hutan Lestari 4. PT Anugerah Lahan Kaltim 5. Koperasi Jengea Bong Pet Kuq 6. Koperasi Sawit Wehea Tlan Sejahtera 7. PT Multi Pasifik Internasional 8. PT Perkebunan Warga Rimba 9. PT Dewata Sawit Nusantara 10. PT Gunta Samba 11. PT Karya prima Agro Sejahtera 12. PT Shabantara Rawi Sentosa
2.	Kutai Kartanegara	13. PT Rea Kaltim 14. PT Sawit Unggul Agro Niaga 15. PT Tritunggal Sentral Buana 16. PT Niaga Mas 17. PT Maju Kalimantan Hadapan 18. PT Budi Duta 19. Koperasi Bina Tani Sawit Sedulang Dua 20. PT Agrieast Borneo Kencana



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Kabupaten	Perusahaan
		21. PT Jaya Mandiri Sukses 22. PT Prima Mitra Jaya Mandiri 23. PT Teguh Jaya Prima Abadi
3.	Kutai Barat	24. PT Kaltim Hijau Makmur 25. PT Kutai Agro Lestari 26. PT Lembah Sawit Subur 27. Koperasi Sawit Prima 28. Koperasi Teaw Sawit Jaya 29. Koperasi Sibak Mandiri 30. Koperasi Trilapan 31. Koperasi Sempekat Sempawat Sawit Makmur 32. Koperasi Telaga Jaya 33. Koperasi Sawit Sembulan Sejahtera 34. PT Farinda Bersaudara
4.	Penajam Paser Utara	35. PT Waru Kaltim Plantation 36. PT Sagita Agro Kencana
5.	Berau	37. PT Cahaya Agro Sawit 38. PT Tanjung Buyu Perkasa 39. Koperasi Muara Lesan Lestari 40. PT Satu Sembilan Delapan 41. PT Jabontara Eka Karsa 42. PT Hutan Hijau mas
6.	Paser	43. PT Indo Kencana Agri 44. PT Anugerah Abadi Multi Usaha 45. PT Buana Wirasubur Sakti 46. PT Cahaya Bintang Sawit Sejati (Kuario) 47. PT Borneo Indah Marjaya 48. PT Multi Makmur Mitra Alam 49. PT Pucuk Jaya 50. PT Pradiksiguna Tama 51. PT Senabangun Aneka Pertiwi
7.	Lintas Kabupaten	52. PT Gawi Makmur Kalimantan

Capaian kegiatan maupun sub kegiatan di atas sesuai target yang ditetapkan. Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan tersebut antara lain:

1. Koordinasi yang intensif kepada Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten, pelaku usaha serta Mitra Pembangunan Perkebunan;



2. Sosialisasi kepada pelaku usaha, masyarakat pekebun tentang peraturan dan perundang-undangan terkait kemitraan dan kewajiban perusahaan perkebunan;
 3. Adanya keinginan pekebun swadaya untuk bermitra dengan PKS; dan
 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan usaha perkebunan se Kalimantan Timur.
6. **Program Penyuluhan Pertanian** terealisasi sebesar Rp. 2.131.689.820,- atau 98,51% dari pagu sebesar Rp. 2.163.897.000,-. Target indikator pada program ini yaitu jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk sebanyak 1 lembaga dengan capaian sebanyak 1 lembaga (100%) yaitu UPPB Setia Kawan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Faktor pendorong dalam pencapaian program ini antara lain:
1. Dukungan kebijakan atas komoditas unggulan;
 2. Adopsi teknologi yang ada di wilayah lain;
 3. Respon masyarakat yang baik terhadap produk olahan pekebun;
 4. Peningkatan kualitas dan harga produk olahan;
 5. Meningkatnya kesadaran petani untuk memperbaiki kualitas produk olahannya;
 6. Dukungan Kabupaten/Kota untuk membina dan membentuk UPPB;
 7. Dukungan Kabupaten/Kota dalam pemasaran;
 8. Kebutuhan pasar terhadap jaminan mutu/kualitas produk yang dihasilkan;
 9. terdapat peluang pasar; dan
 10. Akses permodalan sudah tersedia.

Meskipun capaian program ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan namun masih terdapat faktor penghambat dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Alih fungsi lahan;
2. Terbatasnya bahan baku;
3. Belum adanya jaminan harga komoditas perkebunan;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

4. Kualitas produk yang dihasilkan belum memenuhi standar;
5. Masih banyak populasi pohon yang tidak produktif lagi;
6. Keterbatasan SDM petani;
7. Minimnya minat petani yang mau mengolah produk perkebunan menjadi bahan jadi maupun setengah jadi terbatasnya permodalan dalam penerapan teknologi;
8. Masih adanya tanaman yang sudah memasuki usia kurang produktif;
9. Kelembagaan petani belum memiliki business plan; dan
10. Pemahaman terkait korporasi petani yang sesuai dengan Permentan No. 18 Tahun 2018 masih belum dikuasi oleh kelompok tani dan sebagian aparatur pemerintah.

Capaian program ini didukung oleh 3 kegiatan yaitu:

a) Pengembangan ketenagaan penyuluhan pertanian

Kegiatan ini memiliki indikator jumlah SDM petugas lapang dan teknis perkebunan yang dikembangkan kompetensinya dengan capaian 45 orang atau 100% dari target 45 orang. Petugas lapang dan teknis perkebunan yang dikembangkan kompetensinya tersebut antara lain:

Tabel 3.41. Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang

Dikembangkan Kompetensinya Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah
1.	Kota Samarinda	5 Orang
2.	Kabupaten Kutai Kartanegara	20 Orang
3.	Kabupaten Kutai Timur	5 Orang
4.	Kabupaten Kutai Barat	2 Orang
5.	Kabupaten PPU	3 Orang
6.	Kabupaten Paser	2 Orang
7.	Kabupaten Berau	4 Orang
8.	Kabupaten Mahulu	2 Orang
9.	Kota Balikpapan	2 Orang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah
	Total	45 Orang

b) Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian

Kegiatan ini memiliki indikator yaitu:

1. Jumlah kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya dengan capaian 30 kelompok tani atau 100% dari target 30 kelompok tani.

Tabel 3.42. Kelompok Tani yang Dikembangkan Kompetensinya
Tahun 2022

No.	Kelompok Tani	Komoditi	Lokasi
1.	Tunas Baru	Kakao	Kota Samarinda
2.	Karya Usaha	Kakao	Kota Samarinda
3.	Ubag Mulia	Karet	Kota Samarinda
4.	Sawit Makmur	Kelapa Sawit	Kab. Kutai Kartanegara
5.	Anugrah Bersama	Kelapa Sawit	Kab. Kutai Kartanegara
6.	Alam Subur	Karet	Kab. Kutai Kartanegara
7.	KWT. Sumber Sari Rejeki	Kakao	Kab. Kutai Kartanegara
8.	Padat Karya	Kelapa	Kab. Kutai Kartanegara
9.	Berkat Usaha I	Karet	Kab. Kutai Barat
10.	Karya Warga	Karet	Kab. Kutai Barat
11.	Tora Lestari	Lada	Kab. Kutai Barat
12.	Urip Tani	Kakao	Kab. Kutai Barat
13.	Teluk Subur	Kakao	Kab. Kutai Barat
14.	Abadi	Karet	Kab. Kutai Barat
15.	Subur Makmur	Lada	Kab. Kutai Barat
16.	Sinar Harapan V	Lada	Kab. Kutai Barat



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Kelompok Tani	Komoditi	Lokasi
17.	Wijaya Kusuma	Lada	Kab. Kutai Barat
18.	Kwt Bawe Ipu	Lada	Kab. Kutai Barat
19.	Harapan Baru	Lada	Kab. Kutai Barat
20.	Mulia Abadi	Lada	Kab. Kutai Barat
21.	Usaha Bersama	Lada	Kab. Kutai Barat
22.	Radak Sangokng	Kelapa	Kab. Kutai Barat
23.	Usaha Bersama	Kakao	Kab. Kutai Timur
24.	Harapan Jaya	Kakao	Kab. Kutai Timur
25.	Nikai Mandiri	Kelapa Sawit	Kab. Penajam Paser Utara
26.	Maju Bersama	Kakao	Kab. Berau
27.	Rantau Jaya	Kakao	Kab. Berau
28.	Sarunai	Pala	Kab. Berau
29.	Mayang Padi	Pala	Kab. Berau
30.	Sinar Mulya	Pala	Kab. Berau

2. Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan dengan capaian 1 unit atau 100% dari target 1 unit, yaitu teknologi diverfisikasi komoditi kelapa berupa sirup gula kelapa cair organik, mengadopsi dari Provinsi Jawa Tengah, bahan baku nira kelapa diolah menjadi nektar.
3. Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan dengan capaian 7 unit atau 140% dari target 5 unit. Komoditas unggulan yang siap dipromosikan tersebut antara lain:
 1. Lada;
 2. Kelapa;
 3. Kakao;
 4. Kopyor;



5. Aren;
6. Kopi; dan
7. Kelapa Sawit.

c) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

Kegiatan ini memiliki indikator yaitu:

1. Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk dengan capaian 21 lembaga atau 105% dari target 20 lembaga. Lembaga ekonomi pekebun tersebut antara lain:

Tabel 3.43. Lembaga Ekonomi Pekebun Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah
1.	Kabupaten Kutai Kartanegara	2 Lembaga
2.	Kabupaten Kutai Timur	3 Lembaga
3.	Kabupaten Kutai Barat	16 Lembaga
	Total	21 Lembaga

2. Jumlah kelompok tani yang produksinya memenuhi SNI dengan capaian 6 kelompok tani atau 150% dari target 4 kelompok tani. Kelompok tani tersebut antara lain:

1. KT Harapan Baru Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur;
2. Gapoktan Samba Desa Sambera Baru Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. UPPB Etam Jaya Desa Mukti Utama Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur;
4. Kelompok Tani Karya Terpadu Desa Peridan Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Kertanegara;
5. MPIG kakao Berau Kampung Suaran Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau; dan
6. MPIG lada malonan Kabupaten Kutai Kertanegara Desa Sallo Bandang Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kabupaten Kutai Kertanegara.



Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan di atas antara lain:

1. Adanya peluang pasar;
2. Tersedianya akses permodalan;
3. Program pelatihan dan bimtek dari pemerintah daerah cukup banyak terkait diversifikasi dan pemasaran produk;
4. Adanya fasilitasi kemitraan dengan retail besar dan industri perhotelan oleh Dinas perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
5. Adanya dukungan dari Kementerian Hukum dan HAM dalam melindungi Indikasi Geografis terhadap Produk Perkebunan;
6. Adanya dukungan Pemerintah terhadap izin edar baik di keluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota tentang PIRT, Halal oleh Majelis Ulama Indonesia, Balai Pengawasan Obat dan Makanan;
7. Dukungan Laboratorium yang berstandar SNI;
8. Pendampingan pemerintah terkait pengolahan pasca panen yang baik dan perluasan jaringan pemasaran; dan
9. Bantuan Peralatan pasca Panen baik dari APBD Provinsi, APBD Kab dan APBN.

Namun demikian masih terdapat faktor penghambat dalam pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan di atas antara lain:

1. Diperlukan data kelompok tani perkebunan baik yang aktif maupun non aktif (kelas kelompok tani) yang diperlukan untuk dapat dilakukan penguatan kelembagaan berdasarkan kebutuhan, karena data kelompok tani selama ini yang didapat/ diperoleh dari data kelompok tani yang pernah mendapatkan bantuan dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan usulan dari Kabupaten / Kota Kalimantan Timur
2. Petani/pelaku usaha yang berminat untuk melakukan diversifikasi produk turunan realtif masih kecil;



3. Proses pengolahan produk yang membuat pendapatan diterima lebih lama jika dibandingkan dengan menjual produk secara langsung tanpa diolah;
4. SDM petani yang terbatas untuk melakukan diversifikasi dan pengolahan produk;
5. Produk olahan yang ada banyak yang belum tersertifikasi untuk masuk pasar modern/skala besar;
6. Sebagian besar peralatan pengolahan masih tradisional;
7. Sebagian besar petani dalam pengolahan menggunakan metode secara turun temurun;
8. Perbedaan Lokasi tanaman antara yang di daerah Rawa dan didaerah [SEP]perbukitan; dan
9. Perbedaan dalam penanganan pasca panen oleh petani.

Program dan kegiatan di atas didukung oleh 7 sub kegiatan yaitu:

- a) Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN dengan target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan dan capaian kinerjanya sampai dengan akhir tahun anggaran sebanyak 2 kegiatan (100%), yaitu:
 1. Pelatihan Peningkatan Sumberdaya Manusia Bagi Petugas Pendamping Kabupaten Kota (Teknis Budidaya Lada dan Kakao) dengan jumlah peserta 28 Orang.
 2. Pelatihan Peningkatan Sumberdaya Manusia Bagi Petugas Pendamping Perkebunan Kabupaten /Kota (Fasilitator Daerah I) pada Kabupaten Kutai Kertanegara dengan jumlah peserta 20 Orang.
- b) Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian dengan target kinerja sebagai berikut:
 1. Jumlah jenis olahan produk perkebunan yang teradopsi dan disebarluaskan (produk) dengan capaian sebanyak 5 produk atau 100% dari target sebanyak 5 produk yaitu:
 - a. Minuman coklat 3in1;



- b. Minuman coklat;
 - c. Gula batok dari nira kelapa;
 - d. Sirup gula kelapa cair organik; dan
 - e. Gula merah kristal/palm sugar.
2. Jumlah produk olahan unggulan yang dipromosikan dan dipasarkan (Produk) dengan realisasi 20 Produk atau 222,22%. Produk olahan unggulan yang dipromosikan dan dipasarkan tersebut antara lain:
 1. Lada Jahe instan;
 2. Kopi Jahe Lada Instan;
 3. VCO;
 4. Gula Aren Bubuk;
 5. Gula Aren Batok;
 6. Lada Biji Malonan;
 7. Lada Bubuk Malonan;
 8. Lada putih bubuk;
 9. Lada hitam bubuk;
 10. Gula Kelapa Semut;
 11. Coklat Batang;
 12. Kopyor Gelas;
 13. Minyak Kelapa;
 14. Kakao Bubuk;
 15. Kopi Pasak Bumi Gula Aren;
 16. Gula Semut Stik;
 17. Ketumbar;
 18. Minyak Kelapa;
 19. kopi Bubuk; dan
 20. Cocopeat.
- c) Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani dengan target kinerja yaitu jumlah kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani. Kinerja sub kegiatan ini tercapai 20 pertemuan atau 100% dari target 20 pertemuan. Pertemuan tersebut antara lain:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Tabel 3.44. Kegiatan Penyuluhan dan pemberdayaan Petani
Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Pelaksanaan
1.	Kabupaten Kutai Kartanegara	5 Pertemuan
2.	Kabupaten Kutai Barat	8 Pertemuan
3.	Kabupaten Kutai Timur	2 Pertemuan
4.	Kabupaten PPU	1 Pertemuan
5.	Kabupaten Berau	3 Pertemuan
5.	Kota Samarinda	1 Pertemuan
	Total	20 Pertemuan

- d) Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani dengan target kinerja yaitu jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk. Kinerja sub kegiatan ini tercapai 28 lembaga atau 100% dari target 28 lembaga. Terdapat penambahan 4 lembaga dari capaian tahun 2021 sebanyak 24 lembaga. Penambahan 4 lembaga tersebut yaitu:
- a. Kelompok Tani Sido Rukun di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan komoditi karet;
 - b. Kelompok Tani Harapan Baru Kabupaten Kutai Barat dengan komoditi karet;
 - c. UPPB Setia Kawan di Kabupaten penajam Paser Utara dengan komoditi kelapa sawit dan karet; dan
 - d. Kelompok Tani Sungai Asam di Kabupaten Kutai Timur dengan komditi kelapa sawit, karet dan kakao.
- e) Pendampingan Manajemen Korporasi Petani dengan target kinerja yaitu:
1. Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina dengan capaian sebanyak sebanyak 5 unit atau 100% dari target 5 unit. Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina antara lain:



- a. Yang Dibentuk: 1). UPPB Setia Kawan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan 2). UPPB Bina Maju Bersama di Kota Balikpapan; dan
 - b. Yang dibina: 1). MPIG kakao Berau di Kabupaten Berau 2). MPIG Lada malonan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan 3). UPPB Sido Rukun Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi kemitraan usaha atau jaringan pemasaran produk perkebunannya dengan capaian 15 pelaku usaha atau 300% dari target 5 pelaku usaha. 15 pelaku usaha yang difasilitasi kemitraan usaha atau jaringan pemasaran produk perkebunannya, antara lain:
- 1) Poktan Aren Belayan, Pak Tommy, produk olahan gula aren dengan merek GULEKU;
 - 2) PT. Bhakti Borneo Abadi, Bu Adhela Ghina, produk olahan gula aren dengan merek ARENEO;
 - 3) Poktan Nyiur Melambai, Bu Sumirah, produk olahan gula aren dengan merek ZALIKA & ARENKA;
 - 4) Poktan Maju Bersama, Bu Nurmiyati, produk olahan gula aren dengan merek SHUGA;
 - 5) Poktan Buen Were, Pak Arbani, produk olahan gula aren dengan merek CAP PEMUDA;
 - 6) Koperasi Borneo Agro Industri, Pak Suwandi, produk olahan kakao dengan merek BORCO;
 - 7) Koperasi Berau Kakao Sejahtera, Pak Syahran, produk olahan kakao dengan merek BERAU COCOA;
 - 8) KWT Bunga Lestari, Bu Ramlah, produk olahan kelapa dengan merek TANJUNG;
 - 9) Poktan Karya Dharma, Bu Yatira, produk olahan kelapa dengan merek PONDO KESSI;
 - 10) Kelompok Kreatif, Pak Nursalim, produk olahan kelapa dengan merek Gula Kelapa PPU dan Kulukutta;



- 11) Bu Rini Setiani, produk olahan kelapa dengan merek COCOPEAT PUNCAK;
 - 12) Poktan Trubus, Pak Rusly Hatibie, produk olahan lada dengan merek CIMOI;
 - 13) Pak Harry Gunawan, produk olahan lada dengan merek LADA VR;
 - 14) Pak Syamsuddin, produk olahan kelapa dengan merek MARUATO';
 - 15) Pak Ari Bagus, produk olahan kelapa kopyor dengan merek KOPYORKU
- f) Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Korporasi Petani dengan target kinerja yaitu jumlah pengujian sampel produk hasil perkebunan untuk SNI. Kinerja sub kegiatan ini tercapai sebanyak 6 kali atau 100% dari target sebanyak 6 kali. Pengujian sampel produk hasil perkebunan tersebut antara lain:
- a. Pengujian karet (kadar karet kering) sebanyak 3 kali, dimana sampel tersebut berasal dari Kelompok Tani Harapan Baru di Kel. Lamaru Kec. Balikpapan Timur, Gapoktan Samba di Desa Sambera Baru Kec. Marangkayu Kab. Kutai Kartanegara dan UPPB Etam Jaya di Desa Mukti Utama Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur;
 - b. Pengujian gula aren sebanyak 1 kali, dimana sampel tersebut berasal dari Kelompok Tani Karya Terpadu di Desa Peridan Kec. Sangkulirang.
 - c. Pengujian biji lada sebanyak 1 kali dimana sampel tersebut berasal dari Kelompok tani Budi Rahayu di Desa Semoi Kec. Sepaku Kab PPU; dan
 - d. Pengujian kakao sebanyak 1 kali dimana sampel tersebut berasal dari MPIG kakao Berau di Kampung Suaran Kec. Samabliung Kab. Berau.
- g) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani dengan target kinerja yaitu jumlah Kegiatan Sekolah Lapang



Kelompok Tani. Kinerja sub kegiatan ini tercapai sebanyak 1 pertemuan atau 100% dari 1 pertemuan, yaitu pertemuan Pelatihan Sekolah Lapang Hama Terpadu (SL-PHT) komoditi Kakao yang diselenggarakan pada bulan Mei sampai dengan Agustus di kampung Teluk Semanting Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau.

Rata-rata pencapaian kinerja program dan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 tercapai sesuai bahkan melebihi target yang sudah ditetapkan pada rencana kerja dan selama pelaksanaan program dan kegiatan tidak mengalami permasalahan yang signifikan.

D. Pencapaian Target SDGs Lingkungan Hidup

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan, yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesenjangan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;



13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaan. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*) (MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar. SDGs merupakan penyempurnaan MDGs karena:

1. SDGs lebih komprehensif, disusun dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang universal untuk negara maju dan berkembang.
2. Memperluas sumber pendanaan, selain bantuan negara maju juga sumber dari swasta.
3. Menekankan pada hak asasi manusia agar diskriminasi tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya.
4. Inklusif, secara spesifik menyasar kepada kelompok rentan (*No one left behind*).
5. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan: pemerintah dan parlemen, filantropi dan pelaku usaha, pakar dan akademisi, serta organisasi kemasyarakatan dan media.
6. MDGs hanya menargetkan pengurangan “setengah” sedangkan SDGs menargetkan untuk menuntaskan seluruh tujuan (*Zero Goals*).



7. SDGs tidak hanya memuat Tujuan tapi juga Sarana Pelaksanaan (*Means of Implementation*).

Semua Target dan tujuan TPB/SDGs terbagi menjadi empat pilar, yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata kelola. Dinas Perkebunan mendukung pencapaian SDGs pada tujuan berikut:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Tabel 3.46. Tujuan SDGs Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan SDGs	Indikator SDGs	Identifikasi Masalah		Rencana Tindak Lanjut	Institusi Pelaksana Pemerintah / Non Pemerintah
		Kategori	Deskripsi		
15.EKOSISTEM DARATAN	15.1.2.(a).Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)	Regulasi	<ol style="list-style-type: none">1. Belum ada regulasi secara khusus pengelolaan ANKT di area perkebunan ditingkat nasional menyebabkan tidak sinerginya pelaksanaan program kegiatan oleh Pemerintah (K/L), Pemerintah Daerah dan Perusahaan Perkebunan sehingga target luas Area dengan Nilai Konservasi Tinggi yang akan dipertahankan secara nasional seluas 70 juta Ha pada tahun 2024 di khawatirkan tidak akan tercapai2. Penyebaran Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Kabupaten dengan lokasi sulit terjangkau seluruhnya	<ol style="list-style-type: none">1. Mengusulkan rekomendasi membuat Peraturan Presiden tentang pengelolaan ANKT (menaungi pengelolaan ANKT pada seluruh sektor berbasis lahan) dan membuat peraturan Menteri Pertanian tentang petunjuk teknis pengelolaan ANKT pada perkebunan kelapa sawit/karet2. Perlu adanya kolaborasi antara Dinas Perkebunan Provinsi dan Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten dalam melakukan monitoring dan evaluasi ANKT yang tidak dapat dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Tabel 3.47. Target, Indikator dan Capaian SDGs Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

No.	Target	Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Tahun	Target	Capaian	Status
1.	15.1.Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.2.(a).Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	Ha	100.622	2022	102.500	120.371	Tercapai

Pencapaian target di atas didukung melalui program berikut:

Tabel 3.48. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SDGs

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tahun	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Target Tahun 2022		Alokasi Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022		Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan
						Sem 1	Sem 2		Sem 1	Sem 2	
05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	2022	Ha	102.500	102.038	120.371	740.930.000	364.971.370	721.598.770	Kab. Berau, Kutai Timur, Kutai Barat, Mahakam Hulu, Kutai Kertanegara, Paser, Penajam Paser Utara



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

E. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memperoleh alokasi anggaran yang sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp. 53.940.555.342,- dengan rincian program penunjang sebesar Rp. 25.353.633.342,- dan program pembangunan sebesar Rp. 28.586.922.000,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2022 sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, menjadi Rp. 56.284.752.243,- (bertambah Rp. 2.344.196.901,-) dengan rincian program penunjang sebesar Rp. 27.365.880.243,- dan program pembangunan sebesar Rp. 28.918.872.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 49.645.749.860,- (88,20%) dengan rincian untuk belanja program penunjang Rp. 25.632.820.123,- (93,67%) belanja pembangunan sebesar Rp. 24.012.929.737,- (83,04%). Perbandingan antara sasaran strategis, anggaran serta realisasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.49. Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya PDRB sub sektor perkebunan	20.493	17.388 *	84,85	23.654.619.500	18.823.118.303	79,57
2	Meningkatnya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan	58	80	137,93	2.670.577.500	2.625.308.385	98,30
3	Meningkatnya kesejahteraan pekebun	110	162,66	147,87	2.593.675.000	2.564.503.049	98,88
	Jumlah				28.918.872.000	24.012.929.737	83,04
	Total Anggaran				56.284.752.243	49.645.749.860	88,20

*) Sumber: Data BPS (Angka Sangat Sangat Sementara Triwulan IV Tahun 2022)



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, 51,38% anggaran Dinas Perkebunan dipergunakan untuk pembiayaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Dan 48,62% belanja langsung dipergunakan untuk pembiayaan program penunjang dinas yang secara tidak langsung untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Tabel 3.50. Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan Sumber Dana APBD Tahun 2022

Kode	Perangkat Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Murni (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Penanggung jawab
	Dinas + 3 UPTD	53,940,555,342	56,284,752,243	49,645,749,860	88.20	
	Dinas Perkebunan	47,646,782,946	48,698,834,922	42,315,259,564	86.89	
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22,094,685,946	22,814,787,922	21,224,790,599	93.03	Sekretariat
3.27.001.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,119,593,600	1,119,593,600	1,067,393,355	95.34	
3.27.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	510,860,000	510,860,000	471,563,160	92.31	
3.27.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	608,733,600	608,733,600	595,830,195	97.88	
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15,353,634,826	15,898,973,878	14,621,495,914	91.97	
3.27.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,906,274,826	15,451,613,878	14,290,655,914	92.49	
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	447,360,000	447,360,000	330,840,000	73.95	
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	110,070,000	110,070,000	109,816,460	99.77	
3.27.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	110,070,000	110,070,000	109,816,460	99.77	
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,647,181,800	1,790,063,724	1,724,918,914	96.36	
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35,955,000	35,955,000	35,911,000	99.88	
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117,290,000	117,290,000	117,174,455	99.90	
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	400,882,000	400,882,000	400,626,835	99.94	
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	52,654,800	52,654,800	52,650,336	99.99	
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,600,000	9,600,000	9,600,000	100.00	
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,030,800,000	1,173,681,924	1,108,956,288	94.49	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Kode	Perangkat Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Murni (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Penanggung jawab
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	334,115,000	334,115,000	314,569,700	94.15	
3.27.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	334,115,000	334,115,000	314,569,700	94.15	
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,907,027,320	2,907,027,320	2,739,548,826	94.24	
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	31,210,000	31,210,000	31,210,000	100.00	
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	417,724,200	417,724,200	303,431,986	72.64	
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	336,205,200	336,205,200	329,784,000	98.09	
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,121,887,920	2,121,887,920	2,075,122,840	97.80	
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	623,063,400	654,944,400	647,047,430	98.79	
3.27.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	269,021,400	300,902,400	293,150,266	97.42	
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199,892,000	199,892,000	199,885,056	100.00	
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	154,150,000	154,150,000	154,012,108	99.91	
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	14,810,658,000	14,810,658,000	11,156,061,775	75.32	Bid. Pengembangan Komoditi
3.27.002.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	14,810,658,000	14,810,658,000	11,156,061,775	75.32	
3.27.002.1.01.001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	14,810,658,000	14,810,658,000	11,156,061,775	75.32	
3.27.003	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	6,997,252,000	7,129,202,000	6,037,862,000	84.69	Bid. Pengembangan Komoditi
3.27.003.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	6,997,252,000	7,129,202,000	6,037,862,000	84.69	
3.27.003.1.01.001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	6,997,252,000	7,129,202,000	6,037,862,000	84.69	
3.27.005	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1,195,590,000	1,195,590,000	1,181,406,320	98.81	Bid. Perkebunan Berkelanjutan dan Bid. Usaha



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Kode	Perangkat Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Murni (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Penanggung jawab
3.27.005.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	1,195,590,000	1,195,590,000	1,181,406,320	98.81	
3.27.005.1.01.002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	740,930,000	740,930,000	728,978,770	98.39	
3.27.005.1.01.003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	454,660,000	454,660,000	452,427,550	99.51	
3.27.006	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	584,700,000	584,700,000	583,449,050	99.79	Bid. Usaha
3.27.006.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	584,700,000	584,700,000	583,449,050	99.79	
3.27.006.1.01.003	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	584,700,000	584,700,000	583,449,050	99.79	
3.27.007	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1,963,897,000	2,163,897,000	2,131,689,820	98.51	Bid. Pengembangan Komoditi dan Bid. Pengolahan dan Pemasaran
3.27.007.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	198,666,000	398,666,000	387,479,100	97.19	
3.27.007.1.01.001	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	198,666,000	398,666,000	387,479,100	97.19	
3.27.007.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	944,185,000	944,185,000	939,182,655	99.47	
3.27.007.1.02.001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	533,887,000	533,887,000	529,473,755	99.17	
3.27.007.1.02.002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	410,298,000	410,298,000	409,708,900	99.86	
3.27.007.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	821,046,000	821,046,000	805,028,065	98.05	
3.27.007.1.03.001	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	203,456,000	203,456,000	203,456,000	100.00	
3.27.007.1.03.002	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	351,340,000	351,340,000	337,868,075	96.17	
3.27.007.1.03.003	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	97,293,000	97,293,000	94,812,590	97.45	
3.27.007.1.03.004	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	168,957,000	168,957,000	168,891,400	99.96	
	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan	1,868,918,988	2,198,475,923	2,116,399,383	96.27	
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,335,536,488	1,665,093,423	1,656,740,255	99.50	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Kode	Perangkat Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Murni (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Penanggung jawab
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	82,800,000	82,800,000	82,800,000	100.00	
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	82,800,000	82,800,000	82,800,000	100.00	
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	195,919,000	195,919,000	195,704,344	99.89	
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,750,000	12,750,000	12,747,960	99.98	
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17,175,000	17,175,000	17,155,500	99.89	
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58,574,000	58,574,000	58,573,485	100.00	
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5,180,000	5,180,000	5,180,000	100.00	
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,840,000	3,840,000	3,840,000	100.00	
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98,400,000	98,400,000	98,207,399	99.80	
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	309,507,500	309,507,500	306,215,700	98.94	
3.27.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	309,507,500	309,507,500	306,215,700	98.94	
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	506,683,988	506,683,988	503,649,370	99.40	
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,500,000	5,500,000	5,500,000	100.00	
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113,889,820	113,889,820	113,419,007	99.59	
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	221,832,760	221,832,760	219,268,955	98.84	
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165,461,408	165,461,408	165,461,408	100.00	
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240,626,000	570,182,935	568,370,841	99.68	
3.27.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22,406,000	22,406,000	21,804,043	97.31	
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	190,000,000	519,556,935	518,351,748	99.77	
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28,220,000	28,220,000	28,215,050	99.98	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Kode	Perangkat Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Murni (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Penanggung jawab
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	533,382,500	533,382,500	459,659,128	86.18	
3.27.002.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	533,382,500	533,382,500	459,659,128	86.18	
3.27.002.1.02.001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	263,299,000	263,299,000	230,226,968	87.44	
3.27.002.1.02.004	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	270,083,500	270,083,500	229,432,160	84.95	
	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	1,871,455,328	2,443,655,328	2,296,413,579	93.97	
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	981,167,828	1,553,367,828	1,435,960,564	92.44	
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	82,800,000	82,800,000	82,800,000	100.00	
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	82,800,000	82,800,000	82,800,000	100.00	
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45,000,000	45,000,000	43,419,468	96.49	
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45,000,000	45,000,000	43,419,468	96.49	
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	181,212,500	286,212,500	284,151,789	99.28	
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,464,000	8,464,000	8,439,450	99.71	
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,420,000	3,420,000	3,405,702	99.58	
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65,270,000	65,270,000	63,893,150	97.89	
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18,018,500	18,018,500	18,018,138	100.00	
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,840,000	3,840,000	3,840,000	100.00	
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82,200,000	187,200,000	186,555,349	99.66	
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81,812,000	81,812,000	79,254,000	96.87	
3.27.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81,812,000	81,812,000	79,254,000	96.87	
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	489,030,328	489,030,328	461,709,576	94.41	
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,900,000	3,900,000	3,900,000	100.00	
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	172,825,440	172,825,440	145,689,192	84.30	
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan	147,143,000	147,143,000	146,983,000	99.89	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Kode	Perangkat Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Murni (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Penanggung jawab
	Perlengkapan Kantor					
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	165,161,888	165,161,888	165,137,384	99.99	
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101,313,000	568,513,000	484,625,731	85.24	
3.27.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12,203,000	12,203,000	11,439,150	93.74	
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	68,600,000	535,800,000	452,970,581	84.54	
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20,510,000	20,510,000	20,216,000	98.57	
3.27.005	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	890,287,500	890,287,500	860,453,015	96.65	
3.27.005.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	890,287,500	890,287,500	860,453,015	96.65	
3.27.005.1.01.001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	890,287,500	890,287,500	860,453,015	96.65	
	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	2,553,398,080	2,943,786,070	2,917,677,334	99.11	
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	942,243,080	1,332,631,070	1,315,328,705	98.70	
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	82,800,000	82,800,000	74,280,000	89.71	
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	82,800,000	82,800,000	74,280,000	89.71	
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60,000,000	60,000,000	59,999,420	100.00	
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60,000,000	60,000,000	59,999,420	100.00	
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	211,490,000	279,890,000	279,768,377	99.96	
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,631,000	2,631,000	2,624,000	99.73	
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,260,000	2,260,000	2,197,800	97.25	
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64,756,000	64,756,000	64,751,734	99.99	
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,923,000	7,923,000	7,919,000	99.95	
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,920,000	1,920,000	1,920,000	100.00	
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132,000,000	200,400,000	200,355,843	99.98	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Kode	Perangkat Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Murni (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Penanggung jawab
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	420,370,080	420,370,080	416,504,972	99.08	
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00	
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74,149,320	74,149,320	71,009,712	95.77	
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	136,394,000	136,394,000	135,668,500	99.47	
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	206,826,760	206,826,760	206,826,760	100.00	
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167,583,000	489,570,990	484,775,936	99.02	
3.27.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12,203,000	12,203,000	11,911,490	97.61	
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	130,000,000	451,987,990	447,609,300	99.03	
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25,380,000	25,380,000	25,255,146	99.51	
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1,611,155,000	1,611,155,000	1,602,348,629	99.45	
3.27.002.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1,611,155,000	1,611,155,000	1,602,348,629	99.45	
3.27.002.1.02.004	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1,611,155,000	1,611,155,000	1,602,348,629	99.45	

Berdasarkan tabel di atas, capaian APBD setelah Perubahan Dinas Perkebunan beserta 3 UPTD mencapai 88,20%. Capaian tersebut terdiri dari capaian belanja program penunjang dan belanja program pembangunan Dinas dan UPTD. Capaian belanja program penunjang dinas mencapai 93,67%. Capaian ini belum mencapai 100% dikarenakan terdapat SILPA pada gaji dan tunjangan ASN dari beberapa pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah memasuki usia purna tugas. Sedangkan capaian belanja langsung mencapai 83,04%. Capaian Dinas dan masing-masing UPTD sebagai berikut:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

1. Dinas dari pagu Rp. 48.698.834.922,- terealisasi sebesar Rp. 42.315.259.564,- atau 86,89%. Realisasi tersebut tidak mencapai 100% dikarenakan oleh SILPA positif sisa kegiatan dan pengadaan. Realisasi masing-masing bidang sebagaimana penjabaran berikut:

- a) Sekretariat dari pagu sebesar Rp. 22.814.787.922,- terealisasi sebesar Rp. 21.224.790.599,- atau 93,03% yang terdiri dari belanja operasi pegawai sebesar Rp. 15.898.973.878 dengan realisasi sebesar 14.621.495.914,- atau 91,97% dan belanja barang dan jasa serta modal sebesar Rp. 6.915.814.044,- dengan realisasi Rp. 6.603.294.685,- atau 95,48%.
- b) Bidang Pengembangan Komoditi dari pagu sebesar Rp. 23.121.237.000,- terealisasi sebesar 18.363.459.175,- atau 79,42%.
- c) Bidang Perkebunan Berkelanjutan dari pagu sebesar Rp. 1.027.790.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.014.145.820,- atau 98,67%.
- d) Bidang Usaha dari pagu sebesar Rp. 752.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 750.709.550,- atau 99,76%.
- e) Bidang Pengolahan dan Pemasaran dari pagu sebesar Rp. 982.520.000,- terealisasi sebesar Rp. 962.154.420,- atau 97,93%.

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan di Bidang di atas antara lain:

- a. Kurang tepatnya dalam proses perencanaan penganggaran menyebabkan terdapat 1 sub kegiatan yaitu Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian aktivitas intensifikasi tanaman perkebunan (POKIR) senilai Rp. 9.800.000.000,- mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan. Sehingga pelaksanaan dilakukan pada perubahan APBD;
- b. Belanja hibah senilai Rp. 440.000.000 pada 3 kelompok tidak dapat dilaksanakan (SILPA). Hal ini dikarenakan setelah dilakukan verifikasi terhadap proposal kelompok pengusul, 2 kelompok yaitu Gapoktan Karya Bersama dan Kelompok Tani Sumber Makmur komoditi yang diusahakan bukan merupakan kewenangan Dinas Perkebunan. Sedangkan 1 kelompok yaitu Kelompok Tani Sipatokong Sipatuo menyatakan tidak bersedia menerima bantuan berupa uang;



- c. Terdapat kenaikan harga benih kelapa sawit yang signifikan sehingga perluasan kelapa sawit seluas 70 Ha dilaksanakan pada perubahan APBD;
- d. Masih belum terbiasanya dengan penggunaan FMIS (*Financial Management Information System*) sebagai platform penatausahaan keuangan tahun 2022.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a) Aktif berkoordinasi dengan Bappeda, BPKAD, Biro PBJ dan Inspektorat wilayah Kaltim dalam pelaksanaan intensifikasi tanaman perkebunan (POKIR) dan belanja hibah;
 - b) Mengikuti sosialisasi penggunaan FMIS (*Financial Management Information System*); dan
 - c) Melakukan rapat-rapat monitoring dan pengendalian untuk percepatan pelaksanaan kegiatan tahun 2022.
2. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan dari pagu Rp. 2.198.475.923,- terealisasi sebesar Rp. 2.116.399.383,- atau 96,27%. Realisasi tersebut tidak mencapai 100% dikarenakan oleh SILPA positif dari sisa pengadaan, sisa pelaksanaan kegiatan dan pada sub kegiatan pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu kegiatan workshop e-benih untuk petugas pengawas benih tanaman Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Permasalahan tersebut dikarenakan kegiatan workshop e-benih telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.
 3. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan dari pagu Rp. 2.443.655.328,- terealisasi sebesar Rp. 2.296.413.579,- atau 93,97%. Realisasi tersebut tidak mencapai 100% dikarenakan oleh SILPA positif dari sisa pengadaan dan sisa pelaksanaan kegiatan.
 4. UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan dari pagu 2.943.786.070,- terealisasi 2.917.677.334,- atau 99,11%. Realisasi tersebut tidak mencapai 100% dikarenakan oleh SILPA positif dari sisa pengadaan dan sisa pelaksanaan kegiatan.



BAB IV PENUTUP

Secara umum, pencapaian sasaran strategis yang sudah ditetapkan sebagai kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 telah mencapai target. Rata-rata keseluruhan capaian indikator sasaran strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mencapai target. Capaian 3 (tiga) sasaran Dinas Perkebunan meliputi:

- a. Sasaran pertama: meningkatnya nilai PDRB sub sektor perkebunan mencapai 17.388 Miliar Rupiah (84,85%) (Berdasarkan angka sangat sangat sementara BPS Provinsi Kalimantan Timur triwulan IV tahun 2022).
- b. Sasaran kedua: meningkatnya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan mencapai 137,93% yakni sebanyak 80 Perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*).
- c. Sasaran ketiga: meningkatnya kesejahteraan pekebun dengan rata-rata NTP perkebunan rakyat sebesar 162,66% atau tercapai 147,87% dari target.

Dalam pencapaian target kinerja tersebut di atas tentu tidak lepas dari kendala dan permasalahan. Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang belum tercapai tersebut, diantaranya adalah penurunan produksi, penghapusan pupuk subsidi untuk beberapa komoditi mulai 1 Juli 2022, adanya kebijakan pemerintah pelarangan ekspor CPO serta intensifikasi, peremajaan dan rehabilitasi yang telah dilakukan pada tahun 2022 baru dirasakan hasilnya tahun selanjutnya.

Pada tahun 2022, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur diarahkan untuk meminimalisir kendala-kendala tersebut. Program dan kegiatan prioritas tahun 2022 antara lain:

1. Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi komoditas perkebunan, terlaksananya pengawasan peredaran dan sertifikasi benih serta peningkatan pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat, terutama 5 komoditi unggulan perkebunan, yaitu Kelapa sawit, karet, kelapa, kakao dan lada. Pencapaian program tersebut didukung melalui kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian. Kegiatan ini melaksanakan



Intensifikasi kelapa sawit 150 Ha, Intensifikasi karet 150 Ha, Intensifikasi kelapa 20 Ha, Intensifikasi kakao 150 Ha, Peremajaan kakao 50 Ha, Intensifikasi lada 150 Ha, dan Rehabilitasi lada 50 Ha.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan. Pencapaian program tersebut didukung melalui kegiatan perluasan kakao 150 ha, perluasan karet 150 Ha, perluasan kelapa 50 Ha, perluasan kelapa sawit 70 Ha, perluasan lada 100 Ha, perluasan pala 100 Ha, dan aren 100 Ha.

3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini bertujuan untuk mendukung dalam penurunan emisi gas rumah kaca serta tingkat serangan OPT sub sektor perkebunan. Pencapaian program tersebut didukung melalui kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Provinsi.

4. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini mendukung dalam peningkatan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan. Pencapaian program tersebut didukung melalui kegiatan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah Kabupaten/Kota

5. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini bertujuan untuk mendukung dalam pembentukan kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan. Pencapaian program tersebut didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani;
- b. Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian; dan
- c. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan.

Selain itu juga dilakukan kegiatan penunjang, seperti sosialisasi maupun pelatihan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani terhadap budidaya, penanganan hama dan penyakit, penyediaan bahan tanaman maupun pengawasan peredaran dan sertifikasi benih.